



**PEMBANGUNAN PARIWISATA,
MANAJEMEN SITUS SEJARAH,
DAN KEARIFAN LOKAL
DI KOTA PEMATANGSIANTAR**



**Dr. Hisarma Saragih, M.Hum
Jalatus Habungaran Hasugian, S.Pd., M.A**

Dr. Hisarma Saragih, M.Hum
Jalatus Habungaran Hasugian, S.Pd.,M.H.,M.A

**Pembangunan Pariwisata,
Manajemen Situs Sejarah dan
Kearifan Lokal di Kota
Pematangsiantar**



Penerbit Yayasan Wiyata Bestari Samasta
Cirebon, 2022

**Pembangunan Pariwisata, Manajemen Situs Sejarah dan Kearifan
Lokal di Kota Pematangsiantar**

viii + 289 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-99928-6-6

Penulis : Hisarma Saragih & Jalatua Habungaran Hasugian

Tata Letak : Team Wiyata Bestari Samasta

Desain Sampul : Farhan Saefullah

Cetakan 1 : Juni 2022

Copyright © 2022 by Penerbit Yayasan Wiyata Bestari Samasta
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit Yayasan Wiyata Bestari Samasta

Anggota IKAPI

Jl. Sumadinata 22 Cirebon – Jawa Barat Indonesia 45151

Cirebon Telp. 085724676697

e-mail: wbsamasta@gmail.com

Web : <http://wbs-indonesia.com/>

KATA PENGANTAR

Menulis buku merupakan salah satu cara untuk mewariskan ilmu pengetahuan untuk dibaca oleh orang lain. Demikian halnya dengan buku ini, yang diberi judul : Pembangunan Pariwisata, Manajemen Situs Sejarah Dan Kearifan Lokal Di Kota Pematangsiantar, adalah upaya kami untuk mewariskan pengetahuan kepada siapa saja yang berminat membacanya.

Kami penulis buku ini Hisarma Saragih dan Jalatua Habungaran Hasugian, menyampaikan terimakasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya dapat menulis dan menerbitkan buku ini sebagai suatu karya akademik dalam bidang studi pembangunan pariwisata, melalui manajemen situs sejarah dan sekaligus mewariskan nilai-nilai kearifan lokal Simalungun di kota Pematangsiantar. Bagaimanapun karya ini adalah merupakan bukti komitmen kami sebagai dosen di Universitas Simalungun yang merupakan Perguruan Tinggi tertua di kota Pematangsiantar Sumatera Utara. Dari sudut kampus ini kami berupaya melahirkan karya-karya sebagaimana diamanatkan dalam tugas Tri Darma Perguruan Tinggi bidang Penelitian.

Dengan terbitnya buku ini, dan sampai dihadapan para pembaca yang budiman, maka kami berharap sekecil apa pun ini, dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan

khususnya dalam bidang pariwisata, situs sejarah, dan nilai-nilai kearifan lokal tradisional yang masih relevan dipergunakan pola berpikirnya sampai pada saat ini.

Penulisan buku ini tidaklah dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada para informan yang tidak kami sebutkan namanya dalam buku ini karena begitu banyaknya. Rasa terima kasih kami juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Simalungun Pematangsiantar, yang memberikan ijin surat menyurat sebagaimana aturan untuk menulis buku pada perguruan Tinggi.

Buku ini berisikan bab dan sub bab, dengan masing masing gambaran sebagai berikut : Bab 1 berisikan Pendahuluan, Bab 2 berisikan Potret Pematangsiantar dari wilayah kerajaan tradisional menjadi kota modern, Bab 3. Fenomena Situs Sejarah, Warisan Tempoe Doeloe, Potensi Destinasi Dan Edukasi Historis Di Kota Pematangsiantar. Bab 4. Pelestarian Situs Sejarah Dan Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa. Bab 5. Pembangunan Dan Manajemen Pariwisata. Bab 6. Penutup.

Kami berharap buku ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa yang mendalami Studi Pembangunan, Manajemen Pariwisata, Pendalaman berbagai situs sejarah dan Pembangunan Pariwisata, serta pendidikan sejarah dalam mendalami kearifan lokal masyarakat Simalungun di kota Pematangsiantar khususnya dan Sumatera Utara umumnya.

Menutup kata pengantar ini, kami mengucapkan terimakasih untuk Penerbit, yang berupaya dalam penerbitan buku ini. Kesadaran kami bak pepatah yang mengatakan, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada hujan yang tak basah, demikian juga karya ini tidaklah demikian sempurna. Sebab kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu kami sampaikan terima kasih, dan semoga kehadiran buku ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang dapat memaanfaatkannya.

Wassalam. Terimakasih

Pematang Siantar, Juni 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Beberapa Studi Terdahulu Tentang Pembangunan Pariwisata	11
C. Konsep, Pendekatan, dan Sumber	22
Bab II Potret Pematangsiantar Dari Wilayah Kerajaan Tradisional Menjadi Kota Modern	27
A. Masa Pra Kemerdekaan	27
1. Pemerintah Kerajaan Siantar	27
2. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda	35
B. Dinamika Perjuangan Era Perang Kemerdekaan	74
1. Berakhirnya Pendudukan Jepang	74
2. Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan	56
C. Potret Dinamika Kota Pematangsiantar Masa Kini	69
1. Menjadi Pusat Ekonomi Daerah <i>Hiterland</i>	69
2. Kota Multikultural Etnik dan Agama	73
3. Komitmen Merealisasikan <i>Sapangambe</i> <i>Manoktok Hitei</i>	77
Bab III Fenomena Situs Sejarah, Warisan Tempoe Doeloe, Potensi Destinasi, dan Edukasi Historis di Kota Pematangsiantar	81
A. Pengantar	81
B. Pusat Kerajaan dan Pemerintahan	85
1. Istana Kerajaan Siantar	85
2. Gedung Balai Kota	94
3. Gedung Bank Rakyat Indonesia	98
4. Gedung Juang 1945 (Gedung Nasional)	100

5.	Gedung Pengadilan Negeri	103
6.	Markas Polisi Resort Pematangsiantar	105
7.	Monumen Perjuangan Kemerdekaan	107
8.	Kompleks Bekas Penjara Kolonial	110
C.	Infrastruktur dan Fasilitas Publik	112
1.	Pabrik Teh Kebun Martoba	112
2.	Jembatan Marihat (<i>Marihat Brug</i>)	122
3.	Kantor Pos Pematangsiantar	126
4.	Pabrik Es Siantar	128
5.	PDAM Tirtauli	131
6.	Siantar Hotel	135
7.	Taman Hewan Pematangsiantar	138
8.	RSUD Dr. Djasamen Saragih	140
9.	Rumah Sakit Tentara	145
10.	Stasiun Kereta Api	148
11.	Museum Simalungun	150
12.	Becak Antik Khas Siantar	153
13.	Lapangan Merdeka (Taman Bunga)	157
14.	Pusat Pasar Horas	160
D.	Bangunan Keagamaan	165
1.	Mesjid Raya Pematangsiantar	165
2.	Gereja HKBP Resort Pematangsiantar	167
3.	Gereja Katolik St. Laurentius Brindisi	173
4.	GKPS Sudirman dan Kantor Pusat Jl. Pdt. J. Wismar Saragih	175
5.	GPIB Maranatha Jl. Simbolon	179
6.	Gurdwara Shree Guru Nanak Devji Pematangsiantar	182
7.	Vihara Avalokitesvara dan Patung Dewi Kwan Im	186
8.	Maha Vihara Vidya Maitreya	191
9.	Pura Jagadhita Toba Pematangsiantar	194
E.	Fasilitas Pendidikan	196
1.	SMA Negeri 4	196
2.	SMP Negeri 1	201
3.	SD Negeri 122350	202

4. Perguruan Sultan Agung	206
5. Perguruan HKBP	209
6. Perguruan Taman Asuhan	211
Bab IV Situs Sejarah, Kearifan Lokal, dan Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa	216
A. Upaya Pelestarian	216
B. Inventarisasi dan Dokumentasi	221
C. Pemeliharaan dan Pelestarian Secara Teknis	225
D. Penguatan Kelembagaan dan Komponen Masyarakat	229
E. Penulisan Situs-situs Sejarah Kota Pematangsiantar	232
F. Kesadaran Sejarah Bangsa Indonesia	234
Bab V Pembangunan dan Manajemen Pariwisata	239
A. Pembangunan Wisata	239
B. Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan	242
1. Pengembangan Kawasan Pariwisata	245
2. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	247
C. Manajemen Kepariwisata	252
1. Landasan Pembangunan Pariwisata	253
2. Daya Tarik Wisata	257
D. Cagar Budaya sebagai Daya Tarik Wisata	264
Bab VI Penutup	271
Daftar Pustaka	276
Profil Penulis	286

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas perjalanan manusia telah ada sejak zaman dahulu kala, yaitu semenjak manusia itu mengenal pertukaran barang atau kita sebut dengan perdagangan. Perjalanan manusia dapat kita peroleh informasinya dalam sejarah umat manusia misalnya yang dilakukan oleh pedagang dari Yunani, Romawi, Arab, India, Cina, dan Eropah. Tujuan perjalanan umat manusia berkembang seturut dengan kebutuhan zaman, misalnya adanya keinginan untuk misi agama yaitu menyebarkan agama, dan juga kebutuhan akan ilmiah mempelajari budaya (etnografi) bangsa bangsa yang dikunjungi.

Kita mengenal istilah “jalan sutra”, atau “jalan Sutra” yaitu jalur dagang yang dibuka orang-orang yang menghubungkan Timur Tengah (Arab) dengan India, dan terus ke Tiongkok (Cina). Jalur “jalan sutra” inilah yang paling tua yang dijalani manusia, sehingga terbentuk hubungan antar benua. Kisah jalur sutra dapat diikuti jejaknya lewat sejumlah catatan para petualang di abad pertengahan seperti Marco Polo yang mendeskripsikan route dari Bagdad sampai China¹.

Selain itu di wilayah Nusantara juga kita kenal dengan “jalur rempah” yang saat ini tengah dipopulerkan di Indonesia. Jalur Rempah adalah rute nenek moyang bangsa Indonesia menjalin hubungan antar suku & bangsa dengan

¹ Frances Wood, 2009, *Jalur Sutra-Dua Ribu Tahun di Jantung Asia*, (terjemahan), Penerbit: PT Elex Media Komputindo : Jakarta. hlm. 1-2.

membawa rempah sebagai nilai persahabatan. Jalur Rempah telah menciptakan simpul-simpul ke Indonesian antar wilayah di Nusantara dan menempatkan Indonesia sebagai wilayah strategis dalam perdagangan dunia. Perdagangan cengkih, pala, dan lada menjadi wahana interaksi antarberbagai suku dan etnik di Indonesia. Perdagangan rempah-rempah membawa interaksi dan pertukaran nilai-nilai, penyebaran agama, persilangan budaya, kesenian, sastra, gastronomi, dan sebagainya. Diantara peziarah Cina Budhis, adalah Fah-Hsien, mengunjungi pulau Ye-po-ti (Jawa) pada tahun 414, dan memberikan laporan bahwa hanya sedikit penduduknya yang mengikuti ajaran Budha. Selain itu ada juga penziarah yang bernama I-tsing yang ziarah tahun 671 dan 629, dan singgah di Sumatera dan Jawa tepatnya di kerajaan Kaling.²

Berbagai prasasti masa lalu yang menunjukkan kepada kita bahwa selama kunjungan manusia ke wilayah tertentu dan selama kunjungannya telah mengajarkan budayanya sendiri dan sekaligus mempelajari budaya lain. prasasti tersebut seperti yang ditemukan pada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara dan lainnya. Candi Borobudur adalah merupakan bukti, adanya perjalanan penziarahan masa lalu manusia dari India ke pulau Jawa.

Adanya dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih baik telah mendorong orang untuk melakukan perjalanan jauh dari tempat kediamannya dimasa lampau. Hal ini dapat dituliskan dalam sejarah yaitu pada tahun 1853 Commodore Ferry dari Amerika Serikat mencoba membuka isolasi budaya Kaisar Meiji di Jepang dan pada tanggal 31 Maret 1854 Jepang

² Vlekke, Bernard, HM, (2016), *Nusantara : Sejarah Indonesia*, PT Gramedia : Jakarta, hlm. 24-27.

membuka diri³. Setelah peristiwa ini budaya Jepang terbuka untuk dunia secara luas dan menerima modernisasi Barat. Contoh berikutnya adalah pada tahun 1596 Cornelius de Houtman mulai membuka isolasi budaya Nusantara, setelah mendarat di pelabuhan Banten dan sejak itu menyusul bangsa Belanda dan mengubah isolasi budaya bangsa nusantara, dan saat ini sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴.

Adanya perjalanan manusia ke luar wilayahnya dengan berbagai tujuan, dan motivasi mereka itu dapat disebut sebagai para wisatawan. Mereka adalah para pejalan (orang) yang mengadakan wisata, perjalanan. Semakin banyaknya kebutuhan manusia. maka semakin meningkat pula perjalanan dan route yang dirancang. Perjalanan membutuhkan fasilitas, seperti transportasi, akomodasi, dan komunikasi dengan berbagai ragam suku bangsa, negara dan sebagainya. Tak pelak lagi bahwa usaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dapat dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata.

Pariwisata telah menjadi salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara di benua Asia seperti Thailand, Singapura, Filipina, Fiji, dan termasuk Indonesia. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, sehingga pariwisata sering disebut sebagai “paspor untuk pembangunan”, “gula jenis baru”, alat untuk pembangunan daerah, ekspor tak terlihat, industri yang tidak menimbulkan polusi. Pariwisata merupakan sumber devisa bagi negara,

³ Reischauer, Edwin O, (1982), *Manusia Jepang*, : Penerbit Sinar Harapan : Jakarta. hlm.96. Baca juga Lan, Nio Joe, (1962), *Jepang Sepanjang Masa*, Penrbit PT Kinta: Jakarta. hlm.126.

⁴ Rickklefs, M.C, (2005), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Penerbit Serambi: Jakarta. Hlm. 70

dan menambah pendapatan bagi rakyat setempat yang memiliki destinasi wisata. Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan *wisata* berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “kepariwisataan dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”.⁵

Pariwisata merupakan fenomena yang timbul karena suatu perilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhan melakukan perjalanan keluar dari tempat tinggalnya sehari-hari dengan sukarela untuk jangka waktu yang terbatas dan bukan untuk mencari nafkah. Unsur penting dalam pariwisata antara lain adalah : Adanya motivasi untuk melakukan perjalanan; Adanya perpindahan seseorang dalam hal ini wisatawan, dari tempat tinggalnya ke tempat yang dituju, Adanya interaksi antara wisatawan itu dengan berbagai pihak selama melakukan perjalanan baik biro perjalanan, maupun pihak lain yang terlibat dalam rangkaian pariwisata. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat sementara dan memberikan pengalaman tertentu.

Secara umum bahwa aktivitas pariwisata yang dilakukan oleh manusia dalam pelaksanaannya selalu mengandung beberapa ciri pokok, yaitu : (1) Adanya unsur *travel* (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya.; (2) Adanya unsur tinggal sementara di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal

⁵ Yoeti (1996). *Pemasaran Pariwisata*. Bandung : Angkasa.hlm.112

yang bukan biasanya.; (3) Tujuan utama dari pergerakan tersebut bukan untuk mencari penghidupan atau pekerjaan pada lokasi yang dituju.⁶

Pariwisata merupakan suatu aktivitas berpergian ke tempat lain dalam periode waktu yang bersifat sementara. Motiv wisatawan adalah adanya keinginan yang beraneka ragam seperti : kebutuhan jasmani dan rohani. Keinginan jasmani berkaitan dengan kebutuhan akan kesehatan dan pergantian suasana, wisata yang demikian disebut juga sebagai wisata religi. Adanya keinginan rohani adalah memberikan penyegaran dari kepenatan aktivitas sehari-hari, dan melihat budaya orang lain di tempat lain, yang dapat digolongkan kepada wisata budaya. Keinginan lainnya berupa untuk meningkatkan persahabatan, sebagai akibat dari kunjungan pada daerah lain serta memperoleh historis dari tempat yang dikunjungi melalui penuturan setempat, dapat digolongkan kepada wisata sejarah.

Kegiatan pariwisata adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan bagi para wisatawan. Kebutuhan para wisatawan apabila terpuaskan maka konsekwensinya akan meningkatkan kunjungan wisatawan, karena itu apa yang diinginkan hendaknya diberikan melalui pembangunan wisata.

Untuk kota Pematangsiantar, sebuah kota yang strategis dalam pengembangan wisata berpotensi besar menarik para wisatawan lokal, regional, nasional dan Internasional. Potensi kota Siantar dalam bidang wisata sangat beragam, diantaranya adalah potensi Objek wisatanya berupa situs Sejarah. Situs sejarah terpampang menyebar di

⁶ I Gade Pitana (2005), *Ilmu Pariwisata*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita.

kota Pematangsiantar, namun belum tersentuh pembangunannya secara maksimal.

Pentingnya melibatkan masyarakat kota Pematangsiantar yang prularis yang berdomisili di sekitar situs sejarah adalah bagian dari pembangunan pelestarian situs sejarah. Keterlibatan masyarakat secara penuh dan positif dalam pengelolaan situs sejarah sebagai warisan budaya dengan cara memberdayakan kemampuan mereka adalah bagian dari membangun pariwisata. Masyarakat perlu diajak menghidupkan warisan budaya di sekitarnya agar warisan budaya, warisan sejarah, warisan religi, warisan perjuangan nasional tersebut dapat menghidupi mereka baik secara lahir maupun batin. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pelestarian dan pengembangan warisan budaya, wisata religi, wisata sejarah yang dimiliki kota Pematangsiantar, agar aset yang dimiliki tersebut memberikan kontribusi balik berupa material maupun non material yang berguna untuk kehidupannya.

Produk industri pariwisata meliputi keseluruhan pelayanan yang diperoleh, dirasakan atau dinikmati wisatawan⁷. Aspek yang terkait dengan sumberdaya wisata (*tourism resources*), yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik tujuan wisata. Diantara daya tarik tersebut yang berkaitan dengan fisik adalah aspek lingkungan alam (*natural amenities*). Aspek ini melingkupi benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta berupa situs sejarah, flora dan fauna, cagar budaya, cagar alam, dan sebagainya. Selain itu produk pariwisata juga dapat dibentuk dengan membuat lingkungan buatan. Lingkungan buatan di daerah tujuan

⁷ Yoeti, (1996) . Pemasaran Pariwisata Terpadu. Bandung : Penerbit Angkasa.

wisata adalah merupakan buatan manusia, seperti : atraksi wisata, berupa tarian, nyanyian, kesenian rakyat lokal, upacara adat lokal dan sebagainya.⁸

Produk pariwisata lainnya adalah berupa benda-benda Tradisional, yaitu berupa benda-benda bersejarah, produk kebudayaan dan keagamaan dengan beberapa indikatornya yaitu; adanya monumen bersejarah, adanya museum bersejarah, perpustakaan, dan kerajinan tradisional (*handicraft*), bangunan bersejarah, tata-cara hidup tradisional lokal, kuliner lokal, atraksi budaya lokal yang keseluruhannya merupakan daya tarik kepada wisatawan.

Adanya keunikan di suatu destinasi wisata merupakan daya tarik terhadap wisatawan mengunjungi daerah tersebut. Keunikan tersebut dapat menjadi focus orientasi bagi pembangunan wisata secara terpadu. Keunikan tersebut yang merupakan daya tarik dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu : (1) Daya tarik wisata alam; (2) daya tarik wisata budaya, dan (3) daya tarik wisata minat khusus.

Kelompok daya tarik wisata alam adalah berupa bentukan alam seperti pantai, gunung, air, sungai, gua dan sebagainya. Hal ini menawarkan daya tarik tersendiri bagi peminatnya dalam berwisata. Kelompok daya tarik budaya adalah berupa tempat bersejarah, tradisi, kesenian, upacara-upacara, dan pengalaman yang memotret suatu bangsa atau suku bangsa dengan masyarakat yang merefleksikan keaneka ragaman dan identitas dari masyarakat lokal yang menjadi tujuan wisatawan. Kelompok daya tarik wisata minat khusus adalah berupa pengelolaan lokasi-lokasi wisata buru, wisata

⁸ Yogi Indra Pratama, 2016. *Konsep pengembangan kawasan Pariwisata terpadu di Kecamatan Batu Kota Batu (Tesis)* Program Magister Bidang Keahlian Manajemen Pembangunan Kota Fakultas Teknik ITS Surabaya. hlm. 19

agro, usaha wisata olahraga, wisata tirta, wisata petualangan alam, wisata kesehatan, pemanfaatan pusat-pusat dan tempat budaya, industri dan kerajinan.

Pengembangan kawasan wisata adalah merupakan langkah awal dalam penataan kawasan yang memasukkan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam komponen penataan kawasan wisata. Aspek tersebut adalah meliputi : (1) Citra (*image*), yaitu pandangan secara fisik atau dengan merasakan. Hal ini berkaitan dengan jarak, elevasi dan pergerakan pandangan, pandangan yang melibatkan kepekaan perasaan tergantung pada sudut pandang, seperti karakter manusia, pendapat, pengalaman dan kesan yang ditimbulkan pada kawasan. Memiliki tema pengembangan kawasan wisata yang khas yang membedakan dengan kawasan wisata lainnya. Tema dapat berkaitan dengan kekhasan ekologi, iklim, sejarah atau sosial budaya setempat.; (2) Keteraturan, yaitu penataan kawasan yang baik dan teratur didukung desain interior dan eksterior yang menarik dengan pembagian fungsi yang jelas.; (3) Bangunan, yaitu orientasi bangunan yang sebaiknya ke arah pemandangan pegunungan. Ketinggian bangunan tidak menghalangi pandangan ke pemandangan pegunungan sehingga memberikan kesempatan bagi penduduk untuk menikmati pemandangan alam atau tidak mengacaukan garis langit.; (4) Keselamatan, yaitu bertujuan untuk melindungi penduduk dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya musibah, seperti penataan yang dapat menimbulkan kecelakaan dan konflik.; (5) Keamanan, yaitu bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penduduk dalam beraktivitas di kota seperti penataan kota yang mencegah terjadinya gangguan kejahatan/kriminal.; (6) *Pedestrian Ways* yaitu bertujuan memberikan kemudahan berjalan mencapai dan menyusuri

kawasan wisata sehingga tidak melelahkan, menghubungkan ruang-ruang publik, dan memberikan rasa senang untuk berjalan.⁹

Upaya untuk membangun wisata sejarah, di kota Pematangsiantar memerlukan langkah awal inventarisasi situs sejarah. Hal ini untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah, masyarakat kota ini akan keunggukan situs sejarah sebagai pembangun daerah wisata. Inventarisasi situs sejarah membutuhkan sejumlah biaya sehingga situs sejarah dapat terdata secara konkrit. Pendataan dilakukan dengan mengunjungi seluruh kecamatan yang ada di kota ini, yang tentunya dapat mencapai kelurahan sebagai tempat situs sejarah berada.

Dari hasil pendataan tentunya dapat diketahui situs sejarah yang kurang terpelihara, terpelihara, dan masih sangat baik pemeliharaannya. Dari pendataan ini akan menghasilkan langkah berikutnya yaitu pengembangan wisata.

Situs sejarah yang terdapat di kota Pematangsiantar, selain menjadi daya tarik wisata dapat juga menjadi bahan pendidikan bagi masyarakat setempat penduduk kota Pematangsiantar. Kondisi penduduk kota ini adalah penduduk yang heterogen baik secara etnis, agama, budaya, bahasa, alam kepercayaan, dan pengetahuan akan kearifan lokal setempat yaitu budaya Simalungun.

Pematangsiantar pada awalnya dihuni oleh orang Simalungun yang diperintah oleh Kerajaan Siantar dengan dinasti marga Damanik¹⁰, telah mengalami proses sejarah yang panjang dimulai dari sejak zaman sebelum penjajahan,

⁹ Yogi Indra Pratama, 2016 *Ibid.* hlm. 22-23

¹⁰ Tentang orang Simalungun dan kerajaan Siantar baca : Augustono, Budi dkk, 2012. *Sejarah Etnis Simalungun*, Medan: USU Press. hlm.32.

masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada masa terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah melalui perjalanan sejarah mulai dari zaman revolusi, jaman orde lama, orde baru hingga orde reformasi sebagaimana saat ini.

Proses sejarah yang demikian panjang telah membentuk “identitas diri” yang dapat dilihat dari peninggalan situs sejarahnya yang sampai saat ini menyebar di wilayah kota Pematangsiantar. Banyak situs sejarah yang merupakan warisan kerajaan Siantar terabaikan begitu saja tanpa ada perawatan apalagi pelestarian. Sesungguhnya melalui situs sejarah akan terekonstruksi ragam aktivitas kehidupan masyarakat dimasa lalu, mulai zaman pra kolonial, masa kolonialisme Belanda, bahkan sampai kemerdekaan. Situs sejarah merupakan jembatan memahami dan rekonstruksi pemikiran tersendiri bagi para generasi muda untuk melihat perkembangan hingga saat ini.

Di kota Pematangsiantar, bahwa sejarah kebudayaan orang Simalungun adalah sebuah entitas budaya yang mendominasi wilayah administratif kota Siantar dan Kabupaten Simalungun. Turun temurun tradisi Simalungun berlangsung dengan dinamis yang juga memproduksi benda-benda yang di pakai dalam kehidupan sehari hari. Kebendaan ini memiliki penciri dan bentuk dan fungsi serta makna yang dapat mewakili sebuah entitas budaya diantara budaya lainnya.

Beberapa peninggalan budaya kebendaan Simalungun yang masih bisa disaksikan pada kerajaan Siantar yang masih bisa kita saksikan adalah sederetan makam raja dan keluarga kerajaan Siantar dari dinasti marga Damanik. Selain makam, ada juga yang istimewa berupa peninggalan istana kerajaan

Siantar yang berada di Pamatang¹¹. Peninggalan Kerajaan Siantar tersebut sebagian dalam kondisi yang masih dapat diidentifikasi dan secara visual menunjukkan kondisi yang baik. Namun lebih banyak dari peninggalan tersebut bisa dikategorikan dalam kondisi aus, rusak, lapuk dan kehilangan bentuk aslinya.

Menindaklanjuti peninggalan *Kerajaan Siantar* sebagai situs sejarah, dan ditingkatkan menjadi Cagar Budaya sebagaimana diamanatkan Undang-undang no. 11 tahun 2010 adalah meningkatkan status situs sejarah menjadi cagar budaya melalui penetapan Cagar Budaya.

Pembangunan pariwisata di kota Pematangsiantar dapat dilakukan dari berbagai aspek, diantaranya adalah dari pengembangan situs sejarah. Pengembangan pariwisata dapat melibatkan masyarakat setempat sehingga dapat menghargai, dan merawat warisan budaya setempat.

B. Beberapa Studi Terdahulu Tentang Pembangunan Pariwisata

Studi tentang Pembangunan Pariwisata, Melalui Manajemen Situs Sejarah dan Kearifan Lokal di kota Pematangsiantar, sepanjang pengetahuan sampai saat ini belum ada dilakukan. Namun demikian beberapa studi yang menyinggung seperti judul buku ini sepanjang pencarian sumber dapat diajukan beberapa studi yang berkaitan. Dari studi yang berkaitan tersebut dapat memberikan gambaran dari berbagai perspektif oleh penulisnya, yang dapat dijadikan sebagai model, juga sebagai sumber awal dalam menulis buku ini. Diantara penulis tersebut adalah Ahmad

¹¹ Istilah Pamatang bagi orang Simalungun, diartikan sebagai ibukota. Misalnya ibukota kerajaan Siantar "Pamatang Siantar". Ibu kota Kerajaan Raya disebut "Pamatang Raya". Dan seterusnya.

Sunjayadi, Sukmadi, IBG Pujaastawa, Sudjatmoko, Emil Salim, Citra Persada, dan I Made Dwyka Aryawan dkk.

Ahmad Sunjayadi menulis buku yang diberi judul *Pariwisata di Hindia-Belanda (1891-1942)*. Dalam buku tersebut secara ringkas dikemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan dimana sebuah negara mempertontonkan diri untuk orang luar dan juga untuk warganya sendiri. Indonesia berhasil menarik jutaan wisatawan asing disamping jutaan orang Indonesia yang mengunjungi negerinya sendiri dengan tujuan bersenang-senang sambil belajar tentang serba serbi aspek kebudayaan Indonesia. Fenomena ini mempunyai sejarah. Selanjutnya Sunjayadi membeberkan lahirnya pariwisata Indonesia di masa colonial, dari tahun 1891 sampai 1942, dan menggambarkan peran berbagai pihak dalam perkembangan itu, termasuk praktisi perhotelan, pegawai pemerintah, jurnalis sampai pendeta, termasuk juga orang Indonesia sendiri. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam kegiatan pariwisata, objek dan atraksi wisata, infrastruktur, sarana transportasi, sarana akomodasi serta jaminan keamanan merupakan hal penting.

Di Hindia Belanda, infrastruktur (jalan, jalur kereta), sarana transportasi dan sarana akomodasi sudah tersedia sejak abad ke-19. Sebelum kegiatan pariwisata di Hindia Belanda mendapatkan bentuk sebagai kegiatan yang diatur. Kemudahan akses dari Eropa menuju Hindia Belanda melalui jalur laut, setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 dan mulai beroperasinya KPM perusahaan pelayaran milik Belanda, mendukung kegiatan pariwisata di Hindia Belanda. Selanjutnya dijelaskan bahwa di Hindia Belanda, objek dan atraksi wisata yang menjadi daya tarik wisata untuk para wisatawan asing sebenarnya sudah tersedia. Kekayaan alam dan keragaman budaya yang ditawarkan oleh pemerintah

Hindia-Belanda berada di berbagai wilayah Hindia. Proses pembentukan objek wisata yang kelak menjadi daya tarik wisata di Hindia Belanda, tidak lepas dari unsur perjalanan para pelancong ke wilayah tersebut.¹²

Dari studi yang dilakukan Sunjayadi, Ahmad tersebut dapat diambil sebagai model bahwa unsur budaya, berupa keanekaragaman budaya, atraksi lokal, merupakan daya tarik yang luar biasa untuk menggerakkan pariwisata.

Sukmadi, menulis buku yang berjudul Pemasaran Pariwisata; Edisi Disertasi, yang diterbitkan Ar Raafi Bandung tahun 2013. Sebagai kesimpulan kajian ini dituliskan bahwa informasi tentang objek wisata yang disampaikan oleh pengelola objek wisata pada wisatawan melalui iklan cukup jelas dan akurat sehingga membentuk persepsi positif dari wisatawan. Pemilihan media iklan yang cukup tepat, intensitas penyampaian iklan cukup konsisten, dan waktu penayangan iklan cukup tepat serta dalam memberikan informasi cukup konsisten dapat membentuk persepsi positif dari wisatawan. Selain itu pengelolaan objek wisata dapat menciptakan rumor, kesan objek wisata dan sejarah tentang objek wisata yang baik pada wisatawan.

Citra objek wisata, pengelola objek wisata dapat meningkatkan kepercayaan, ide wisatawan serta menciptakan kesan yang baik tentang objek wisata pada wisatawan sehingga dapat meningkatkan citra objek wisata itu sendiri. Adanya penyebaran mulut ke mulut, maka pengelola objek wisata dapat menciptakan komunikasi positif melalui cerita dari mulut ke mulut wisatawan. Keadaan ini sering digunakan oleh pengelola objek wisata dalam memperkenalkan objek wisata pada pengunjung yang dapat

¹² Secara lengkap dapat dibaca Sunjayadi, Ahmad (2019) *Pariwisata di Hindia-Belanda (1891-1942)*. Penerbit KPG Gramedia : Jakarta.

membentuk citra positif tentang objek wisatanya. Selain itu maka isi pesan yang disampaikan oleh pengelola wisata mengungkapkan keistimewaan objek wisata sehingga dapat menciptakan komunikasi positif dari mulut ke mulut para wisatawan. Penyampaian hubungan masyarakat yang proaktif memiliki pengaruh terhadap objek wisata di Jawa Barat sebagaimana ditulis Sukamdi.¹³

Pujaastawa, I.B.G., (2004), dalam penelitiannya yang berjudul *Tri Hitakarana: Kearifan Lokal Dengan nilai-Nilai Universal*, dengan studi kasus di pulau Bali. Kajian ini mencoba menjelaskan aktualisasi nilai-nilai Tri Hita Karana dalam masyarakat Bali, dalam institusi desa adat dan subak yang merupakan dua institusi terpenting dalam kehidupan masyarakat Bali.

Selanjutnya dijelaskan bahwa adanya krisis lingkungan global yang semakin mencuat, keberadaan system pengetahuan dan kepercayaan tradisional mulai dipandang sebagai bentuk-bentuk kearifan ekologi yang berfungsi efektif sebagai mekanisme control bagi pengelolaan lingkungan. Masyarakat Bali memandang bahwa lingkungan sebagai suatu gejala yang mengandung sifat-sifat natural dan supernatural. Sehubungan dengan itu dikenal adanya lingkungan yang bersifat *sekala* (nyata) dan *niskala* (tidak nyata). Manusia harus memperhatikan secara berimbang unsur-unsur yang bersifat *sekala* dan *niskala*. Agama Hindu Bali mengajarkan bahwa kunci keberhasilan manusia dalam memanfaatkan lingkungannya, yakni dalam rangka mencapai tujuan, terletak pada sejauh mana mereka mampu membuat keseimbangan atau memperhitungkan aspek *sekala* dan *niskala*.

¹³ Untuk jelasnya baca, Sukamdi (2013), *Pemasaran Pariwisata; Edisi Disertasi*, Penerbit Ar Raafi : Bandung.

Kearifan lokal orang Bali tercermin dalam konsep zonasi yang memandang gunung sebagai zone *luan* (hulu atau kepala) yang bernilai suci atau sacral. Sehubungan dengan itu kawasan pegunungan yang membentangi di Bali Tengah merupakan kawasan suci dan merupakan *ulu* atau kepala. Disepanjang kawasan ini terdapat serangkaian tempat-tempat suci berupa *pura-pura* terpenting bagi orang Bali, seperti Pura Pulaki, Pura Batukaru, Pura Petali, Ulun Danu, Pura Pucak Mangu, dan lainnya.¹⁴

Sudjatmoko, (1987) dalam tulisannya yang berjudul *Nilai-Nilai tradisional Dalam Proses Pembangunan*, menjelaskan bahwa jika suatu pemerintah tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap pembangunan ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan tidak mungkin terjadi. Komitmen demikian mengandung arti kemauan untuk menghindari perang dan menghindari pengeluaran yang hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan akan hidup mewah dan megah. Komitmen seperti ini juga berarti keberanian politis untuk melakukan perubahan administrative dan membina disiplin nasional yang diperlukan demi keefektifan kebijaksanaan yang memadai. Juga diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah yang tidak populer yang mungkin sangat penting bagi keberhasilan proses pembangunan itu. Gerak maju seluruh sistem sosial jelas tergantung pada konsensus mengenai tujuan dan sarana-sarana, yaitu suatu visi bersama mengenai masa depan yang mampu meningkatkan harapan-harapan baru. Akan tetapi jika realitas tidak dilihat dengan kaca mata baru, dan harapan

¹⁴ Untuk jelasnya baca Pujaastawa, I.B.G., (2004), *Tri Hitakarana: Kearifan Lokal Dengan nilai-Nilai Universal*, dalam Wawasan Budaya Untuk Pembangunan; Menoleh Kearifan Lokal, Penyunting Tim Puser, Penerbit Pilar Politika Yogyakarta. Hlm.403-421

tidak diterjemahkan menjadi kesempatan baru yang menguntungkan pada masing-masing tingkat, maka visi akan mempunyai nilai penggerak yang kecil sekali¹⁵.

Berdasarkan kajian dari Sudjatmoko ini, dalam relevansi penulisan buku ini adalah bahwa bagaimana pun pemerintah harus terlibat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan pariwisata dengan manajemennya situs sejarah yang penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal dapat dikaji dengan melibatkan pemerintah. Semakin tinggi komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan maka semakin sejahtera rakyatnya.

Emil Salim, (2010) dalam tulisannya yang berjudul *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, berkesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan harus merombak habis paradigma pembangunan konvensional yang saat ini berlaku. Kepentingan pembangunan dalam jangka pendek harus lebih diseimbangkan dengan kepentingan jangka panjang, kepentingan sosial dan lingkungan harus ditempatkan pada posisi yang setara dengan kepentingan ekonomi. Kepentingan sosial masyarakat harus lebih diselaraskan dengan kepentingan individu. Kegagalan pasar harus dikoreksi, dan biaya sosial dan lingkungan harus diinternalisasi dalam bentuk biaya ekonomi.

Kegagalan pemerintah harus diatasi lewat kemitraan segitiga yang setara antara pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil. Kelompok sipil dan masyarakat pada umumnya harus memegang peranan penting dalam proses

¹⁵ Untuk lebih mendalami baca Sudjatmoko, (1987) *Nilai-Nilai tradisional Dalam Proses Pembangunan*, dalam Colletta, Nat J, & Kayam Umar, (1987), *Kebudayaan dan Pembangunan, Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, hlm.35-48.

pengambilan keputusan pada pembangunan berkelanjutan. Pergeseran paradigma ini membutuhkan perubahan nilai dan orientasi. Diperlukan pengembangan terus menerus nilai-nilai pembangunan berkelanjutan yang sama sekali baru dan berbeda dengan yang ada pada pembangunan yang konvensional. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dapat mendorong terciptanya nilai-nilai baru tersebut. Sumber daya manusia tidak hanya harus dilengkapi dengan ketrampilan untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga ketrampilan untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan. Untuk itu dibutuhkan integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat secara *holistic* mengelola kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan harus memanfaatkan insentif berupa manfaat ekonomi, penghargaan bergengsi, dan pengakuan. Diperlukan keteladanan, tata perilaku yang sesuai, berbagai peraturan, dan berbagai standar yang diakui secara internasional, seperti ISO 9000 untuk standar ekonomi, ISO 14000 untuk standar lingkungan, dan ISO 26000 untuk standar sosial. Kombinasi ketiga ISO tersebut diperlukan agar didapat standar komprehensif yang mencakup nilai-nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.¹⁶

Dari penjelasan di atas maka diperoleh gambaran dalam pembangunan berkelanjutan dibutuhkan keteladanan keteladanan, tata perilaku yang sesuai, berbagai peraturan, dan berbagai standar yang diakui secara internasional.

¹⁶ Selengkapnya baca Emil Salim, (2010) dalam tulisannya yang berjudul *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Azis, Iwan J, dkk. (2010), *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Penerbit KPG: Jakarta. hlm.21-30.

Tentunya dalam hal Pembangunan Pariwisata melalui manajemen situs sejarah dan kearifan lokal di kota Pematangsiantar dapat mengambil model yang dikemukakan Emil Salim tersebut.

Citra Persada (2018) menulis bukunya yang berjudul *Perencanaan Pariwisata Dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Teori dan Praktek*. Dalam buku ini dapat diperoleh informasi bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang pembangunan nasional yang berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti devisa negara, menumbuhkan banyak peluang ekonomi skala kecil dan menengah, pencipta lapangan kerja, sebagai katalis untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi lain seperti perikanan, pertanian kehutanan dan *manufacturing*, serta dapat meningkatkan upaya menjaga dan memperbaiki lingkungan. Tantangan pariwisata ke depan adalah bagaimana agar sektor ini dapat mensejahterakan masyarakat lokal.

Pariwisata dapat juga menimbulkan bermacam-macam dampak seperti kehilangan/keuntungan ekonomi, degradasi lingkungan, kehilangan identitas dan integritas budaya, kurangnya pemahaman budaya dan problem lainnya. Oleh karena destinasi pariwisata berada pada ruang tertentu, maka perencanaan ruang pariwisata sangat penting dilakukan agar dapat mengoptimalkan manfaat dari pariwisata dan mencegah masalah yang dapat muncul. Ruang lingkup perencanaan ruang pariwisata mulai dari skala makro (nasional) sampai skala mikro yaitu kawasan. Untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata, maka perlu dilakukan studi secara lebih detail pada kawasan tersebut sekaligus pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya yang diperlukan untuk pengembangan

pariwisata yang berkelanjutan sesuai dengan aspek-aspek lingkungan

Hubungan antara pariwisata dan pembangunan berkelanjutan makin mengemuka dalam Agenda 21 (*World Travel and Tourism Council, World Tourism Organization and Earth Board, 1997*). Agenda 21 mengacu pada hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992, yang juga dikenal sebagai '*Rio Earth Summit*'. Agenda 21 mengakui pariwisata sebagai bentuk model pembangunan ekonomi yang harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat tuan rumah, memberikan kualitas pengalaman yang tinggi bagi pengunjung, dan menjaga kualitas lingkungan tempat komunitas tuan rumah dan pengunjung bergantung. Agenda 21 mengidentifikasi beberapa ukuran dan tujuan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan industri pariwisata di seluruh dunia. Ini termasuk penguatan kerjasama kelembagaan, pengelolaan air limbah yang lebih baik, pelatihan dan pendidikan yang menyukai minoritas, dan pertukaran informasi, ketrampilan dan teknologi yang berkaitan dengan perjalanan dan pariwisata.

Perencanaan dan pembangunan pariwisata haruslah menjadi bagian yang terintegrasi dalam perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dimulai dari perencanaan pariwisata yang berkelanjutan, dimana mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pariwisata berkelanjutan adalah proses yang berupa siklus dengan umpan balik yang terus menerus¹⁷.

¹⁷ Selengkapnya baca Citra Persada (2018) *Perencanaan Pariwisata Dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Teori dan Praktek*. Penerbit : Bandarlampung.

I Made Dwyka Aryawan dkk, menulis penelitiannya yang berjudul Potensi Objek Wisata Sejarah di kota Singaraja, yang diterbitkan oleh Jurnal Bosaparis: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Volume 9, Nomor 2, Juli 2018. Hasil penelitian ini adalah bahwa objek sejarah di kota Singaraja memiliki potensi untuk menjadi sebuah objek wisata. Dilihat dari potensinya, adapun potensi yang dimiliki objek Museum Buleleng yaitu a) adanya objek yang dapat dilihat (*something to see*) yaitu benda-benda bersejarahnya, b) adanya kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan (*something to do*) yaitu benda-benda bersejarah yang dapat dijadikan sebagai objek berfoto ataupun *selfie*, c) adanya hal yang menarik dari Museum Buleleng (*attraction*) yaitu cerita sejarah dari benda-benda bersejarah yang memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan yang mengedukasi siswa-siswi di Buleleng, serta d) adanya fasilitas pendukung (*amenities*) yang bersifat umum yaitu tempat parkir, toilet, tempat sampah, *balai bengong*, dan pelayanan yang ramah dari para petugasnya. Beberapa potensi pada objek Gedong Kirtya yaitu a) adanya objek yang dapat dilihat (*something to see*) yaitu lontar-lontar bersejarahnya, b) adanya kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan (*something to do*) yaitu wisatawan diajak belajar bagaimana cara membaca maupun menulis aksara diatas media daun lontar menggunakan alat khusus bernama *prupak* dan digosok kemiri yang dibakar sebagai hasil akhir memperjelas hasil toresan pada daun lontar, c) adanya hal yang menarik dari Gedong Kirtya (*attraction*) yaitu lontar-lontar yang ada di Gedong Kirtya dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran bagi wisatawan baik itu siswa siswi maupun mahasiswa dari seluruh Indonesia, serta d) adanya fasilitas pendukung (*amenities*) yang bersifat umum dan khusus yaitu tempat parkir, toilet, tempat sampah, *balai*

bengong, dan pelayanan yang ramah dari para petugasnya, dan ruangan khusus untuk membaca dan praktek menulis aksara diatas media daun lontar.¹⁸

Beberapa potensi yang dimiliki pada objek Pelabuhan Buleleng yaitu a) adanya objek yang dapat dilihat (*something to see*) yaitu pemandangan pantainya yang indah, b) adanya kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan (*something to do*) yaitu wahana yang dapat dinikmati wisatawan di malam hari, c) adanya hal yang menarik dari Pelabuhan Buleleng (*attraction*) yaitu cerita sejarahnya, bangunan Belanda yang satu-satunya berdiri kokoh di Pelabuhan Buleleng, waktu kunjungan 24 jam yang membedakan dari objek bersejarah lainnya, serta sebagai tempat kegiatan upacara umat Hindu seperti *Banyupinaruh*, *Nganyud*, dan *Mekiyis*, d) adanya fasilitas pendukung (*amenities*) yang bersifat umum yaitu tempat parkir luas, toilet, taman-taman yang dihiasi lampu dan kursi sebagai tempat untuk menikmati pemandangan pantai, kemudian terdapat *wantilan* dan *balai bengong* yang dapat juga difungsikan sebagai tempat beristirahat setelah lelah mengelilingi Pelabuhan Buleleng. Serta gedung yang dahulunya merupakan gudang logistik di Pelabuhan Buleleng, kini difungsikan sebagai gedung aula bernama gedung *IMACO* (*International Mask Corporate Organization*) yang dapat disewa oleh masyarakat untuk mengadakan acara tertentu seperti resepsi pernikahan dan lainnya melalui ijin dari Dinas Pariwisata Buleleng sebagai pengelola¹⁹.

¹⁸ I Made Dwyka Aryawan dkk, (2018) "Potensi Objek Wisata Sejarah di kota Singaraja, dalam Jurnal Bosaparis: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Volume 9, Nomor 2, Juli 2018.

¹⁹ I Made Dwyka Aryawan dkk, (2018) *Ibid*.

C. Konsep, Pendekatan dan Sumber

Konsep penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Konsep ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.²⁰

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²¹ Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya,

²⁰ Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta. hlm. 7.

²¹ Sugiyono. Ibid. hlm, 8.

tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal dan teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi social yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Mengingat luasnya objek yang menjadi ajang penelitian, maka inventarisasi dan verifikasi situs-situs sejarah melalui penelitian lapangan ini juga menggunakan pendekatan geografis. Oleh karena itu, seluruh jenis bangunan klasik dan unik maupun fasilitas pendukung serta benda-benda pelengkap aktivitas bekas penghuninya yang layak dijadikan objek penelitian, didekati melalui pendekatan analisis keruangan (*spatial analysis*), analisis ekologi (*ecological analysis*) dan analisis kompleks wilayah (*regional complex analysis*)²².

Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut, antara elemen-elemen fisik dan non fisik sama sekali tidak dibeda-bedakan. Sedangkan pendekatan lain yang dipergunakan adalah pendekatan sosiologis dan arkeologis dengan menentukan klasifikasi situs sejarah berdasarkan historis sehingga dapat diketahui motivasi dan fungsi sosial pendiriannya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang latar belakang situs tersebut awalnya dibangun, serta apa yang hendak dilakukan dalam rangka upaya pelestarian situs sejarah tersebut kedepan. Selanjutnya situs sejarah yang masih utuh

²². Naniek Harkantingsih, dkk, 1999, Metode Penelitian Arkeologi, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta, hlm 23.

dipertimbangkan untuk dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk ditetapkan menjadi cagar budaya.

Benda cagar budaya, akan mendapat perlindungan dari pemerintah, dan kewajiban pemerintah untuk memeliharanya. Apalagi Undang-Undang (UU) RI nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah memberikan dasar hukum yang kuat tentang perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jatidiri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional²³.

Dalam undang-undangan tersebut menjelaskan bahwa situs sejarah adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa benda cagar budaya adalah: (a) benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; (b) benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

²³ Lihat penjelasan UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang merupakan acuan dalam menetapkan benda cagar budaya di Indonesia.

Bahkan lebih tegas lagi dikatakab bahwa, benda cagar budaya yang karena: (a) nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan bangsa Indonesia; (b) sifatnya memberikan corak khas dan unik; (c) jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka; berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan menjadi milik Negara.

Metode sejarah kritis diperlukan untuk menemukan bukti-bukti (*evidensi*) di masa lampau; untuk mengorganisir dan menafsirkan *evidensi* dan untuk menunjukkan sedekat mungkin dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi dan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Pengalaman dalam penelitian juga akan sangat membantu mengembangkan kualitas pemikiran, keluasan, pengorganisasian dan penilaian, dimana sejarah melatih kematangan pribadi seseorang.

Data buku ini diperoleh dengan melakukan Wawancara, dokumentasi, observasi, dan pengamatan lapangan. Analisa data secara garis besar di lakukan dengan langkah langkah berikut :

- a. Menelaah hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta catatan reflektif, dan memisahkan data yang penting dan tidak relevan untuk keperluan penelitian dari yang tidak penting.
- b. Mendeskripsikan data yang telah di klasifikasikan untuk menela'aha lebih lanjut, dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.
- c. Menelaah deskripsi data dan membandingkan dengan teori yang menjadi acuan penelitian, termasuk mengkritisi dan merevisi teori.
- d. Membuat analisis akhir dan meneruskannya dalam laporan untuk dinarasikan.

Sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji dalam buku ini, berasal dari data utama (*primer*) dan data pendukung (*sekunder*). Data *primer* adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data *primer* disini adalah: orang yang mengetahui dimana letak situs sejarah di kota Pematangsiantar. Data *sekunder* adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen yang merupakan daftar situs yang dijumpai pada arsip dinas pariwisata kota Pematangsiantar. Selain itu juga berupa buku-buku referensi yang menjelaskan situs sejarah sebagai daya tarik wisata.

BAB II

POTRET PEMATANGSIANTAR DARI WILAYAH KERAJAAN TRADISIONAL MENJADI KOTA MODERN

A. Masa Pra Kemerdekaan

1. Pemerintahan Kerajaan Siantar

Kota Pematangsiantar yang sekarang merupakan salah satu dari 33 daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara awalnya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Siantar. Selama ratusan tahun, salah satu kerajaan di Simalungun yang diperintah klan Damanik ini eksis berdaulat menaungi wilayah kekuasaannya yang diperkirakan sampai ke daerah Batubara, Asahan dan Tanjung Balai sekarang. Namun pasca masuknya penetrasi Belanda, kedaulatan Kerajaan Siantar terancam akibat ekspansi politik dan ekonomi lewat bisnis perkebunan kolonial. Tak hanya Kerajaan Siantar, tetapi seluruh kerajaan-kerajaan di Simalungun dibuat takluk dan tunduk pada kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Menurut TBA.Purba Tambak, sampai tahun 1833 kerajaan-kerajaan di Simalungun masih eksis berdaulat menjalankan pemerintahannya menurut adat tradisi leluhur Simalungun²⁴.

Leluhur asli sebagai tuan rumah yang mendiami kota Pematangsiantar adalah etnik Simalungun yang dalam cerita rakyat setempat dipercaya asal-usulnya datang dari *banua*

²⁴.TBA Purba Tambak. 1982. *Sejarah Simalungun*. Pematangsiantar: Percetakan HKBP.

holing (tanah India)²⁵. Foklor asal muasal leluhur etnik Simalungun ini terdapat dalam beberapa manuskrip atau naskah kuno (*pustaha*) yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah *Pustaha Akar Mula Jadi*. *Pustaha* ini mengisahkan adanya tiga dewa yang bermukim di *nagori atas*, yakni *Sahine-hine*, *Tuan Tobal Dunia* dan *Tuan Naga Padokah Ni Aji*. Ketiganya sepakat menciptakan manusia sebagai penghuni *nagori tengah* (bumi) yang kelak menurunkan *Sang Ni Alam Naguratta*, diyakini sebagai pendiri perkampungan Nagur Raja (Nagaraja).

Sang Ni Alam Naguratta kemudian membangun *Harajaon Nagur* (Kerajaan Nagur), yang kelak menjadi asal muasal leluhur etnik Simalungun. Keturunan penguasa Kerajaan Nagur kemudian menyebar ke berbagai daerah dan mendirikan kerajaan lain sebagaimana yang pernah ada di Simalungun, termasuk Kerajaan Siantar²⁶. Oleh karena itulah Kerajaan Siantar hingga sekarang diyakini merupakan penerus Kerajaan Nagur, yang rajanya secara turun-temurun dari klan Damanik.

Pasca keruntuhannya, Kerajaan Nagur membentuk kerajaan-kerajaan baru yang terkonfederasi ke dalam kerajaan *marropat* (berempat), yakni Siantar, Panei, Tanoh Jawa dan Dolog Silou. Salah seorang keturunan kerajaan *marropat* yang terkenal adalah Sang Nauluh Damanik yang merupakan Raja Siantar generasi ke-14, diangkat resmi menjadi raja sekitar tahun 1888. Menurut Jahutar Damanik, leluhur Sang Nauluh adalah Raja Namartuah Damanik (Bariba) yang memiliki banyak gelar, yakni: *Puanglima*

²⁵ Budi Agustono., dkk. 2012. *Sejarah Etnik Simalungun*. Medan: USU Press.

²⁶ Jan Jahaman Damanik. *Dari Ilah Menuju Allah: Sejarah Kekristenan di Simalungun dalam Aras Perjumpaan Injil dengan Kebudayaan*. Yogyakarta: Andi.

Permata Tunggal; *Datu Parmata Mamunjung*; *Datu Parmata Manunggal*; dan *Datu Partigatiga Sihapunjung* sebagai pendiri pertama Kerajaan Siantar. Raja Namartuah sebagai *datu* yang dijuluki memiliki unsur tunggal dikarenakan dirinya merupakan anak tunggal dari Raja Nagur yang terakhir serta memiliki keanehan fisik, yakni memiliki satu mata, yang disebut *permata tunggal* dan letaknya di kening²⁷.

Eksistensi Kerajaan Nagur diperkirakan sudah berdiri sekitar tahun 500-an dan sudah pula mengadakan hubungan dagang secara barter (*kokang*) dengan saudagar-saudagar asal Tiongkok. Kerajaan Nagur juga telah mengeksplor karet balata (*ficuselasticus*) yang dibutuhkan untuk industri perkapalan sebagai bahan perekat tiang-tiang kapal kayu²⁸. Namun sejak abad Ke-13 kebesaran dan pengaruh kekuasaan Kerajaan Nagur semakin menyusut, sehingga banyak daerah-daerah takluknya memilih melepaskan diri. Puncaknya sekitar tahun 1295, Kerajaan Nagur mendapat serangan dahsyat Raja Singosari (Jawa), yang menyebabkan kedaulatannya semakin memudar. Hal ini turut melatarbelakangi berdirinya kerajaan-kerajaan baru sesudah berakhirnya kekuasaan Nagur²⁹.

Sampai tahun 1880-an daerah Simalungun masih terbagi empat kerajaan yang sifatnya konfederasi raja *maroppat* yang terdiri dari Kerajaan Siantar (Damanik), Panei (Purba Dasuha), Dolog Silou (Purba Tambak) dan Tanoh Jawa (Sinaga) dengan *balei harungguan* (tempat persidangan) di

²⁷ Jahutar Damanik. 1981. *Raja Sang Nauuluh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia*. Medan: Bina Budaya Simalungun.

²⁸ Maknur Sinaga, (tim). 1999. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Daerah Tk II Simalungun*. Pematangsiantar: Pemda Simalungun.

²⁹ D.Kenan Purba., JD.Poerba. 1995. *Sejarah Simalungun*. Jakarta: Bina Budaya Simalungun.

Dologsaribu.³⁰ Sesudah pasifikasi Belanda, *Partuanan* Raya, Purba dan Silimakuta yang sebelumnya daerah vazal Kerajaan Dologsilou dinaikkan statusnya menjadi kerajaan mandiri. Timbulnya konfederasi raja *maroppat* ini merupakan ekspresi dari pahit getirnya kerajaan-kerajaan Simalungun di bawah bayang-bayang invasi asing sejak abad Ke-13.

Sebelumnya pada tahun 1367³¹ diadakanlah sebuah musyawarah besar (*harrungguan bolon*) raja-raja di Simalungun yang juga dihadiri *partuanon-partuanon* serta *partuha-partuha maujana* Simalungun. Termasuk juga bekas prajurit Kerajaan Singosari dan Majapahit yang meleburkan diri ke dalam tatanan asli budaya masyarakat Simalungun. Lahirlah raja *maroppat* (raja nan empat) fase pertama di Simalungun dengan anggotanya: Kerajaan Nagur, Kerajaan Silou, Kerajaan Batangiou dan Kerajaan Harou. Pada kesempatan itu masing-masing raja bersumpah (*marbija*) akan selalu senasib sepenanggungan atau *sisada parmaluan sisada lungun* yang disingkat "Simalungun"³².

Raja *maroppat* fase awal terus berkembang, namun pada tahun 1633 Kerajaan Harou tidak lagi masuk menjadi anggotanya. Penerusnya kemudian muncul raja *maroppat* fase kedua yang terdiri dari: Kerajaan Dolog Silou (Purba Tambak), Kerajaan Siantar (Damanik), Kerajaan Tanoh Jawa (Sinaga) dan Kerajaan Panei (Purba Dasuha). Selebihnya masih ada *partuanon* yang berdiri sendiri yakni *Partuanon* Raya, Purba dan Silimakuta. Namun untuk melakukan hubungan dengan kerajaan lain di luar wilayah Simalungun, mereka masih tetap menggunakan nama *Batak Timur Raya*. Tentang halnya Kerajaan Harou, telah beralih menjadi bagian

³⁰. *Ibid*

³¹. Maknur Sinaga.*op.cit.*

³². *Ibid.*

dari Kesultanan Deli sejak tahun 1619, sehingga tidak turut lagi menjadi bagian dari persekutuan *Batak Timur Raya*.³³

Sejak era kerajaan *marropat* fase kedua, hubungan kekerabatan di kalangan raja-raja Simalungun semakin erat berkat adanya ikatan perkawinan yang disepakati baku secara adat, yakni keberadaan permaisuri (*puang bolon*). Secara adat, yang berhak menjadi putra mahkota adalah anak dari *puang bolon* sebagai prasyarat utama dalam menentukan seseorang menjadi pengganti raja. *Puang bolon* Raja Siantar (Damanik) harus berasal dari puteri Tuan Silampuyang atau Sipoldas (Saragih Sidauruk). *Puang bolon* Raja Tanoh Jawa (Sinaga) haruslah puteri Raja Siantar (Damanik). *Puang bolon* Raja Raya (Saragih Garingging), harus berasal dari puteri Raja Panei; Badjalinggei atau Guru Raya (Purba Dasuha). Raja Purba (Purba Pakpak) haruslah mengawini puteri Raja Siantar (Damanik) sebagai *puang bolon*. Raja Dolog Silou (Purba Tambak) haruslah mengawini puteri Raja Raya (Saragih Garingging) sebagai *puang bolonnya*. Raja Panei (Purba Dasuha) haruslah puteri Raja Siantar (Damanik). Kesepakatan model perkawinan antar kerajaan ini dilakukan guna memperkokoh hubungan kekerabatan sesama raja-raja di Simalungun.³⁴ Meskipun poligami merupakan hal yang umum di kalangan raja-raja dan *partuanon*. Tetapi umumnya, istri-istri mereka tetap berasal dari puteri raja atau kaum bangsawan dari kerajaan atau *partuanon* lain. Tujuannya yang lain adalah dalam rangka memperat hubungan politik maupun hubungan persaudaraan. Meskipun raja memiliki banyak istri, sudah ketentuan baku, bahwa hanya putera

³³. *Ibid.*

³⁴. Juandaha Raya. P., Martin Lukito Sinaga. 2003. "Tole! Den Timorlanden das Evangelium!" *Sejarah Seratus Tahun Pekabaran Injil di Simalungun 2 September 1903-2003*. Pematangsiantar: Kolportase GKPS.

yang dilahirkan *puang bolon*-lah yang menurut adat dapat diangkat menjadi raja pengganti ayahnya.³⁵

Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, penduduk Kerajaan Siantar masih menganut kepercayaan tradisional yang disebut *parbegu* atau *sipajuh begu-begu*. Mereka percaya bahwa setiap makhluk, tumbuh-tumbuhan atau alat tertentu mempunyai kekuatan gaib³⁶. Menurut *Pustaka Parpandanan Na Bolag* para leluhur orang Simalungun percaya bahwa di atas segala sesuatunya di dunia ini, hanya *Naibata*-lah yang maha kuasa atas seluruh makhluk.³⁷ *Naibata* akan memberikan ganjaran yang adil dan setimpal bagi manusia sesuai dengan perilakunya. Apabila ada orang yang berbuat tidak adil, maka *Naibata* akan menimpakan kepadanya hukuman, bukan hanya kepada oknum yang melakukan ketidakadilan saja tetapi juga kepada keturunannya³⁸.

Selain itu masyarakat Kerajaan Siantar senantiasa berpedoman pada falsafah hidup *Habonaron do bona, hajungkaton do sapata*. Orang yang tidak konsisten menjunjung tinggi falsafah ini diyakini akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Falsafah ini juga berdampak pada pola pikir orang Simalungun yang sangat berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Falsafah tentang kebenaran ini terdiri dari: berpandangan yang benar; berniat yang benar; berbicara yang benar; berniat yang benar; perpenghidupan yang benar;

³⁵. *Ibid*

³⁶. T.B.A. Purba Tambak. 1982. *Sejarah Simalungun*. Pematangsiantar: Percetakan HKBP.

³⁷ K.E.Sinaga (kolektor naskah ketikan). *Turi-turian Parpandanan Na Bolag*. Pematangsiantar.

³⁸ Juandaha Raya, *op.cit*.

berusaha yang benar; berperhatian yang benar; dan memusatkan fikiran secara benar.³⁹

Semasa pemerintahan lokal tradisional, masing-masing kerajaan di Simalungun dipimpin oleh seorang raja yang memiliki batas-batas teritorial tertentu. Pusat pemerintahannya disebut *pematang* yang berfungsi sekaligus sebagai tempat kediaman resmi raja bersama para petinggi kerajaan. Oleh karena itulah di setiap kerajaan di Simalungun terdapat pusat pemerintahan yang bersifat sosial dan politis, seperti *Pematangsiantar*, *Pematang Tanoh Jawa*, *Pematang Raya*, *Pematang Dologsilou*, *Pematang Panei*, *Pematang Purba*, *Pematang Silimakuta*. Raja juga membawahi beberapa *parbapaan* dan *partuanon* serta *partuanon banggal*, *partuanon* maupun *partuanon banggal* membawahi pula beberapa *partuanon* kecil yang langsung memerintah rakyat dengan *pangulu* sebagai fungsionaris pemerintahan sehari-hari dibantu oleh perangkat-perangkat kerajaan (*gamot ni harajaan*) atau *anak boru huta*.

Lewat perantaraan *anak boru huta* inilah perintah raja disampaikan kepada rakyat melalui *puang* yang berfungsi sebagai mediator antara rakyat dengan raja.⁴⁰ Namun akibat penetrasi Belanda, keutuhan dan kedaulatan kerajaan-kerajaan di Simalungun berangsur-angsur semakin keropos. Apalagi setelah dibentuknya kerajaan *marpitu* atas kepentingan kolonial Belanda dengan maksud memecah-belah kekuatan dan kebersamaan raja-raja di Simalungun. Kerajaan di Simalungun kemudian menjadi tujuh (*marpitu*) dengan adanya pengakuan terhadap tiga kerajaan baru, yang

³⁹ MD. Purba. *op.cit* dan Maknur Sinaga, *op.cit*.

⁴⁰ J.M. Saragih. 1985. *Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatra Utara: Simalungun*. Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1984/1985.

semula hanyalah *partuanon*, yakni: Kerajaan Purba, Kerajaan Raya dan Kerajaan Silimakuta.

Istilah jabatan “raja” di Simalungun sejak lama menimbulkan perdebatan di kalangan pejabat-pejabat pemerintahan kolonial Belanda, sejak kapan sebenarnya sebutan itu muncul pertama kali. *Controleur* Van Dijk menyebutkan bahwa konsep raja itu merupakan adopsi secara tidak langsung dari Kesultanan Aceh atau Kesultanan Melayu. Hal ini mengingat dominasi kekuasaan Aceh di Sumatera Timur sudah ada sekitar abad Ke-18. Sebaliknya, Kroesen membantah pendapat Van Dijk dengan mengatakan bahwa sebutan raja sudah ada sebelum penetrasi Aceh. Kroesen menyebut bahwa konsep raja adalah ide asli (*orisinil*) orang Simalungun sendiri sebagai perwujudan otonomi kekuasaannya yang begitu tinggi. *Asisten Residen*, Jan Tideman juga membantah pengaruh Aceh dengan mengatakan bahwa jika konsep raja itu akibat pengaruh Aceh, sudah tentu terdapat tanda-tandanya atau setidaknya pengaruhnya terlihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Simalungun ketika itu.⁴¹

Dalam bidang peradilan, raja berfungsi sebagai hakim tertinggi dengan peradilan *harapatan urung* untuk daerah *partuanan* (subordinat *pamatang* sebagai pusat politis) dan *harapatan bolon* untuk tingkat kerajaan. Hampir keseluruhan isi kesepakatan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan ini berpusat pada kepentingan dan kekuasaan kerajaan. Aspirasi rakyat kurang mendapat tempat dalam sistem pemerintahan tradisional di Simalungun. Sikap menerima atas segala

⁴¹. J. Tideman. 1922. *Simalungun: Tanah Batak Timur dalam Keterasingan dan Perkembangannya Menjadi Bagian dari Daerah Perkebunan Pantai Timur Sumatera* (Terjemahan, Djoko Marihandoko dan Harto Juwono). 2009. Jakarta: Frans Purba.

keputusan dari penguasa menunjukkan kurang bebasnya rakyat memberikan gagasan dan aspirasi terhadap pemimpin kerajaan.

Sikap spesifik etnik Simalungun ini berhubungan dengan pola pikir mereka yang bersifat *piramidal*, yaitu adanya pemisahan anggota masyarakat dalam bentuk hubungan atas - bawah. Di tingkat atas adalah para raja atau beberapa orang penguasa yang memiliki kekuasaan yang sangat besar serta kelebihan-kelebihan lainnya. Sedangkan di tingkat bawah adalah masyarakat banyak yang hanya dapat menerima perintah dan petunjuk tanpa adanya peluang untuk bersikap oposisi⁴². Kondisi ini rupanya dimanfaatkan oleh kolonial Belanda selama menjalankan berbagai kebijakan politik dan pemerintahannya di kota Pematangsiantar dan Simalungun. Mereka kerap menggunakan orang-orang tertentu yang berpengaruh, terutama para kerabat dan keluarga kerajaan agar dapat menggunakan penduduk demi kepentingan bisnis perkebunannya sebagai tenaga kerja maupun untuk mengawasi para pekerja di perkebunan.

2. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Awal abad ke 20 merupakan babak baru kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Timur. Keberhasilan Jacobus Nienhuijs mengelola bisnis perkebunan tembakau di tanah Deli tahun 1863⁴³ mendorong Belanda

⁴². Kasim Sipayung, "*Simalungun: Sebelum dan Sekitar Permulaan Injil*", Ambilan Pakon Barita GKPS Edisi September 1978.

⁴³. Jan Breman. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli. Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad ke 20*. Jakarta: Grafiti.; juga dalam T.Keizerina Devi. 2004. *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; juga dalam Karl.J.Pelzer. 1985. *Toeian Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947*. Jakarta: Sinar Harapan.; juga dalam Mahadi. 1976.

untuk sesegera mungkin menguasai seluruh wilayah Sumatera Timur yang masih merdeka, termasuk Kerajaan Siantar. Jacobus Nienhuijs merupakan sosok peletak dasar budidaya tembakau. Ia juga kemudian yang memasyhurkan pesatnya perkembangan pesisir timur Sumatera ke seluruh dunia lewat perusahaan miliknya, *Deli Maatschappij* yang didirikan dan sukses menjadi salah satu perusahaan perkebunan terbesar era kolonial ketika itu.

Pemerintah kolonial Belanda bersikeras menaklukkan Kerajaan Siantar saat Raja Sang Naualuh Damanik tengah dalam perwalian karena usianya belum cukup dewasa untuk menerima tampuk kepemimpinan menggantikan ayahnya, Tuan Mapir Damanik yang mangkat pada tahun 1880. Untuk sementara, tampuk kekuasaan Kerajaan Siantar dipegang pemangku raja, yakni Tuang Anggi, Tuan Itam dan Bah Bolag. Mereka merupakan kerabat dan keluarga dekat Raja Siantar yang secara tradisi dipercaya mengendalikan kekuasaan. Barulah pada tahun 1888 Sang Naualuh yang masa kecilnya bernama Sangma Damanik, resmi dinobatkan sebagai Raja Siantar Ke-14 oleh Dewan Kerajaan (*Harajaan*) Siantar⁴⁴.

Karena merasa kelak bakal memiliki kepentingan politik, pemerintah kolonial Belanda segera membuat pengakuan terhadap Sang Naualuh sebagai Raja Siantar. Meskipun berdasarkan pengakuan sebelumnya oleh pemangku raja (*Besluit Gubernur General Hindia Belanda Nomor 25 tanggal 23 Oktober 1889*) Belanda menganggap Sang Naualuh sudah tunduk dan takluk atas kekuasaan

Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur (1800-1975), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

⁴⁴. Erond L Damanik., Juandaha Raya Purba Dasuha. 2016. *Kerajaan Siantar: Dari Pulau Holang Ke Kota Pematangsiantar*. Medan: Simetri Institute.

Belanda. Namun sebaliknya Sang Nauluh menganggap *besluit* tersebut tidak ada artinya dan berprinsip pemerintah kolonial Belanda yang harus mengakui dirinya sebagai raja berdaulat di Kerajaan Siantar. Oleh karena itulah, hubungan pemerintah kolonial Belanda dengan Kerajaan Siantar sejak Sang Nauluh berkuasa kerap tak pernah sejalan⁴⁵.

Sang Nauluh dianggap tidak bersedia mengakui kekuasaan Belanda melalui *korte verklaring* (perjanjian/plakat pendek) yang telah dibuat pemerintah kolonial Belanda dengan pemangku kerajaan. Akibatnya, Gubernur Jenderal van Heutsz membuat keputusan bahwa Sang Nauluh tidak mereka akui lagi sebagai raja dan dianggap tidak lagi berwenang memerintah Kerajaan Siantar⁴⁶. Berdasarkan hukum pemerintah kolonial Belanda maka Sang Nauluh harus ditangkap dan ditahan. Tuduhannya adalah bermufakat melakukan konspirasi yang mengancam keamanan dan ketertiban serta sejumlah tuduhan lainnya menurut versi Belanda. Pada bulan April 1906 Sang Nauluh sempat ditahan di rumah penjara *Asisten Residen* di Pematangsiantar. Karena keberadaan Sang Nauluh di Pematangsiantar dianggap dapat membahayakan keamanan sebab pengaruhnya masih sangat besar bagi penduduk, akhirnya dipindahkan ke penjara Keresidenan di Medan.⁴⁷

Sang Nauluh resmi ditetapkan sebagai tahanan negara yang kemudian dibuang ke ibukota *Afdeeling* Bengkalis melalui *Besluit Gubernemen* Nomor 1 tanggal 24 April 1906.

⁴⁵. MD Purba.*op.cit*; juga dalam Jahutar Damanik.*op.cit.*, TBA.Purba Tambak. *op.cit*

⁴⁶. *Besluit van Gouvernuer Generaal* Nomor 1 tanggal 24 April 1906, bundel *Algemeen Secretarie*

⁴⁷.Djoko Mariohandoko., Harto Juwono. 2009. *Sejarah Perlawanan Masyarakat Simalungun Terhadap Kolonialisme: Perlawanan Sang Nahualu*, Bogor: Akademia.

Asisten Residen Bengkalis disertai tanggung jawab untuk mengawasi Sang Nauluh bersama sejumlah kerabat dan anggota keluarganya yang ikut dalam pengasingan tersebut sekaligus bertanggungjawab untuk menyediakan kebutuhan hidupnya⁴⁸sampai Sang Nauluh wafat pada tanggal 9 Pebruari 1913. Tidak ada informasi yang jelas dari pemerintah kolonial Belanda tentang penyebab kematiannya. Sang Nauluh diperkirakan berusia 44 tahun pada saat meninggal. Keberadaan jenazah Sang Nauluh dianggap akan menimbulkan persoalan baru mengingat masih banyak pengikutnya yang tinggal di Kerajaan Siantar dan sekitarnya sehingga dikhawatirkan akan menarik konsentrasi massa dan mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Oleh karena itulah, jenazahnya tidak dibawa ke kota Pematangsiantar namun hingga saat ini masih tetap berada di kota Bengkalis.⁴⁹

Merujuk pada perkembangan dan perlawanan yang ada, pada dasarnya wilayah Kerajaan Siantar baru dapat dikuasai Belanda sejak tanggal 16 Oktober 1907 atau setelah Sang Nauluh mereka singkirkan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan plakat pendek (*korte verklaring*) antara Belanda yang diwakili *Controleur Simaloengoen*, I.L.O'Brien dengan pihak komisi Kerajaan Siantar yang diwakili oleh Tuan Riahata Damanik (Tuan Sidamanik) dan Tuan Torialam Damanik. Pernyataan tunduk kepada Belanda ini dilakukan setelah perlawanan Sang Nauluh berakhir pada tahun 1906

⁴⁸. *Besluit van Gouvernuer Generaal* Nomor 14, tanggal 9 September 1906 bundel *Algemeen Secretarie*.

⁴⁹. Surat Residen Pantai Timur Sumatera Nomor 1953/2 kepada Gubernur Jenderal Idenburg, tanggal 1 Maret 1913. bundel *Algemeen Secretarie*.

yang diprakarsai J.L. O'Brien⁵⁰. Pernyataan tunduk Kerajaan Siantar kepada Belanda sebelumnya yang dibuat pada tanggal 16 September 1888 juga bukan dilakukan langsung oleh Sang Naualuh. Sebab pada waktu pernyataan itu dibuat, Sang Naualuh belum resmi dinobatkan sebagai raja. Pernyataan tunduk atas nama Raja Sang Naualuh tersebut dilakukan oleh Tuan Anggi Tuan Itam dan Tuan Bah Bolak yang saat itu didaulat menjadi pemangku raja. Setelah Sang Naualuh diasingkan ke Bengkalis dan berdasarkan *Besluit* Dewan Kerajaan Siantar Nomor 254 tanggal 29 Juli 1907 yang diketahui oleh *Asisten Residen*, Westernberg inilah, Kerajaan Siantar menyatakan takluk kepada pemerintah kolonial Belanda. *Korte verklaring* pada tahun 1907 ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan pemangku Kerajaan Siantar, setelah sebelumnya dilakukan pada 16 September 1888 namun ditolak Sang Naualuh setelah ia resmi jadi raja. Dengan demikian, sejatinya Raja Sang Naualuh sampai akhir hayatnya tidak pernah membuat pernyataan resmi mengakui pemerintahan kolonial Belanda di wilayah Kerajaan Siantar.

Meskipun sejak tahun 1892 secara *de jure* wilayah kerajaan-kerajaan yang ada di Simalungun sudah dimasukkan pemerintah kolonial Belanda ke dalam tatanan administrasi pemerintahan Provinsi *Oostkust van Sumatera*, tetapi secara resmi pembentukannya baru dilakukan setelah terbitnya *Besluit Gubernur General Hindia Belanda* Nomor 22 tanggal 12 Desember 1906, *Staatblad* Nomor 531. Isinya adalah tentang pembentukan *Afdeeling Simeloengoen en Karolanden* yang dikepalai oleh seorang *Asisten Residen*, berkedudukan di Saribudolog. Sebagai *Asisten Residen* pertama, pemerintah

⁵⁰. Erond L Damanik. *op.cit.*, Harahap, Mohd. Yusuf (tim). *Sumatera Utara dalam Lintasan Sejarah*. Medan: Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. 1993.

kolonial Belanda mempercayakannya kepada V.C.J. Westenberg⁵¹. Pertimbangan menempatkan ibukota *Afdeeling Simeloengoen en Karolanden* di Saribudolog, mengingat letaknya berada di tengah-tengah antara Kerajaan Siantar, Simalungun dan Tanah Karo. Sehingga Westenberg akan dapat dengan mudah memantau daerah kekuasaannya.

Dalam menjalankan pemerintahan pada *afdeeling* ini, Westenberg dibantu oleh dua orang *Controleur* yang masing-masing berkedudukan di Kabanjahe dan Pematangsiantar⁵². Untuk lebih memudahkan pengawasan usaha perkebunan di wilayah yang baru dikuasai Belanda ini, pada tahun 1909 dibentuklah pembagian pengawasan daerah, yaitu *Controleur* Simalungun berkedudukan di Pematangsiantar dan *Controleur* Tanah Karo berkedudukan di Kabanjahe. Sesuai dengan luasnya wilayah pengawasan, maka pada tahun 1910 didirikan pula markas tentara Belanda di Saribudolog dan pada tahun 1911 dipindahkan ke Sidikalang. Kemudian pada tahun 1912 kedudukan *Asisten Residen* dipindahkan dari Saribudolog ke kota Pematangsiantar⁵³.

Pasca pembentukan susunan pemerintahan swapraja, pemerintah kolonial Belanda juga menetapkan peraturan peradilan berdasarkan *Besluit Gubernur General* Nomor 24 tahun 1914. Isinya mengatur hak dan wewenang Raja-raja di Siantar dan Simalungun sebagai pengganti *harungguan*. Selanjutnya pada tahun 1917 didirikanlah kantor-kantor kerajaan, di mana setiap kantor diangkat seorang kepala kantor (*pangulu balei*) yang merangkap Jaksa pada tingkat *kerapatan urung*. Hirarki peradilannya pada masa itu adalah: tingkat kampung (*huta*) dipegang oleh *pangulu* yang dibantu

⁵¹. J.Tideman, *op.cit*; juga dalam Maknur Sinaga.*op.cit*.

⁵². Djoko Marihandono. *op.cit*.

⁵³. Maknur Sinaga.*op.cit*

oleh pengetua-pengetua adat (*partuha*); tingkat *parbapaan* diadakan *kerapatan balei* yang diketuai oleh *parbapaan* dan anggotanya dibantu oleh *pangulu-pangulu*; tingkat peradilan tinggi suatu kerajaan dilakukan dalam *kerapatan urung* yang diketuai oleh raja dan dibantu *parbapaan*, yang didampingi oleh para *partuha*. Tugas badan peradilan bentukan kolonial ini adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara para Raja-raja di Simalungun. Namun dalam prakteknya badan peradilan tersebut juga mengatur tentang peraturan otonomi dan *medebewin* (tugas-tugas pembantuan). *Controleur* sendiri memiliki tugas ganda, yaitu sebagai *zelfbestuur* (pemerintah daerah) dan sebagai *voorzitter* (hakim)⁵⁴.

Sebelum era kolonial Belanda, pengangkatan Raja-raja Siantar dilakukan menurut upacara adat yang disahkan melalui acara *patappei sihilap* (pelantikan) oleh *harajaan* (dewan kerajaan) dan menurut tradisi adat Simalungun. Tetapi kekuasaan kolonial Belanda, pengangkatan Raja-raja Siantar harus disahkan dengan *besluit* (surat keputusan) yang ditandatangani *Gubernur General Hindia Nederland* dan dihadiri oleh para pejabat Belanda⁵⁵. Kebijakan ini menunjukkan legitimasi pengangkatan raja mutlak ditentukan pemerintah kolonial Belanda. Meskipun dalam rangka otonomi (*zelfbestuurende landschappen*), secara politik Belanda masih membiarkan *yuridiksi* pemerintahan kerajaan-kerajaan tradisional di Simalungun sebagai *native states* (pemerintahan pribumi) yang berhak mengurus pemerintahannya sendiri namun tetap dalam pengawasan Belanda.

Yuridiksi politik pemerintahan pribumi ini meliputi masyarakat tradisional kerajaan dan dianggap berada di

⁵⁴. *Ibid*

⁵⁵. *Ibid*.

bawah perintah tak langsung dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam pemerintahan *zelfbestuurende landschappen*, hak-hak adat raja dan keluarganya tetap dihormati oleh pemerintah Belanda. Tetapi seluruh kerabat kerajaan yang terdiri dari orang pribumi (*inlanders*) berkewajiban untuk takluk dan menaati aturan pemerintahan swapraja itu. Struktur pemerintahan *native states* yang selama kekuasaan Belanda merupakan model umum pada penguasa tradisional Sumatera Timur.

Sistem pemerintahan ala *feodalistik* tersebut kerap menimbulkan benturan dan konflik dengan penguasa tradisional di Sumatera Timur, terutama dengan kaum imigran yang datang dari berbagai daerah. Hal ini menjadikan Sumatera Timur rawan dengan pertentangan etnis, khususnya antara penguasa swapraja (*zelfbestuurder native states*) dengan imigran yang didominasi oleh penduduk dari Karesidenan Tapanuli. Sedangkan kepada kantor (*pangulu balei*) Belanda selalu mengupayakan agar orang yang diangkat berasal dari luar keluarga kerajaan. Karena berasal dari luar, pada akhirnya hal ini malah membuat wibawa kekuasaan raja semakin berkurang⁵⁶.

Sejak ditandatanganinya *korte verklaring*, pemerintah kolonial Belanda melarang para raja berhubungan politis dengan kekuatan politik lain. Dampaknya, wilayah Kerajaan Siantar yang berada di dataran rendah berubah menjadi lahan-lahan perkebunan besar dibawah kendali Belanda. Karet *hevea brasiliensis* yang diperkenalkan ke Sumatera Timur oleh Harrison dan Crosfield dengan cepat menjadi komoditi perkebunan utama. Disusul kemudian dengan

⁵⁶. *Ibid.*

tanaman teh, sisal kopi serta kelapa sawit⁵⁷. Pembukaan perkebunan (*onderneming*) sejak tahun 1910 menandai pesatnya pertumbuhan penduduk di Pematangsiantar, Bandar dan Tanah Jawa yang terdiri dari kuli kontrak asal pulau Jawa dan Tionghoa. Diutamakan pengembangan bisnis sektor perkebunan oleh kolonial Belanda pasca *korte verklaring* 1907 menjadi penggerak utama perubahan di Kerajaan Siantar, termasuk wilayah *partuanon* Bandar. Perubahan yang signifikan itu menghasilkan imigrasi besar-besaran, sistem komunikasi modern, seperti jalan, telegraf dan telepon, sarana pendidikan dan pertumbuhan kota seperti Pematangsiantar dan Perdagangan yang pada akhirnya bermuara pada kepentingan *onderneming*.⁵⁸ Dampak perkembangan bisnis perkebunan yang dikelola perusahaan-perusahaan asal Eropa ini membawa berbagai perubahan budaya, struktur sosial dan pola-pola interaksi sosial masyarakat. Penduduk di sejumlah daerah di Simalungun terutama di kota Pematangsiantar berubah cepat menjadi wilayah yang *heterogen* (pluralis).⁵⁹

Setelah pembentukan *Afdeeling Simaloengoen en Karolanden* tahun 1906, Belanda kembali melakukan reorganisasi pemerintahan dengan menjadikan ibukota Kerajaan Siantar sebagai kotamadya (*gemeente*). Penetapan ini dikukuhkan dengan diterbitkannya *Besluit Gubernur General Hindia Belanda, J. Van Limburg Stirum, Staatsblad* Nomor 285 tanggal 27 Juni 1917 yang dikeluarkan

⁵⁷ R. William Liddle. 1970. *Ethnicity, Party and National Integratin: An Indonesian Case Study* Yale University Press: New Haven and London.

⁵⁸ R. William Liddle. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia Pada Awal Orde Baru* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

⁵⁹ Wolfgang Clauss. 1982. *Economic and Social Change among the Simalungun Batak of North Sumatra*. Verlag Breitenbach Publishers: Saarbrucken. Fort Lauderdale.

di Buitenzorg (Bogor)⁶⁰. Keputusan ini efektif berlaku sejak tanggal 1 Juli 1917. Diputuskan pula bahwa nama daerah otonomi baru tersebut adalah *geemente* Pematangsiantar dalam lingkup Keresidenan Sumatera Timur yang berkedudukan di kota Pematangsiantar⁶¹. Selanjutnya, pemerintah kota Pematangsiantar melalui Akta Notaris tanggal 18 Desember 1923 mulai mengelola aset-aset yang berada dalam wilayah kota dengan batas-batas yang ditetapkan melalui surat pengukuran Nomor 131 tanggal 27 Oktober 1923. Namun untuk wilayah kantor-kantor pemerintah dan lahan-lahan yang telah dikuasai penduduk tetap dipertahankan dan dikecualikan dari akte tersebut⁶². Pemerintah Belanda menggelontorkan anggaran sebesar 5.700 *gulden* per tahun untuk operasional pemerintahan *gemeente* Pematangsiantar yang baru dibentuk. Penetapan anggarannya dilakukan melalui keputusan *Gubernur General Hindia Belanda* yang dicatat dalam lembaran negara (*staatsblad*) Nomor 290 tanggal 27 Juni 1917 dan mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 Juli 1917.

Dengan tersedianya anggaran pembangunan, infrastruktur dan fasilitas perkotaan dikerjakan dengan perencanaan modern ala Eropa, termasuk pemeliharaan, renovasi, perbaikan dan pembangunan jalan-jalan umum, penyediaan sarana air minum, tanggul anti banjir, selokan (kanal), pasar, jembatan, gorong-gorong, taman bunga, rumah potong hewan, tempat pencucian pakaian dan lain-lain. Kebijakan pembangunan bidang infrastruktur ini menjadikan pesatnya perkembangan kota Pematangsiantar

⁶⁰. *Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsche Indie, Staatsblad* Nomor 285 tanggal 27 Juni 1917.

⁶¹. G.W. Meindersma. *Memorie van Overgave van den Simaloengoen en de Karolanden* 7 October 1938.

⁶². *Ibid.*

yang terus diupayakan oleh Belanda semaksimal mungkin. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi siapa pun yang menjadi pejabat *Asisten Residen*, karena sekaligus bertindak sebagai Walikota (*burgemester*). Belanda juga membangun perkampungan khusus orang-orang Eropa di sekitar pusat pemerintahan. Saat ini lokasi tersebut berada di sekitar Jalan MH. Sitorus, Jalan Simbolon, Jalan Gunung Simanuk-manuk, yang diperluas dengan taman dan villa antara kedua cabang aliran sungai *Bah Bolon*. Juga dibangun kampung dagang untuk orang-orang Tionghoa, perkampungan untuk orang-orang Islam di Timbang Galung, perkampungan orang-orang Toba di Kampung Kristen, perkampungan orang-orang Jawa, Melayu dan lainnya.

Kampung perumahan yang luas dan jalan yang lebar dibuka yang dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Semua fasilitas tersebut dibangun dengan mengambil dananya dari hasil pajak kotapraja. Dengan cara ini kota Pematangsiantar dicoba untuk menjadi tempat tinggal ideal, di mana kebijakan pemerintah, kondisi alami, dan akhirnya perusahaan di sekitarnya (cuaca dan keindahan alam) bersama-sama mencapai tujuan yang sama. Keberadaan fasilitas kota ini memberikan gambaran dan bukti bahwa kota Pematangsiantar memiliki arti strategis dan penting bagi pemerintahan Belanda di Karesidenan Sumatra Timur. Hal ini juga tidak terlepas dari keberadaan perkebunan-perkebunan besar di sekitar kota Pematangsiantar dan Simalungun yang memberikan andil terbesar bagi pertumbuhan dan perkembangan kedua wilayah ini. Dari aspek geografis letak kota Pematangsiantar sangat strategis dalam menghubungkan arus lalu-lintas dari wilayah Pantai

Timur Sumatera (Belawan/Medan) dan Asahan dengan wilayah Pantai Barat Sumatera (Tapanuli/Sibolga)⁶³.

Kondisi ini makin membuat kota Pematangsiantar sangat penting bagi kepentingan militer, ekonomis dan politik pemerintah kolonial Belanda. Sehingga tidak mengherankan bila Jepang juga kemudian menjadikan kota Pematangsiantar sebagai salah satu tujuan invasinya di Hindia Belanda selama perang Pasifik berlangsung (1941-1945). Sejumlah infrastruktur dan fasilitas kota yang dibangun pada masa kolonial Belanda tersebut, bekasnya masih dapat dilihat hingga kini di kota Pematangsiantar. Bahkan diantaranya masih ada yang utuh karena sengaja dilestarikan, meskipun sebagian besar sudah tergerus zaman seiring dengan perkembangan kota di tengah pesatnya kemajuan teknologi.

B. Dinamika Perjuangan Era Perang Kemerdekaan

1. Berakhirnya Pendudukan Jepang

Selama masa pendudukan Jepang di kota Pematangsiantar, nyaris mereka tidak banyak melakukan pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik lainnya karena Jepang juga disibukkan dengan persiapan menghadapi perang Asia Timur Raya. Mereka lebih fokus menyiapkan pasokan pangan untuk stok menghadapi perang, sehingga memaksa raja-raja dan rakyat di Pematangsiantar dan Simalungun untuk mengelola lahan pertanian seluas-luasnya. Apalagi Jepang memerintah di Indonesia hanya dalam waktu singkat (+ /- 3,5 tahun) sehingga mereka kebanyakan hanya memanfaatkan fasilitas yang sebelumnya sudah dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dalam mengatur pemerintahannya. Sampai

⁶³. Jalatua Hasugian. 2020. *Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Pematangsiantar 1917-1942*. Yogyakarta: KBM Indonesia.

akhirnya Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, tidak terlalu tampak pembangunan infrastruktur yang hasilnya bisa dirasakan sampai sekarang di kota Pematangsiantar.

Jepang memasuki wilayah Sumatera bagian utara pada tanggal 13 Maret 1942 melalui dua jalur, yakni di Labuhan Ruku lewat pelabuhan Tanjung Tiram (Batubara) dan pelabuhan Kuala Bugak (Aceh). Pendaratan tentara Jepang melalui Labuhan Ruku terbagi dua, satu kolone langsung menuju kota Pematangsiantar dan Simalungun, dan satu kolone lagi menuju kota Medan. Namun pasukan Jepang yang mendarat di Aceh, sebagian juga diarahkan bergerak untuk merebut kota Medan. Kemudian pada tanggal 24 Maret 1942 pasukan brigade Jepang juga didatangkan dari kota Pematangsiantar untuk bergabung dengan pasukan yang berada di Medan guna membantu merebut pusat pertahanan Belanda di Tanah Alas dan Gayo Lues⁶⁴. Tentara Jepang yang mendarat di Labuhan Ruku merupakan pasukan yang didatangkan dari Singapura melalui Selat Malaka dengan tujuan utama adalah untuk merebut kota Medan. Mereka mendarat tengah malam di Labuhan Ruku dengan menggunakan sejumlah bot bermotor. Sesampainya di kota Pematangsiantar, mereka langsung menguasai Siantar Hotel dan menjadikannya sebagai markas meski sempat mendapat perlawanan dari pasukan Belanda. Dari Pematangsiantar, mereka sebagian bergerak menuju wilayah Tapanuli dengan mengitari pegunungan Bukit Barisan dan pesisir Danau Toba⁶⁵.

⁶⁴. Muhammad TWH. 1997. *Belanda Gagal Merebut Pangkalan Berandan*. Medan: Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RI.

⁶⁵. Takao Fusayama, dkk. 1994. *Runtuhnya Imperium Barat di Asia Tenggara: Fajar Asia*. Medan: Prima dan Lina Computer Press.

Pada masa pendudukan Jepang di Pematangsiantar dan Simalungun, tenaga-tenaga muda potensial banyak direkrut menjadi pembantu mereka dengan memberikan pelatihan semi-militer bahkan latihan militer (*gyugun*). Meskipun masuk menjadi anggota *gyugun* merupakan suatu paksaan, namun tetap memiliki nilai tambah tersendiri bagi pemuda-pemuda setempat yang mendapatkan lahan pekerjaan baru. Para petani juga diberikan kesempatan untuk mengusahakan lahan-lahan pertanian, bahkan memperluas lahan taninya di kawasan perkebunan demi terpenuhinya pasokan beras dan bahan pangan pokok lainnya.

Di masa transisi pemerintahan pasca kekalahan Jepang, ketika berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah berkumandang di Jakarta, di daerah-daerah, Jepang berusaha menutup akses informasi kepada masyarakat. Mereka melakukan sensor ketat terhadap berita proklamasi dan juga berita tentang kekalahan mereka dalam perang Asia Timur Raya. Sensor ketat dilakukan oleh tentara Jepang terhadap berita di radio maupun surat kabar di Pematangsiantar dan Simalungun. Hal inilah yang menyebabkan informasi tentang proklamasi kemerdekaan terlambat sampai ke kota Pematangsiantar sekitarnya. Sensor ketat terpaksa dilakukan oleh tentara Jepang dalam rangka menjaga agar tidak sampai ada serangan mendadak dari rakyat Indonesia, jika mereka tahu bahwa Jepang sudah kalah perang.

Upaya pengawasan ketat militer Jepang terhadap perkembangan yang terjadi dapat terlihat ketika pada tanggal 19 Agustus 1945 sebuah pesawat menyebarkan pamflet-pamflet di wilayah Sumatera Timur terutama Medan, Pematangsiantar dan Tanjung Balai. Isi pamflet yang ditanda tangani oleh H.J. Van Mook ini menyatakan: “*Saudara-saudara*

bangsa Indonesia yang kami cintai. Telah lama saudara-saudara bangsa Indonesia menderita dibawah kekuasaan Jepang. Sekarang perang telah selesai dengan kemenangan yang gemilang dipihak Sekutu. Tak lama lagi pemerintah Belanda akan kembali untuk memperbaiki kehidupan saudara-saudara sesuai janji Sri Ratu Welhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Tetap setia kepada Seri Ratu dan bersiaplah menyambut kedatangan si Tiga Warna. Terhadap setiap orang yang tidak setia kepada Seri Ratu akan kami ambil tindakan-tindakan tegas”⁶⁶.

Selebaran tersebut langsung disita oleh tentara Jepang, termasuk yang sudah sempat dibaca masyarakat juga mereka minta. Mereka juga mengancam orang-orang yang sudah sempat membacanya agar tidak memberitahukan isinya kepada orang lain. Meski bertindak demikian refresif, tetap saja tentara Jepang tak bisa menghempang berita kemerdekaan yang terus dikumandangkan dari Jakarta. Bahkan kantor berita milik Jepang “*Domei*” di Jakarta sempat menyiarkan berita proklamasi ini atas inisiatif sejumlah tokoh pergerakan nasional, diantaranya Soekarni dan Khairul Saleh. Mereka berhasil menyelundupkan berita proklamasi melalui siaran radio gelombang pendek yang sarannya sampai ke luar negeri. Berita dalam bentuk sandi *morse* ini berhasil diterima kantor pos dan telegraf pusat di Bandung yang kemudian mengirimkannya kembali ke seluruh penjuru nusantara, termasuk di kota Medan⁶⁷. Namun tak lama berselang, Jepang menyadari jika berita proklamasi tersebut telah mengudara dan menyebar kemana-mana. Mereka segera melakukan klarifikasi dengan mengatakan berita

⁶⁶ Edi Saputra. 1977. *Simalungun Jogja-nya Sumatera Dalam Perang Kemerdekaan*, Medan: U.P. Bina Satria 45.

⁶⁷ Edi Saputra. 1987. *Sumatera Dalam Perang Kemerdekaan: Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris dan Belanda*. Jakarta: Yayasan Bina Satria 45.

tersebut adalah keliru. Meski diklarifikasi namun berita proklamasi sudah sempat menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia dan hal ini menjadi babak baru bagi perjuangan laskar-laskar rakyat di daerah untuk bergerak.

Pasca pemberitahuan ini, para personil *Gyugun* dan *Heiho* mulai gelisah dan bingung bahkan mulai meninggalkan asrama tanpa tujuan yang jelas. Sementara untuk langsung pulang ke kampung masing-masing mereka juga belum berani karena belum ada perintah. Di Pematangsiantar ketika itu, pada tanggal 22 Agustus 1945 terjadi peristiwa yang menggemparkan seluruh penghuni asrama *Gyugun-Heiho*. Saat apel pagi, komandan *Gyugun-Heiho* membacakan pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panglima Militer Jepang Se-Sumatera, Jendral Moritake Tanabe. Pemberitahuan itu menyatakan bahwa Perang Asia Timur Raya telah selesai dan para *Gyugun* dan *Heiho* dipersilahkan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Namun banyak diantara mereka yang bingung dan masih ragu dan ada yang memang tidak ingin pulang kampung sehingga mereka berpencar-pencar di penjuru Pematangsiantar. Akibatnya, suasana kota Pematangsiantar pun menjadi ramai dengan keberadaan para anggota *Gyugun* dan *Heiho* yang tanpa komando dan arah tujuan. Sebaliknya informasi ini ditanggapi berbeda oleh orang-orang Tionghoa terhadap warga Pematangsiantar yang sempat menimbulkan sikap sentimen kebangsaan terhadap masyarakat pribumi⁶⁸.

Pada awal September 1945 terjadi suatu peristiwa unik di kota Pematangsiantar. Tanpa jelas darimana provokasinya, orang-orang Tionghoa yang berada di dalam kota tiba-tiba

⁶⁸ Ardia Gemala Irawan. 2015. *Kota Pematangsiantar Pada Masa Awal Kemerdekaan 1945-1947*. Skripsi pada Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Medan.

bertindak melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap anggota *Gyugun* dan *Heiho* yang mengakibatkan terjadinya insiden baku hantam. Kebringasan orang-orang Tionghoa ini disebabkan adanya desas-desus bahwa tentara Tiongkok, *Cung King* telah mendarat di Bagan Siapi-api dan akan segera menuju kota Pematangsiantar. Melihat reaksi orang-orang Tionghoa yang sentimen terhadap kaum pribumi, para anggota *Gyugun* dan *Heiho* kembali mengorganisir diri bergabung dengan para pemuda di kota Pematangsiantar dan Simalungun dan melakukan penyerangan terhadap orang-orang Tionghoa tersebut⁶⁹.

Mereka menyerbu dan menyiapkan drum-drum minyak untuk membakar toko-toko yang ada di pusat kota. Orang-orang Tionghoa yang sebenarnya tidak terorganisir tersebut terdesak dan lari bersembunyi di toko-toko mereka. Untungnya aksi tersebut dapat dihentikan para pemilik toko yang merupakan orang-orang pribumi yang menyewakan toko kepada orang-orang Tionghoa. Merespon insiden ini, kapitan-kapitan Tionghoa yang ada di Sumatera Timur terpaksa turun tangan ke kota Pematangsiantar dan menghadap Wakil *Bonsuco* Madja Purba (kelak menjadi Bupati Simalungun) untuk melakukan perdamaian. Madja Purba selaku perwakilan pemerintah Jepang di kota Pematangsiantar menolaknya, karena yang dirugikan atas perilaku orang-orang Tionghoa tersebut adalah bangsa Indonesia, bukan pemerintah Jepang. Melalui Madja Purba perundingan dilakukan antara orang-orang Tionghoa dan Barisan Rakyat yang diwakili pengetua-pengetua.

Dalam perdamaian ini dilakukan acara makan bersama yang dibiayai para kapitan dengan menggelar pesta hingga

⁶⁹. *Ibid*

empat hari empat malam. Dari perundingan ini disepakati untuk menghapus sebutan “Tuan” kepada orang-orang Tionghoa dan tidak boleh berkibarnya bendera *kuomintang*. Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 7 September 1945 terjadi sebuah kegemparan akibat pidato Tenno Haika yang disiarkan secara luas tentang kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Jelaslah sudah berita tentang kekalahan Jepang tersebut bagi seluruh masyarakat dan laskar-laskar rakyat pun segera bergerak untuk mempertahankan kemerdekaan⁷⁰.

Tindakan orang-orang Tionghoa ini membuktikan jika mereka tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Mereka malah menginginkan Indonesia diserahkan kepada tentara Tiongkok, negara asal leluhur mereka. Selain di kota Pematangsiantar, pasca pengumuman kekalahan Jepang, orang-orang Tionghoa juga banyak mengibarkan bendera *kuomintang* di Pakanbaru, Aceh, Jambi, Medan dan Palembang. Warga Tionghoa di Medan merasa senang dengan kalahnya Jepang dan berharap tentara Tiongkok yang akan mendarat serta melucuti tentara Jepang. Sikap dan reaksi warga Tionghoa di Medan menyebabkan terjadinya gesekan dengan pemuda dan rakyat yang mendukung kemerdekaan. Akibatnya hubungan orang-orang Tionghoa dengan rakyat Indonesia menjadi tegang dan bertambah runyam oleh hasutan Belanda. Sekutu dan Belanda kemudian melengkapi orang-orang Tionghoa dengan persenjataan lengkap. Pada tanggal 1 Januari 1946, kaum Tionghoa mengumumkan pembentukan pasukan *Poh An Tui*, sebuah milisi yang terdiri dari para pemuda Tionghoa yang bertujuan melindungi warga Tionghoa dari berbagai

⁷⁰. *Ibid*

ancaman. Namun kenyataannya mereka malah mendukung tentara Sekutu dan hadirnya kembali kekuasaan Belanda⁷¹.

Selain warga Tionghoa, kelompok yang juga tidak mendukung kemerdekaan di Sumatera Timur dan Aceh adalah sebagian para raja beserta keluarga, kerabat dan bangsawan. Sebab selama pemerintahan kolonial, mereka merupakan mitra yang banyak mendapat keuntungan dari kolonial Belanda. Sebaliknya, Belanda memanfaatkan mereka sebagai perpanjangan tangan dan ujung tombak memerintah masyarakat. Buktinya, Sultan Langkat, Teuku Mansyur serta beberapa orang keluarga kerajaan, ditambah orang-orang mantan *ambtenaar* membentuk *Comite van Orwngst*. Tujuannya untuk mengelukan dan menyambut kembalinya Belanda untuk memerintah. Anggota komite ini mengunjungi *kamp-kamp* tempat orang-orang dan pegawai Belanda yang ditawan Jepang. Penentangan para raja dan anggota kerajaan terhadap proklamasi kemerdekaan juga ditunjukkan Sultan Deli dan Langkat yang menerima Brondgeest, komandan pasukan penyusup Belanda yang pertama kali masuk ke Sumatera Timur. Mereka menegaskan kepada Brondgeest, akan bekerjasama dan mendukung kehadiran Belanda kembali. Bukti keberpihakan raja dan keluarga raja terhadap hadirnya kaum kolonialis juga terlihat saat mereka melecehkan pemerintahan republik ketika penobatan Sultan Langkat. Pada waktu itu wakil-wakil Belanda, sekutu dan Jepang ditempatkan di tempat terhormat, sedangkan Gubernur Sumatera, Mr. T.Moh. Hasan

⁷¹. Jajat Burhanudin (Editor) & Tim Penulis. 2015. *Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

sengaja dibiarkan duduk dan bergabung dengan undangan masyarakat kebanyakan.

Dalam biografinya, T.Moh. Hasan menyebutkan penghinaan itu juga dilakukan pada saat meninggalnya Sultan Deli, Amiluddin Sani Perkasa. Gubernur Sumatera, T.Mohd. Hasan duduk di salah satu sudut ruangan istana. Namun di sisi lain keluarga Sultan Deli menerima utusan Belanda dan Jepang dengan penuh hormat. Mereka juga ditempatkan di panggung utama kehormatan, bahkan pengibaran bendera Belanda setengah tiang juga dilakukan di depan istana. Sultan Deli yang baru diangkat (Sultan Osman) juga mengingkari proklamasi dan mengharapkan perlindungan Sekutu atas istananya di Medan. Dirinya juga bersikap arogan terhadap republik dengan mengatakan bahwa konstitusi republik akan menempatkan daerahnya di bawah dominasi Jawa. Sebaliknya dia menginginkan adanya hubungan langsung dengan Kerajaan Belanda di bawah seorang komisar. Dirinya juga menginginkan agar kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur berada di luar Indonesia. Sikap dan perlakuan mereka inilah yang menimbulkan kemarahan dan aksi rakyat kepada para raja dan keluarga kerajaan di Sumatera Timur pada bulan Maret 1946 melalui gerakan revolusi sosial⁷².

Gerakan revolusi sosial yang cukup tragis dan traumatis ini juga melanda wilayah Simalungun, di mana sejumlah raja-raja dan keluarga kerajaan menjadi korban laskar-laskar anggota Barisan Harimau Liar (BHL) yang dipimpin, AE Saragih Ras. Mereka menganggap para raja-raja di Simalungun juga merupakan kaki tangan Belanda yang tak berkeinginan bergabung dengan Republik Indonesia. Para

⁷². *Ibid.*

raja juga berkeinginan agar Belanda datang dan memulihkan kembali kekuasaannya. Sikap ini dianggap bagian dari penghianatan terhadap bangsa, sehingga para penguasa tradisional ini harus segera dilenyapkan. Atas dasar itulah mereka kemudian melakukan gerakan revolusi sosial dengan menghabisi para raja-raja dan bangsawan di Simalungun pada tanggal 3-4 Maret 1946⁷³.

2. Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan Soekarno - Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta tidak secepatnya diketahui masyarakat Indonesia. Kita tentu mafhum, jika berita kemerdekaan itu tak serta-merta bisa segera diketahui seluruh rakyat. Sebab sarana komunikasi dan publikasi ketika itu merupakan barang langka dan sangat berharga. Kalau pun ada yang memiliki radio apalagi pesawat telepon, mereka tentu merupakan warga negara 'kelas atas'. Setidaknya mereka merupakan para pedagang kaya, pegawai kolonial atau keturunan raja (bangsawan). Selain itu, Jepang yang sebenarnya sudah kalah perang dengan Sekutu masih merasa menjadi penguasa. Tentara Jepang bahkan melakukan sensor dan bertindak refresif terhadap siaran radio yang mengumandangkan berita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sedangkan media cetak seperti koran dan majalah pun sangat terbatas. Sebab pemerintah kolonial Belanda maupun penguasa berikutnya, Jepang tak gampang memberi izin. Mereka kerap membekukan media-media yang ada,

⁷³. Hanif Harahap., Dini Ramadhani. 2019. *Laskar Revolusioner Sumatera Timur: Dari Revolusi Sosial di Simalungun Sampai Kudeta Gubernur Sumatera*. Yogyakarta: Deepublish.

utamanya media yang bersikap kritis terhadap kebijakan penguasa. Oleh karena itu, menjadi sangat lumrah jika berita kemerdekaan sangat lambat diketahui masyarakat Indonesia. Tentara Jepang yang masih berkuasa menjelang kemerdekaan, berupaya menutup semua informasi agar rakyat Indonesia jangan sampai tahu jika negaranya sudah merdeka. Jepang melarang penyebarluasan berita tentang kemerdekaan dan menyatakan informasi tersebut keliru. Apalagi mereka masih menguasai surat-surat kabar dan radio sehingga masih leluasa menyatakan berita tentang proklamasi itu tidak benar. Meskipun tetap saja ada diantara tokoh-tokoh pergerakan atau penduduk yang memiliki radio dan diam-diam informasinya disebarluaskan secara terbatas kepada masyarakat.

Di kota Medan, berita kemerdekaan dibawa langsung oleh Mr. Tengku Moh. Hasan dan dr.M.Amir sebagai utusan dari Sumatera yang menghadiri pembacaan teks proklamasi di Jakarta. Mereka tiba kembali di Medan pada tanggal 24 Agustus 1945 tetapi tidak langsung mengumumkannya. Pengumuman resmi baru dilakukan pada 30 September 1945 oleh Tengku Moh.Hasan, saat pertemuan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) di Taman Siswa, Amplas Medan. Pengumuman tentang kemerdekaan ini disambut meriah dengan semangat gegap gempita dan para pemuda langsung mengibarkan bendera merah putih yang sebelumnya sudah disiapkan. Menurut Edisaputra⁷⁴, informasi tentang kemerdekaan di Sumatera Timur, khususnya Pematangsiantar -Simalungun sebenarnya sudah terdengar sejak awal September 1945 oleh sejumlah tokoh-tokoh

⁷⁴. Edisaputra. 1987. *Sumatera Dalam Perang Kemerdekaan: Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris dan Belanda*. Jakarta: Yayasan Bina Satria .

pergerakan. Salah seorang tokoh pergerakan yang dikenal di kalangan pejuang Siantar Simalungun ketika itu, Abdullah Yusuf. Yusuf pernah mendapat surat dari Dr.A.K.Gani di Palembang agar segera menyampaikan berita kemerdekaan kepada segenap rakyat di Simalungun. Karena kebingungan memikirkan bagaimana teknis mengumumkannya, Yusuf mengajak rekannya sesama pejuang, diantaranya: Abdul Azis Siregar, Burhanuddin Kuncoro, Menes Tampubolon dan Ricardo Siahaan untuk berdiskusi. Apalagi, Yusuf punya pertimbangan jika tentara Jepang yang masih berkuasa saat itu pasti akan bereaksi, jika mereka mengumumkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Bukannya dapat solusi, Yusuf malah didesak rekan-rekannya agar segera mengumumkan kemerdekaan kepada rakyat Siantar dan Simalungun.

Karena tak kunjung ada ketegasan dari Abdullah Yusuf yang malah terus memikirkan banyak pertimbangan, Abdul Azis Siregar dan rekan-rekannya spontan bertindak sendiri. Pada tanggal 27 September 1945, mereka menggelar apel pemuda di sekitar Lapangan Pagoda (sekarang Lapangan Merdeka) dan langsung mengibarkan bendera Merah Putih sembari menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Sedangkan Teks Proklamasi tak dibacakan karena mereka belum memperoleh salinan naskahnya. Pengibaran bendera Merah Putih pertama kalinya di Pematangsiantar dan pertanda pengumuman kemerdekaan ini, merupakan langkah berani para pemuda Siantar dan Simalungun. Padahal hanya terpaut puluhan meter dari lokasi mereka menggelar upacara, tentara Jepang mengamatinya dari markasnya di Siantar Hotel⁷⁵.

⁷⁵. Kusuma Erizal Ginting, dkk. 1992. *Sejarah Pengibaran Bendera Merah Putih Yang Pertama Di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dan Peristiwa Berdarah Siantar Hotel*. Pematangsiantar: Perc. UD. Keluarga.

Mereka tampaknya diam seribu bahasa melihat tindakan heroisme para pemuda meski tanpa dihadiri jawatan-jawatan atau dinas-dinas maupun perwakilan pemerintahan atau raja-raja setempat. Usai menggelar upacara tersebut, Abdul Azis Siregar dan rekan-rekannya berangkat ke Medan bertemu pengurus Badan Kebaktian Pemuda Indonesia (BKPI). Sekembalinya dari Medan, mereka segera membentuk organisasi BKPI pada 29 September 1945. Mengenang peristiwa inilah makanya di lokasi pengibaran bendera Merah Putih tersebut, sekarang dibangun sebuah prasasti. Paling tidak, bisa menjadi menjadi memori kolektif warga Pematangsiantar untuk mengenang sebuah peristiwa sejarah kemerdekaan tahun 1945.

Kemerdekaan yang telah dikumandangkan di wilayah Sumatera Timur rupanya tak begitu saja bisa diterima Belanda yang berniat kembali menjadi penguasa pasca kekalahan Jepang. Dengan membonceng tentara Sekutu/*NICA*, Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu dipimpin Brigjen TED Kelly memasuki kota Medan dengan diboncengi tentara *Netherlands Indies Civil Administration (NICA)*. Mereka kemudian membebaskan para tawanan perang dan mempersenjatainya. Ternyata tentara *NICA* dan kelompok tawanan yang dibebaskan dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sikap orang-orang Belanda yang arogan menimbulkan rasa tidak senang dikalangan para pemuda dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Keadaan ini dipertajam ketika mereka membentuk *Medan Batalyon KNIL (het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger)* yang akhirnya memicu terjadinya pertempuran pada tanggal 13 Oktober 1945. *KNIL* merupakan pasukan tentara kolonial Belanda yang anggotanya juga direkrut dari kaum pribumi. Pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan Sekutu memasang papan-

papan yang bertuliskan *Fixed Boundaris Medan Area* (batas resmi Medan Area) di berbagai sudut kota Medan. Tindakan ini malah semakin menyulut semangat para pemuda dan TKR⁷⁶.

Belanda berupaya untuk merebut kembali wilayah Republik Indonesia yang baru saja diproklamkan kemerdekaannya. Di Sumatera Timur, sejak kedatangan pasukan Sekutu hingga awal Maret 1946 mereka melancarkan gempuran pasukan militernya yang membuat suasana kota Medan sebagai ibukota pemerintahan Provinsi Sumatera tak kondusif. Apalagi tentara *NICA* terus-menerus menggempur markas-markas Tentara Republik Indonesia (TRI) di sekitar Medan Area. Keadaan ini disadari para pemimpin politik dan tentara Indonesia menjadi ancaman bagi pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera. Para pemimpin pemerintahan dan tentara rakyat di Medan berupaya melakukan negosiasi dengan Sekutu/*NICA* guna mencari solusi, sebagaimana yang dilakukan pemerintah pusat.

Kondisi yang semakin mencemaskan tersebut mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumatera menggelar rapat di Bukittinggi pada tanggal 17-19 April 1946. Rapat tersebut memutuskan segera memindahkan ibukota Sumatera dari Medan ke kota Pematangsiantar dan Kantor Keresidenan Sumatera Timur yang berkedudukan di Medan ke Tebingtinggi. Markas TRI Divisi IV juga turut dipindahkan ke Pematangsiantar. Kebijakan ini dilakukan mengingat situasi keamanan kota Medan yang semakin tidak kondusif dan kian mencekam. Pemindahan pusat pemerintahan dan lembaga-lembaga pendukungnya ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan sifatnya rahasia agar

⁷⁶. Aman. 2015. *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan: 1945-1998*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

tidak terendus pasukan *NICA* maupun *Poh An Tui*. Masyarakat dan pegawai yang mendengar perpindahan ini turut terpengaruh dan mengambil sikap untuk turut berpindah ke Pematangsiantar sekitarnya. Pematangsiantar seketika itu menjadi kota yang sangat ramai dengan keberadaan para pejuang dan pegawai pemerintahan Provinsi Sumatera beserta para rakyat yang mengungsi dari Medan. Perpindahan massal ini merupakan pengungsian (evakuasi) yang pertama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di provinsi Sumatera⁷⁷.

Letak geografis kota Pematangsiantar sebagai jalur penghubung Sumatera bagian Utara dengan Sumatera bagian selatan, membuatnya strategis dari sisi ekonomi, politis, bahkan pertahanan. Belanda juga melihat letak geografis-strategis ini, sehingga mereka juga menempatkan pasukannya di kota Pematangsiantar selain Medan untuk menguasai wilayah Sumatera Timur. Keberadaan pasukan Belanda/*NICA* yang bermarkas di Siantar Hotel inilah yang kelak memicu pertempuran dengan para pejuang di Pematangsiantar dan Simalungun. Posisi strategis ini juga menjadikan kota Pematangsiantar dipilih menggantikan kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera pada masa awal kemerdekaan. Kota Pematangsiantar ketika itu merupakan terbesar kedua di Sumatera Timur setelah kota Medan. Selain itu dari aspek jarak juga tak terlalu jauh dari Medan, serta aspek keamanan dan perhubungan juga masih efisien sehingga menjadi pertimbangan khusus saat rapat pemutusan pemindahan ibukota Sumatera dari Medan ke kota Pematangsiantar.

⁷⁷. Edisaputra., *Ibid*

Keputusan para pemimpin pemerintahan dan politik memindahkan pusat pemerintahan Sumatera, merubah seketika kota Pematangsiantar menjadi sebuah kota revolusioner. Karena dalam waktu singkat, kota Pematangsiantar menjadi markas pejuang revolusi bersemangat tinggi mempertahankan kemerdekaan. Meskipun suasana kota Pematangsiantar menjadi hiruk pikuk karena setiap sudut kota penuh para pejuang yang berbaur dengan pengungsi dan para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer. Dari kota Pematangsiantar ini pula pada awal revolusi kemerdekaan di Sumatera, strategi perjuangan menghadapi militer Belanda dikendalikan. Dengan berpindahnya ibukota Provinsi Sumatera dari Medan ke Pematangsiantar, semua kegiatan revolusi, baik sipil maupun militer serta partai politik dan badan-badan perjuangan praktis turut berpindah ke Pematangsiantar.

Kota Pematangsiantar yang saat itu juga merupakan ibukota Kabupaten Simalungun dan sebagai kota kedua terbesar setelah Medan di Sumatera Timur, menjadi ibukota Provinsi Sumatera kedua sejak tanggal 6 Februari 1946 - 29 Juli 1947. Menjelang kemerdekaan, yakni pada bulan Juli 1945 kota Pematangsiantar juga tengah mencekam akibat adanya pemberontakan *Gyugun* terhadap tentara Jepang yang dilakukan Kopral Siregar dan Letnan Hopman Sitompul yang merupakan anak buah Mayor Ricardo Siahaan. Namun karena kurang persiapan, aksi mereka ini segera dapat dipatahkan tentara Jepang dan mereka ditahan oleh *Kempetai* Jepang. Mereka baru dibebaskan pada tanggal 26 Agustus 1945, setelah Jepang kalah dan memulangkan para *Gyugun* dan *Heiho*⁷⁸.

⁷⁸. *Ibid*

Menyikapi situasi yang semakin mengkhawatirkan akibat serangan pasukan Belanda/*NICA* tersebut, Presiden Soekarno mengutus Wakil Presiden/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Mohd. Hatta berkunjung ke Sumatera guna mengantisipasi kemungkinan terburuk situasi tersebut. Wakil Presiden Mohd. Hatta beserta rombongan datang berkunjung ke Sumatera mengingat makin buruknya hubungan pemerintah Indonesia dengan Belanda pasca perjanjian Linggarjati. Kedatangan rombongan Mohd. Hatta disebarluaskan ke masyarakat melalui siaran pers dan radio dalam rangka meninjau dan menggembelng rakyat di Sumatera tentang pelaksanaan perjuangan kemerdekaan agar seirama dengan perjuangan kemerdekaan di pulau Jawa sebagai pusat perjuangan. Karena itulah perlu diberikan pengertian kepada segenap lapisan masyarakat tentang tujuan pemerintah atas persetujuan Perjanjian Linggarjati dengan Belanda⁷⁹.

Kunjungan Wakil Presiden, Mohd. Hatta ke kota Pematangsiantar sebagai ibukota Provinsi Sumatera pada ini adalah dalam rangka melakukan konsolidasi politik mempersatukan tekad perjuangan rakyat karena masih adanya ancaman kembalinya Belanda menjajah Indonesia. Saat kunjungan Moh. Hatta, terjadi banyak kesibukan di Kantor Gubernur, Markas TKR, Markas Laskar-laskar Rakyat, Badan Pertahanan Daerah, Biro Perjuangan dan Kantor Bupati Simalungun. Mereka menyerukan ajakan kepada para pemuda untuk segera bergabung dengan tentara republik. Hal ini dilakukan setelah pada tanggal 16 Juli 1947, beberapa hari setelah Mohd. Hatta sampai di kota Pematangsiantar, beliau langsung menggelar rapat dan

⁷⁹. *Ibid*

memberi intruksi, “*Rebut segera kota Medan dari tangan Belanda selambat-lambatnya sebelum hari raya Idul Fitri 1947, kota Medan sudah harus berada di tangan kita*”.⁸⁰ Intruksi spontan ini tercetus, karena Mohd. Hatta melihat semangat meluap-luap dari para tokoh-tokoh perjuangan Sumatera saat rapat. Setelah mendengar intruksi ini, para pemuda dari Tapanuli dan Simalungun datang ke kota Pematangsiantar untuk bergabung bersama kesatuan laskar-laskar rakyat dan juga TKR. Dapur-dapur umum pun segera dibuka dan kaum wanita juga mulai berlatih tentang kepalang-merahan. Tak lama berselang, beberapa hari kemudian, TRI dan Laskar rakyat mengirimkan pasukan ke front Medan Area di Tembung dan Tanjung Morawa.

Dari kota Pematangsiantar pemerintah Provinsi Sumatera mengelola pemerintahan dan merehabilitasi sektor-sektor prioritas seperti masalah kemakmuran, keuangan dan pendidikan. Ketika Badan Pekerja DPR Sumatera memulai tugasnya di Pematangsiantar, banyak perubahan dan perbaikan yang telah mereka lakukan. Di sektor kemakmuran, pemerintah membentuk badan khusus Pengawas Makan Rakyat (PMR) yang tugasnya mengurus ketersediaan makanan agar tidak terjadi kekurangan bahan makanan bagi penduduk. Program ini mendapat kemajuan karena sejak pertengahan 1946, pasokan makanan dan pakaian penduduk mengalami perbaikan. Dewan Kemakmuran Provinsi Sumatera juga dibentuk dengan tugas merancang dan memberikan pertimbangan dalam urusan kemakmuran Sumatera dan juga Dewan Perkebunan yang mengurus berbagai masalah-masalah di perkebunan.

⁸⁰. *Ibid*

Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah memperbanyak penanaman padi dan pembuatan irigasi. Pemerintah juga melakukan pembagian tanah kepada rakyat dan memasukkan barang kebutuhan pokok dari luar dengan sistem barter dengan hasil bumi lainnya. Mendukung percepatan perbaikan ekonomi dan perdagangan, juga dibentuk unit-unit koperasi rakyat. Pada sektor keuangan, hal paling terlihat adalah mengenai pencetakan uang pemerintah. Sampai tahun 1946, pemerintah belum memiliki mata uang resmi. Di Sumatera, uang yang beredar di masyarakat adalah uang Jepang. Banyaknya peredaran uang Jepang menyebabkan merosotnya nilai tukar uang, sebaliknya harga-harga kebutuhan pokok terus melejit.

Perkembangan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera ini dikemukakan Gubernur, Mohd. Hasan pada perayaan ulang tahun pertama Republik Indonesia 17 Agustus 1946 yang diadakan di Lapangan Merdeka Pematangsiantar. Dari sinilah terlihat kemajuan kerja pemerintah dalam upaya membangun kekuatan Republik Indonesia dan memperbaiki kondisi rakyat di Sumatera. Termasuk menempatkan pasukan TRI berada di front terdepan Medan Area. Markas TRK Divisi IV ini kemudian digabung dengan markas TKR Divisi Gajah-II yang bermarkas di Gedung Pancasila Pematangsiantar (sekarang Gedung Juang 45). Dari sinilah berbagai bentuk komando militer bagi front Medan Area sekitarnya dikeluarkan. Bahkan penumpasan gerakan-gerakan separatis dan pemberontak semasa perang kemerdekaan juga dilakukan oleh pasukan TKR Divisi Gajah II dikomando dari tempat ini.

Pemerintah Indonesia semula sangat yakin bahwa Belanda akan mematuhi perjanjian Linggarjati ini. Hal ini dikuatkan oleh Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin

sebelum Belanda melancarkan serangannya ke kota Pematangsiantar, 29 Juli 1947 Belanda telah menyusupkan pasukan bersenjata yang akan memberi bantuan serangan ke Pematangsiantar. Penyusupan ini melalui organisasi *Poh An Tui* Simalungun yang berkedudukan di kota Pematangsiantar dan bertugas memberikan bantuan kepada pasukan Belanda. Mereka diberi intruksi untuk menyerang pasukan Republik Indonesia dari arah berlawanan bila pasukan Belanda memasuki kota Pematangsiantar. Pasukan Belanda memasuki Pematangsiantar melalui jalan Merdeka sekarang, sementara *Poh An Tui* akan memberikan bantuan serangan sejajar jalan Cipto, jalan Sutomo dan jalan Merdeka sekarang. Dengan demikian pasukan republik akan menghadapi dua kekuatan pasukan bersenjata yakni pasukan Belanda dan *Poh An Tui*⁸¹.

Di samping *Poh An Tui*, Belanda juga menempatkan pasukannya yang menyamar sebagai laskar rakyat. Pasukan ini datang pada 29 Juli 1947 dengan menggunakan dua bus umum yang dihiasi spanduk-spanduk berbunyi *Mara ke Medan Area*. Para penumpang terlihat menggunakan atribut lengkap laskar rakyat dengan dril kuning, berhenti di depan setasiun kereta api. Mereka segera menyebar ke sudut-sudut kota Pematangsiantar seperti, Siantar Hotel, dan sepanjang jalan Merdeka hingga ke dekat kantor Gubernur pada 21 Juli 1947 yang telah berhasil menguasai front Medan Area dan daerah sekitarnya. Penguasaan front ini dilakukan dengan cara menjepit pasukan Indonesia dari serangan depan dan belakang. Pasukan Belanda yang berada di Medan melakukan penyerangan dari depan yang kemudian dibantu pasukan mereka yang baru mendarat dari Pantai Cermin. Hal

⁸¹. Ardia Gemala Irawan. *op.cit*

inilah yang juga coba dilakukan pasukan Belanda dalam upaya menguasai kota Pematangsiantar dengan dibantu pasukan *Poh An Tui* dan pasukan yang telah mereka sisipkan.

Serangan Belanda ke kota Pematangsiantar sendiri didahului dengan pengeboman dan penembakan oleh pesawat udara mulai dari sepanjang jalan Tebing Tinggi - Pematangsiantar guna mempermudah pergerakan pasukannya menuju kota Pematangsiantar. Pasukan Belanda yang menuju ke kota Pematangsiantar dipimpin seorang Kapten bernama Van Gelder. Pasukan ini terdiri dari tank-tank ringan dan kendaraan lapis baja. Pasukan Belanda memasuki kota Pematangsiantar pada 29 Juli 1947 sekitar pukul 15.00 dan memulai serangan terhadap sektor - sektor pertahanan pasukan republik. Jumlah kekuatan Belanda terdiri dari 35 tank, 80 truk, 20 jeep, 25 panser dibantu tiga pesawat mustang terasa sangat kuat bagi kekuatan pasukan republik. Hal ini ditambah dengan keberadaan pasukan *Poh An Tui* dan pasukan Belanda yang menyamar mulai ikut menyerang pasukan republik dari belakang membuat mereka terjepit dan terpaksa mundur dari Pematangsiantar. Serangan pasukan Belanda ini menyasar setiap markas pasukan republik dan laskar di setiap sudut kota Pematangsiantar. Bahkan serangan pasukan Belanda ini tidak lagi pandang bulu, rakyat biasa dan orang-orang yang memakai tanda palang merah tetap dibantai⁸².

Pos-pos pasukan republik seperti markas polisi di jalan Sutomo, asrama Barisan Polisi Istimewa di jalan Pamatang, markas Pesindo dan Divisi Panah di jalan Gereja dengan cepat jatuh ketangan Belanda. Selain markas pasukan republik, Belanda juga menyasar jalan-jalan utama sebagai

⁸². *Ibid*

sasaran utama. Hasil dari serangan ini banyak menimbulkan korban jiwa tidak hanya dari pasukan republik tetapi juga rakyat yang tidak berdosa. Serangan Belanda yang berlangsung dalam satu hari itu berhasil melumpuhkan kota Pematangsiantar. Pada sore itu pula ibukota Sumatera resmi jatuh ke tangan Belanda dan para pegawai pemerintahan republik menjadi tawanan pasukan Belanda. Peristiwa serangan ini pun terjadi tanpa diketahui oleh wilayah-wilayah lain seperti di Parapat⁸³.

Meski kota Pematangsiantar jatuh ke tangan Belanda, namun Wakil Presiden, Moh.Hatta bersama Gubernur Mr. Tengku Moh. Hasan rombongan lolos dari sergapan pasukan Belanda. Sebab rombongan Wakil Presiden sudah sempat meninggalkan kota Pematangsiantar menuju Berastagi melalui Saribudolok dan langsung menuju Sibolga sebelum Belanda menguasai kota Pematangsiantar. Pasukan Belanda menyerang kota Pematangsiantar dengan serangan udara sekitar satu jam setelah rombongan Wakil Presiden bergerak menuju Saribudolok. Akibat serangan pasukan Belanda ini, pasukan laskar, pegawai di kantor Gubernur dan rakyat berhamburan mencari tempat perlindungan guna menyelamatkan diri masing-masing.

Hampir semua kendaraan yang melintas di empat jalan raya menuju Tebing Tinggi, Asahan, Saribudolok dan Parapat menjadi sasaran penembakan pasukan udara Belanda. Melihat ganasnya serangan pasukan Belanda yang juga ditambah dengan pasukan darat, pasukan tentara rakyat memilih untuk menghindar. Hanya pasukan Tentara Putera Asia di bawah pimpinan Young Sattar, seorang eks boxer Belanda yang anggotanya terdiri dari orang-orang India

⁸³ . *Ibid*

bekas pasukan Sekutu yang bersimpati ke republik Indonesia sempat menghadang pasukan Belanda di sekitar Pantoan (Ramayana sekarang). Meski jumlah mereka hanya 25 orang, namun karena berpengalaman dalam Perang Dunia II, pasukan Belanda sempat dibuat kewalahan. Tapi akhirnya, mereka dapat dilumpuhkan oleh pasukan Belanda. Rombongan Wakil Presiden sesampainya di Saribudolog, didaulat rakyat setempat untuk memberikan wejangan dan sepanjang jalan rakyat melambai-lambaikan bendera merah putih⁸⁴.

C. Potret Dinamika Kota Pematangsiantar Masa Kini.

1. Menjadi Pusat Ekonomi Daerah *Hiterland*

Sebagai sebuah kota berkembang yang sudah dikenal sejak era kolonial, Pematangsiantar punya cerita menarik yang senantiasa penting untuk ditelisik. Apalagi interaksi sosial, budaya dan politik di kota multikultural yang berpenduduk 264.254 jiwa⁸⁵ dengan kepadatan 3.354 jiwa per Km² ini terbilang amat dinamis. Sejarah terbentuknya kota yang secara kultur merupakan leluhur etnik Simalungun ini juga menyimpan kisah yang tak kalah menarik. Usianya pun sudah tergolong tua jika dihitung dari kesepakatan tentang penetapan hari jadinya, yakni sejak 24 April 1871. Dengan demikian, pada tahun 2022 ini, kota dengan luas wilayah sebesar 79,971 Km², yang terdiri dari 8 kecamatan dan 53 kelurahan ini telah berusia lebih dari 1,5 abad.

Secara geografis kota Pematangsiantar memang berada di tengah-tengah Kabupaten Simalungun, meskipun secara administratif bukan bagian dari Kabupaten Simalungun.

⁸⁴ . Edisaputera. *op.cit*

⁸⁵ . *Pematangsiantar Dalam Angka tahun 2021*. Pematangsiantar: Badan Pusat Statistik.

Berada pada lintasan $3^{\circ} 01' 09''$ - $2^{\circ} 54' 40''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 6' 23''$ - $99^{\circ} 1' 10''$ Bujur Timur, membuat kota ini senantiasa berhawa sejuk. Terletak pada ketinggian rata-rata 400 meter dari permukaan laut (dpl), menyebabkan topografinya terdiri dari dataran yang sebagian landai dengan kemiringan rata-rata 0° - 25° dan sebagian berbukit-bukit. Kondisi ini menyebabkan keadaan tanahnya banyak yang bergelombang, bahkan pada beberapa tempat terdapat banyak tanjakan. Curah hujan di kota ini rata-rata 256 mm/bulan dengan suhu udara rata-rata $24,68^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban udara rata-rata 84,30%. Letaknya sekitar 130 Km dari ibukota propinsi Sumatera Utara (Medan) yang seluruhnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Nagori Karangsari Kecamatan Siantar; sebelah Utara berbatasan dengan Nagori Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok; sebelah Barat berbatasan dengan Nagori Simpang Panei Kecamatan Panei; sebelah Selatan berbatasan dengan Nagori Silampuyang dan Kebun PTPN IV Kecamatan Jorlang Hataran.

Di daerah ini mengalir beberapa sungai seperti sungai Bah Bolon, Bah Sorma, Bah Sigulang-gulang, Bah Kadang, Bah Kanton dan sebagainya. Salah satu diantaranya, yaitu sungai Bah Bolon langsung membelah kota Pematangsiantar. Keseluruhan sungai-sungai tersebut bermuara ke sebelah timur menuju Selat Sumatera. Sungai-sungai ini sangat besar perannya bagi perkembangan daerah ini, baik sebagai tempat pembuangan air limbah dari pusat kota maupun sebagai penampungan air hujan, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir, meskipun musim hujan tiba. Selain itu, keberadaan sungai-sungai tersebut juga dimanfaatkan untuk saluran irigasi persawahan dan tambak

ikan. Selebihnya, air sungai dimanfaatkan penduduk untuk mandi dan mencuci. Selain itu, keberadaan sungai juga dimanfaatkan sebagai pembatas daerah kecamatan atau batas kelurahan.

Wilayah Pematangsiantar merupakan daerah beriklim sejuk, didukung oleh penghijauan yang hampir merata di setiap sudut-sudut kota. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya pohon-pohon rindang dan taman-taman bunga yang tersebar di sejumlah tempat. Penghijauan ini tentunya sangat berfungsi untuk menetralsir peredaran udara agar tetap segar. Untuk tempat rekreasi dan tempat peristirahatan disediakan pula berupa taman bunga. Lokasinya sangat strategis karena persis terletak di jantung kota. Seluruh luas tanah di kota ini sudah dimanfaatkan sesuai fungsinya masing-masing, antara lain: untuk lokasi perkantoran, pemukiman penduduk, pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Sama seperti kota-kota lain di Indonesia, kota Pematangsiantar juga menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan kereta api, jalan raya dan berbagai prasarana pendukung kegiatan masyarakat kota. Unsur-unsur ini menimbulkan dan menopang kegiatan dan kesibukan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi kota Pematangsiantar selain pernah menjadi ibukota Kabupaten Simalungun, juga merupakan pusat perdagangan dan pemasaran serta pendistribusian bagi daerah-daerah pedalaman yang ada di sekitarnya (*hinterland*). Di samping itu fungsi kota Pematangsiantar sebagai pusat pendidikan, industri dan merupakan pintu gerbang atau penunjang pariwisata, sesuai dengan letaknya sebagai pusat lalu lintas antar kabupaten, kota bahkan propinsi, sekaligus juga menjadi kota transit ke daerah-daerah tingkat dua lainnya di Sumatera Utara.

Letaknya yang strategis menyebabkan makin pesatnya pertumbuhan penduduk kota itu sendiri yang berdasarkan tingkat kelahiran lebih besar dari tingkat kematian. Tetapi kondisi itu selebihnya juga disebabkan tingginya tingkat urbanisasi ke kota ini. Banyaknya penduduk dari desa-desa di sekitarnya dengan maksud meneruskan sekolah dan juga mencari lapangan kerja. Walaupun terkadang pekerjaan tidak didapat tetapi mereka masih berpartisipasi dalam kehidupan dan konsumsi kolektif yaitu memanfaatkan lahan-lahan kosong atau setidaknya tinggal bersama kerabat yang ada di kota itu. Meskipun akhirnya mereka akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam proses pembangunan kota.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, kota Pematangsiantar sangat terkait dengan wilayah di sekitarnya, yakni Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Tanah Karo, Batubara, Asahan dan Tebing Tinggi. Sebagai pusat pertumbuhan, kota Pematangsiantar merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, pariwisata dan pendidikan. Sektor perekonomian di kota ini didominasi oleh sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa, bank dan lembaga-lembaga keuangan). Sementara sumbangan sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) relatif kecil. Semakin pesatnya perkembangan pembangunan fisik, kota Pematangsiantar berupaya membangun gedung-gedung dan prasarana publik lainnya. Secara tidak langsung hal ini juga menambah penghasilan masyarakat dalam sektor informal. Para pekerja dengan latar belakang pendidikan yang tidak memungkinkan bekerja di bidang industri dengan keahlian khusus, dapat dimanfaatkan oleh mereka dengan bekerja pada proyek-proyek pembangunan tersebut.

Sementara, berkembangnya industri-industri yang sekaligus menjadi *instrumen* yang harus mampu mentransformasikan sektor-sektor lainnya dalam mendukung sektor industri itu merupakan motor penggerak utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya memperluas kesempatan kerja bagi penduduk Kota Pematangsiantar. Keberadaan perusahaan-perusahaan dan industri-industri tersebut merupakan salah satu alternatif bagi pemecahan masalah ketenagakerjaan. Dimana jumlah tenaga kerja yang mampu diserap terus meningkat. Hal ini disebabkan majunya pengembangan dalam bidang perdagangan, pariwisata dan jasa guna mendukung sektor industri tersebut.

Pengembangan dan perluasan kota Pematangsiantar pada tahun 1986 telah mengambil sebagian wilayah Kabupaten Simalungun yang sebelumnya merupakan lahan pertanian yang produktif, maka sebagian besar penduduknya di daerah perluasan tersebut bermata pencaharian sebagai petani, terutama mereka yang berada di Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Marihat. Namun dalam proses selanjutnya penduduk yang berpotensi sebagai petani itu makin berkurang dari tahun ke tahun sebagai akibat pemekaran kota karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan tempat tinggal dan juga banyaknya petani yang beralih profesi menjadi pedagang atau bekerja pada sektor jasa dan industri dengan menjual lahan pertanian yang dimilikinya. Sebagian masyarakat kota Pematangsiantar juga telah memanfaatkan atau bekerja dalam bidang jasa pengangkutan. Banyak tenaga kerja yang dapat diserap dibidang ini karena fungsi pengangkutan itu sangat diperlukan dalam menunjang perkembangan dan kegiatan kota. Arus perdagangan juga makin lancar, di mana distribusi

perdagangan dari dan luar kota bisa berjalan lancar dengan dibukanya jalur transportasi dan prasarana infrastruktur penunjang lainnya.

2. Kota Multikultural Etnik dan Agama

Kota Pematangsiantar merupakan ciri kota yang heterogen (pluralis), baik dilihat dari keragaman etnis maupun agama. Keberagaman agama tersebut mutlak dipertimbangkan dalam setiap merumuskan program pembangunan dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan dan terutama kerukunan antar umat beragama serta kerjasama antar etnis. Interaksi sosial antar-etnis yang *pluralis* dan toleransi antar umat beragama di kota Pematangsiantar sejak lama telah terbina dengan baik. Masyarakat kota Pematangsiantar merupakan masyarakat yang bersifat terbuka, toleran dan memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Masalah tingginya toleransi antar umat beragama ini dengan mudah dapat dilihat dengan pembauran sesama pemeluk agama yang selama ini telah berlangsung dengan baik.

Pengaruh kehidupan antar umat beragama makin kompleks dengan adanya pusat-pusat studi, baik perguruan dasar menengah maupun perguruan tinggi yang bercorak agama di kota Pematangsiantar sekitarnya. Untuk studi pendidikan tinggi berbasis agama, di kota ini terdapat Sekolah Tinggi Teologia Huria Kristen Batak Protestan (STT-HKBP) dan Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar di Jalan Sangnawaluh; Sekolah Tinggi Teologia (STT) Advent Surya Nusantara di Jalan Rakutta Sembiring; Sekolah Tinggi Teologia dan Sekolah Alkitab Pentakosta di Jalan Sang Naualuh; Fakultas Filsafat dan Teologia Universitas Santo Thomas di Jalan Medan; Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Jalan Asahan; Sekolah Tinggi

Agama Islam (STAI) Samora di Jalan Kavileri serta Sekolah Tinggi Teologia (STT) Renatus di Jalan Asahan.

Kondisi ini menunjukkan betapa strategisnya kota Pematangsiantar dalam rangka membangun dan membina kerukunan antar umat beragama. Karena di kota ini banyak dilahirkan orang-orang yang menjadi pemimpin bagi kehidupan umat beragama. Oleh karena itulah amat wajar jika kota Pematangsiantar pada tahun 2016 mendapat predikat kota paling toleran di Indonesia berdasarkan hasil survey *Setara Institute*. Sayangnya untuk tahun 2022 ini derajat toleransinya tampak semakin menurun, sehingga kota Pematangsiantar tak masuk lagi dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia. Meski demikian, di tengah interaksi sosial penduduk sangat multietnik, potensi konflik antar umat beragama maupun antara etnik sangat kecil kemungkinannya terjadi di kota Pematangsiantar karena kuatnya kesadaran bertoleransi sesama penduduk.

Di kota Pematangsiantar juga terdapat sejumlah pusat sinode denominasi gereja-gereja, antara lain: Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Jalan Pdt.J.Wismar Saragih; Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Jalan Kapten.MH.Sitorus; Huria Kristen Indonesia (HKI) di Jalan Melanton Siregar; Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) di Jalan Sisingamangaraja; Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Asahan; Gereja Pentakosta (GP) di Jalan Lingga; Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara (GKISU) di Jalan Gunung Simanukmanuk; dan Gereja Bethel Rohul Kudus (GBRK) di Jalan Cornel Simanjuntak. Selebihnya, meskipun tidak berkantor pusat di kota Pematangsiantar, gereja HKBP, Katolik dan Advent juga memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembangunan bidang keagamaan di kota ini. Karena beberapa pusat unit pelayanannya berada di Kota

Pematangsiantar, meskipun pusat pelayanannya tidak terletak di kota ini. Tetapi paling tidak, peranannya masih dapat mempengaruhi tatanan kehidupan dan interaksi sesama anggota gereja lainya.

Dari aspek sosial budaya, perkembangan peradaban di kota Pematangsiantar amat kompleks. Hal ini mengandung pengertian sangat luas, yang meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum dan adat-istiadat (kebiasaan) serta pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Dalam perwujudannya, kebudayaan tersebut paling tidak memiliki tiga wujud, *pertama*: wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*: wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam bermasyarakat; dan *ketiga*: wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dengan demikian berarti kebudayaan tersebut berasal atau bersumber dari segi biologis, lingkungan, psikologis dan komponen sejarah eksistensi manusia yang mempunyai struktur, bersifat dinamis, mempunyai variabel, memperlihatkan keteraturan dan dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai aspek, yang pada akhirnya membuat kebudayaan tersebut dapat dipelajari. Adat istiadat dapat diartikan dengan kebiasaan-kebiasaan lazim yang telah ada sejak dahulu kala yang dibuat sebagai aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat yang datang secara berulang-ulang dan sudah tersebar luas. Kelaziman dan kebiasaan ini dijalankan dalam irama alam yang kepadanya terikat yang mencakup seluruh kehidupan suatu suku bangsa.

Bertitik tolak dari pemahaman-pemahaman di atas, kebudayaan dan adat istiadat tersebut, secara langsung juga telah ada sejak dahulu di kota Pematangsiantar. Karena dari pengertiannya, adat-istiadat merupakan sebuah kebiasaan yang berulang-ulang sehingga menjadi aturan dalam masyarakat, dengan mudah dapat dilihat dalam pola hidup masyarakat. Kehidupan pluralitas di kota Pematangsiantar terlihat dari beragamnya etnik yang mendiaminya antara lain: Simalungun, Toba, Jawa, Karo, Mandailing, Tionghoa, Minang, Melayu, Pakpak, Nias dan sejumlah etnis lain. Dari segi wujudnya, implementasi nilai-nilai budaya dan adat – istiadat tersebut bukanlah sesuatu hal baru. Karena sudah jelas, dari sejak dahulu telah ada norma-norma, menurut pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai penata tingkah laku manusia.

3. Komitmen Merealisasikan *Sapangambe* *Manoktok Hitei*

Dalam kesehariannya, masyarakat etnik Simalungun sebagai tuan rumah sekaligus adalah etnik leluhur asli di kota Pematangsiantar. Meskipun terkontaminasi dinamika perubahan sosial, teknologi, informasi dan pengetahuan lainnya ditambah dengan masuknya budaya-budaya lain, masih tetap mampu mempertahankan pola-pola hidup teratur dan selaras dengan falsafah *Habonaron do Bona*. Falsafah ini berisikan nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kebenaran yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang multietnik. Sebagai tuan rumah (*suhut*) di kota Pematangsiantar, sudah sepatutnya semua etnik yang mendiami wilayah ini bersama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai luhur budaya Simalungun yang termaktub dalam motto *Sapangambe*

Manoktok Hitei untuk membangun kehidupan masyarakat multikultural yang harmoni.

Secara harfiah, *Sapangambe* *Manoktok Hitei* dapat diartikan, “Bersama-sama (bergotong-royong/ bahu-membahu) membangun sebuah jembatan. Ungkapan ini merupakan nilai luhur etnik Simalungun yang sudah sejak lama bertumbuh, berkembang dan digunakan sebagai falsafah hidup masyarakat kota Pematangsiantar. Makna lainnya adalah tentang kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong dan senantiasa bersosialisasi sesama warga masyarakat. Namun tentunya, perlu rumusan lebih tegas, lugas dan jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir di tengah masyarakat tentang pengertian atau makna *Sapangambe* *Manoktok Hitei*. Apalagi warga kota Pematangsiantar terdiri dari beragam etnik yang hidup berdampingan secara harmoni⁸⁶.

Sayangnya, meski secara *de facto*, falsafah *Sapangambe* *Manoktok Hitei* telah digunakan sejak lama dalam kehidupan masyarakat kota Pematangsiantar, namun belum pernah ada secara legal formal dijadikan sebagai motto resmi yang tercantum dalam Lambang Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar, padahal usia kota Pematangsiantar sendiri sudah lebih 1,5 abad pada tahun 2022. Penyebabnya, karena belum ada aturan hukum (Peraturan Daerah) yang mengikatnya secara legal formal. Akibatnya selama ini nilai-nilai dan makna *Sapangambe* *Manoktok Hitei* belum terkristalisasi secara masif, apalagi menjadi nilai hidup masyarakat secara umum. Hal ini dampak minimnya sosialisasi termasuk melalui publikasi secara luas, termasuk

⁸⁶. Marulam MT Simarmata, dkk. 2021. *Quo Vadis Sapangambe* *Manoktok Hitei? Patung Motto Pematangsiantar*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

oleh Pemerintah dan DPRD kota Pematangsiantar serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

Oleh karena itulah, pada hari Selasa 20 April 2021 di Universitas Simalungun digelar *focus group discussion (FDG)* membahas pentingnya legalitas formal motto kota Pematangsiantar segera di-Perda-kan. *FDG* ini menghadirkan nara sumber dari kalangan akademisi, sosiolog, birokrat, budayawan, wakil rakyat (politisi), lembaga pemangku adat, organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan bahkan perwakilan jurnalis. Dibutuhkan komitmen bersama dalam rangka menghormati dan memuliakan (*patunggun*) *Sapangambe* *Manoktok Hitei* dalam rangka membangun perspektif masyarakat yang terinternalisasi, sekaligus membentuk karakter warga kota Pematangsiantar yang menghormati kearifan lokal (*local wisdom*).

Dalam rangka itu pula, dibutuhkan ruang publik yang inklusif untuk memberi wadah kontribusi pemikiran ketika merencanakan pembangunan berbasis wilayah. Dengan demikian, kultur lokal dapat terakomodir melalui partisipatif yang komunikatif dengan melibatkan aktor mitra setara bersama elemen masyarakat (*bottom up planning*). Perencanaan Tata Ruang kota Pematangsiantar juga harus berlandaskan *Sapangambe* *Manoktok Hitei* sehingga dalam rangka membangun kota yang multi etnik, senantiasa mengedepankan ciri khas ornamen atau arsitektur Simalungun sebagai bentuk *patunggun* terhadap kearifan lokal pada bangunan-bangunan pemerintah/ swasta/ perkantoran serta ruang-ruang publik lainnya.

Harus diakui selama ini kebijakan strategis dalam rangka melestarikan nilai-nilai luhur budaya lokal, terutama mendekati pemaknaan *Sapangambe* *Manoktok Hitei*

tengah masyarakat belum banyak dilakukan. Terbukti banyak masyarakat yang tidak tahu makna *Sapangambei Manoktok Hitei* maupun aspek-aspek budaya Simalungun lainnya. Namun mereka tidak tahu ke mana tempat bertanya yang formal, representatif serta dikenal luas oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan secara kontinyu kepada generasi muda, misalnya lewat pemberlakuan muatan lokal kepada anak-anak sekolah maupun sosialisasi berkesinambungan melalui media arus utama.

DPRD Kotamadya Pematangsiantar melalui SK No. 12/DPRD/X/1992 sudah pernah menyetujui agar motto *Sapangambei Manoktok Hitei* dicantumkan dalam Lambang Daerah Kotamadya Pematangsiantar. Melalui Perda Nomor 22 Tahun 1995, Pemerintah Kotamadya Pematangsiantar sudah pernah menyempurnakan Logo Daerah yang telah digunakan sejak tahun 1963 (Perda No. 8/Dprdgr/1963) namun tak kunjung rampung. Walikota Pematangsiantar periode 2010-2015, Hulman Sitorus, SE sempat menerbitkan SK No. 800/226/III/Wk-Tahun 2012 tentang Penataletakan motto *Sapangambei Manoktok Hitei* dalam Lambang Daerah yang disempurnakan kembali tahun 2015. Pada tahun 2020 lalu, Pemerintah kota Pematangsiantar telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lambang Daerah kepada DPRD, dan telah disetujui untuk dilengkapi dengan naskah akademik. Semoga Pemerintah kota dan DPRD Pematangsiantar dapat segera merampungkan pembahasan Ranperda tentang Lambang Daerah Kota Pematangsiantar, di mana di dalamnya mencantumkan motto *Sapangambei Manoktok Hitei* dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang legalitas penggunaannya, baik di lembaga pemerintahan, lembaga politik, lembaga swasta,

elemen publik maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, penggunaannya tidak menimbulkan multitafsir yang beragam bahkan tak terkendali di tengah masyarakat sekaligus menjadikannya sebagai warisan nilai luhur bagi setiap generasi⁸⁷.

⁸⁷. *Ibid*

BAB III

FENOMENA SITUS SEJARAH, WARISAN TEMPOE DOELOE, POTENSI DESTINASI DAN EDUKASI HISTORIS DI KOTA PEMATANGSIANTAR

A. Pengantar

Menghadirkan masa lalu (*tempoe doeloe*) dalam konteks masa kini acap kali memunculkan polemik. Sebab masih banyak yang beranggapan, untuk apa mengingat-ingat masa lalu, sebab bukankah lebih penting memikirkan dan merancang masa depan? Sebaliknya, tak kalah banyak pula yang berpandangan bahwa mengetahui sejarah masa lalu itu penting. Setidaknya, sebagai cermin untuk melihat kondisi kekinian sekaligus pula menjadi bahan pertimbangan saat merencanakan proyeksi ke masa depan.

Tentu dengan asumsi, bahwa apa yang buruk di masa lalu bisa jadi pembelajaran untuk tidak terulang. Sedangkan hal-hal yang baik di masa lalu tentu tidak salah pula untuk dilanjutkan atau dikembangkan dalam versi kekinian. Sebagaimana diketahui, bahwa sejarah sudah ada dan hadir sejak awal kehidupan manusia itu sendiri. Hanya saja, yang perlu dipikirkan, bagaimana menggali dan merekonstruksi sejarah masa silam agar bermanfaat bagi kemajuan peradaban, secara khusus perkembangan ilmu pengetahuan yang harus dilihat dari berbagai sudut pandang.

Tak bisa dipungkiri, di tengah kemajuan teknologi saat ini, eksistensi sejarah sebagai sebuah ilmu pengetahuan senantiasa mendapat ruang yang cukup besar. Terbukti, karya-karya sejarah makin banyak berseliweran di kanal-kanal media sosial, baik *youtube*, *facebook*, *instagram* dan lain-lain. Fenomena ini membuktikan, bahwa publik kian menyadari jika konteks kekinian tidak pernah lepas dari proses di masa lalu. Termasuk pesatnya perkembangan teknologi dalam memudahkan aktivitas manusia sangat penting diketahui.

Berangkat dari pemahaman itulah, kami mencoba menghadirkan buku sederhana ini dalam rangka menelusuri dan menelisik sekilas perkembangan kota Pematangsiantar di masa lalu, terutama di era kolonial. Apalagi saat itulah perkembangan kota Pematangsiantar mengalami titik balik dari awalnya hanya perkampungan tradisional, berubah menjadi sebuah kota modern yang dirancang mengadopsi gaya Eropa. Tinggalan sejarahnya juga masih banyak yang bisa dinikmati hingga saat ini. Dari sejumlah warisan sejarah ini setidaknya dapat diperoleh sekilas gambaran perkembangan kota Pematangsiantar dari era kerajaan, era pemerintahan kolonial Belanda sampai pasca kemerdekaan.

Apalagi Pematangsiantar merupakan wilayah penting di era kolonial, sehingga wajar jika banyak infrastruktur maupun fasilitas publik dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun kebijakan tersebut adalah dalam rangka mendukung eksploitasi ekonomi kolonial Belanda. Dimana sokongan utamanya adalah devisa dari bisnis perkebunan yang lahannya didapatkan dengan memperdaya Raja-raja di Simalungun, termasuk Raja Siantar.

Pemerintah kolonial Belanda sejak awal tampaknya sudah memiliki pemahaman bahwa kerajaan-kerajaan di

Nusantara punya model serupa dalam menjalankan politik kekuasaannya. Bahwa banyak keturunan keluarga maupun kerabat kerajaan yang ambisi menjadi penguasa, padahal tidak memenuhi syarat, merupakan realitas yang sulit dibantah ketika itu. Sebab secara tradisi turun-temurun, orang yang berhak menjadi raja adalah putra mahkota yang dilahirkan seorang permaisuri. Tetapi jamak terjadi bahwa putera raja dari istri-istri lainnya merasa berhak juga mewarisi tahta kerajaan.

Fenomena ini dimanfaatkan Belanda untuk memecah belah keturunan maupun kerabat kerajaan. Tentu dalam rangka melanggengkan ambisi mereka untuk menjadi penguasa di atas kekuasaan raja-raja tradisional. Kebijakan ini juga dilakukan Belanda terhadap Kerajaan Siantar setelah Sang Nauluh selaku pewaris Kerajaan Siantar yang resmi dan berdaulat, tak bisa mereka ajak berkompromi.

Mereka yang tadinya bukan pewaris utama kerajaan, mereka angkat jadi raja namun dengan syarat tunduk pada pemerintah kolonial Belanda. Dengan beragam cara, Belanda akhirnya dapat menyingkirkan Raja Sang Nauluh dan sejak itulah pemerintah kolonial melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas perkotaan secara besar-besaran, sekaligus mendesain Pematangsiantar menjadi sebuah kota modern ala Eropa.

Sejumlah peninggalan era kolonial tersebut sebagian masih utuh dan dipergunakan namun sebagian diantaranya telah diganti dengan bangunan baru, selaras dengan perkembangan sebuah kota dengan modernisasi yang tak mungkin bisa dihempang. Namun setidaknya, dari peninggalan-peninggalan yang tersisa, kita bisa menerawang serta menelisik bagaimana strategi pemerintah kolonial melakukan pengembangan di kota Pematangsiantar. Dari

sana tentu ada banyak hal yang bisa dipetik untuk jadi pembelajaran yang lebih baik ke depannya.

Banyak peninggalan-peninggalan era kolonial Belanda yang bisa ditelisik untuk jadi bahan refleksi kita dalam memandang masa kini dan masa depan yang lebih baik. Tentunya, banyak hal positif dari sebuah perubahan peradaban kota tak salah kita adopsi dan hal negatif yang turut menyertai perubahan dimaksud bisa menjadi refleksi dan perenungan agar tidak terulang atau bisa jadi perbaikan dan antisipasi.

Meski tidak mungkin bisa menyanggah secara menyeluruh pembangunan yang dilakukan pemerintah kolonial, namun setidaknya bisa mewakili perkembangan pembangunan dari sejumlah aspek, misalnya politik pemerintahan, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan religi, serta pendidikan.

Melalui warisan sejarah tersebut, kita dapat melihat bagaimana kota Pematangsiantar didisain dan dibangun di masa lalu dan seperti apa ke depannya kita akan melakukan pembenahan. Selain itu, secara khusus juga diharapkan agar pembaca bisa melihat peluang-peluang atau potensi-potensi warisan sejarah ini yang dapat dijadikan destinasi wisata sekaligus edukasi sejarah bagi lintas generasi.

Generasi bangsa ini perlu diberi pembelajaran tentang sejarah peristiwa di masa lalu dalam rangka membangun karakter kebangsaannya agar dapat mempersiapkan diri memproyeksikan masa depannya. Setidaknya, generasi saat ini dapat melihat kenyataan bahwa perubahan senantiasa sesuai dengan jiwa zaman di mana sebuah masa tengah berlangsung.



*Penataan kota Pematangsiantar dilihat dari foto udara tahun 1938
(foto: kitlv.nl)*

Keterangan Gambar:

1. Kantor *Gemeente*
2. *Esplanade* (Lapangan Merdeka)
3. Gedung *Simeloengoen Club*
4. Jalan Diponegoro
5. Kawasan Siantar Hotel
6. Jalan Sutomo
7. Pasar Horas
8. *DSM Spoorwegstation* (Stasiun Kereta Api)
9. Sungai Bah Bolon (kawasan Pabrik Es)

B. Pusat Kerajaan dan Pemerintahan

1. Istana Kerajaan Siantar

Kompleks bekas Istana Kerajaan Siantar berada di Kelurahan Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, persis berada di tepian Sungai Bah Bolon. Lokasi bersejarah itu sekarang sudah jauh berubah fungsi, akibat kian padatnya pemukiman penduduk setempat. Sebagian lokasinya masih menjadi kawasan Pabrik Es Siantar yang tetap memproduksi minuman khas Siantar cap 'Badak' serta kolam renang yang dikelola PT. Detis Sari Indah. Sedangkan sebagian lahan merupakan kompleks pemakaman leluhur maupun kerabat Kerajaan Siantar beserta keturunannya.

Sejumlah bukti sejarah yang menunjukkan jika di lokasi tersebut pernah berdiri Istana Kerajaan Siantar masih jelas terlihat, meski sudah jauh dari kesan megahnya sebuah istana. Gedung Pesanggarahan, sebagai tempat para raja menerima tamu-tamu penting kerajaan, termasuk para pejabat kolonial maupun tuan-tuan kebon masih berdiri kokoh. Demikian juga lokasi pemandian raja yang di era kolonial telah dibangun sebagai kolam renang yang sumber airnya masih tetap berasal dari sungai Bah Bolon. Kolam renang ini semula adalah bagian dari Istana Kerajaan Siantar namun sekarang telah dikelola oleh pengusaha PT. Detis Sari Indah.

Lokasi pemakaman Raja-raja Siantar juga sebagian telah digusur oleh pemerintah kolonial Belanda dan di atasnya dibangun Pabrik Es yang masih berdiri hingga sekarang. Penggusuran ini sekaligus pula turut menghilangkan benda-benda bersejarah serta pusaka-pusaka kerajaan, termasuk patung-patung kuno peninggalan Kerajaan Nagur sebagai cikal bakal berdirinya Kerajaan Siantar.

Sementara bangunan *rumah bolon* sebagai istana utama Kerajaan Siantar, telah hangus terbakar pada tahun 1919 di era kolonial. Sebagai gantinya, Belanda membangun sebuah rumah kediaman raja yang dibuat dari beton cor, sehingga lebih dikenal dengan 'rumah batu' yang sampai sekarang masih berdiri meski kondisinya sudah memprihatinkan karena tak berpenghuni lagi.



*Rumah bolon Kerajaan Siantar di Pematang, terbakar tahun 1919
(foto: kitlv.nl)*



*Suasana di kediaman Pemangku Raja Siantar, Tuan Sawadim Damanik di Pematang saat penganugerahan satya lencana kesetiaan dari pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1935.
(foto: kitlv.nl)*

Persis di tengah pelataran parkir kolam renang Detis Sari Indah, terdapat *Jerat Partongah* Kerajaan Siantar, yang diresmikan oleh keturunan keluarga kerajaan pada tanggal 29 Mei 1982. Setiap tahun, khususnya sebagai rangkaian memperingati Hari Jadi Kota Pematangsiantar pada tanggal 24 April, di lokasi ini kerap digelar acara ziarah oleh Pemerintah dan DPRD kota Pematangsiantar bersama keluarga Kerajaan Siantar serta masyarakat sekitarnya.

Raja Sang Naualuh yang merupakan salah satu raja dari penguasa Kerajaan Siantar, pada akhir pemerintahannya ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan diasingkan ke Bengkalis, sampai akhir hayatnya berada dalam status pengasingan. Sang Naualuh mangkat dan dimakamkan di tengah kota Bengkalis, persisnya di Jalan Bantam. Makam tersebut oleh penduduk setempat sangat dihormati dan dianggap sebagai makam “Raja Batak”⁸⁸.



Jerat Partongah Kerajaan Siantar di Pamatang (foto/dok.jal)

⁸⁸ Jahutar Damanik. 1981. *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia*. Bina Budaya Simalungun, Medan.

Persis di bagian depan *Jerat Partongah* Kerajaan Siantar ada sebuah prasasti yang bertuliskan tentang riwayat singkat Raja Sang Naualuh, sehingga setiap orang yang datang ke lokasi ini dapat memahami secara singkat tentang Raja Sang Naualuh sejak lahir tahun 1857 hingga kematiannya tahun 1914.



*Prasasti riwayat singkat Raja Sang Naualuh Damanik
(foto/dok.jal)*

Selain prasasti, dalam rangka mengingatkan memori kolektif setiap pengunjung pada Raja Sang Naualuh, dibuat relief yang menggambarkan tentang aktivitas raja bersama

rakyat Kerajaan Siantar yang terletak di pintu masuk kompleks istana. Tak jauh dari kompleks pemakaman leluhur keluarga kerajaan, terdapat sebuah rumah lama yang dibangun pada era kolonial. Gaya arsitekturnya juga masih mencerminkan model bangunan kolonial



Relief yang menggambarkan ragam aktivitas raja dan rakyat Kerajaan Siantar di masa lalu. (foto/dok.jal)



Bekas kediaman Raja Siantar di komplek Pamatang yang sudah tidak digunakan lagi. (foto/dok.jal)



*Pesanggarahan Raja-raja Siantar di istana Pematang.
(foto:kitlv.nl)*



*Bekas pesanggarahan Raja-raja Siantar kondisi saat ini yang baru
direnovasi. (foto/dok.jal)*



Lokasi pemandian Raja-raja Siantar yang sekarang telah berubah menjadi kolam renang Detis Sari Indah. (foto/dok.jal)



Tugu peringatan penumpasan G.30.S/PKI di kompleks Istana Raja Siantar di Pematang. (foto/dok.jal)

Masih di kompleks bekas Istana Raja Siantar, juga terdapat sebuah pesanggarahan, yang konon pernah digunakan sebagai tempat peristirahatan para raja dan kerabatnya. Letak bangunannya persis di bagian depan *Jerat Partongah* kompleks Pematang, yang dipisahkan oleh badan jalan. Tak banyak lagi tanda- tanda yang dapat memperlihatkan bahwa pesanggarahan tersebut pernah menjadi bagian dari Istana Raja Siantar. Karena konstruksi bangunannya pun hanya berbentuk persegi empat dengan pasangan batu bata biasa meski masih konstruksi gaya Eropa dengan pasangan bata berlapis.

Tak jauh dari lokasi *Jerat Partongah* tersebut juga terdapat sebuah tugu peringatan penumpasan peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G.30.S/PKI) beserta antek- anteknya yang ada di wilayah Siantar dan Simalungun. Konstruksi bangunannya berbentuk pasangan batu masif berlapis marmer hitam persegi lima dengan lambang bintang lima pada bagian atasnya yang berwarna kuning emas.

Derasnya aliran sungai Bah Bolon juga membuat pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik dan saluran irigasi persawahan di masa lalu. Aliran sungai kemudian dibendung untuk kepentingan Pabrik Es dan saluran irigasi. Terdapat sebanyak 8 (delapan) buah pintu air yang dibangun sekitar tahun 1922. Fungsinya untuk mengatur aliran sungai Bah Bolon. Sampai sekarang, sebagian pintu air tersebut masih dimanfaatkan warga sekitar untuk mengatur aliran lain sungai.



Salah satu pintu air sungai Bah Bolon di Pematang yang dibangun pada era kolonial Belanda sampai sekarang masih berfungsi. (foto/dok.jal)

2. Gedung Balai Kota

Gedung pusat pemerintahan *burgermeister* (Walikota) Pematangsiantar yang terletak di Jalan Merdeka, merupakan salah satu peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang hingga kini masih terawat dengan baik. Fungsinya pun masih sama, yakni sebagai pusat pemerintahan meski dalam konteks yang berbeda. Dari sebuah prasasti berbahasa Belanda yang terdapat di dinding dekat pintu utama sebelah kanan jalan masuk, dapat diketahui bahwa bangunan ini didirikan pada tahun 1920, persisnya tanggal 2 Januari 1920. Selengkapnya inskripsi tersebut bertuliskan: *“DE EERSTE STEEN GELEGD OP DEN 2 JANUARI 1920. J. TIDEMAN VOORZITTER VAN DEN GEMEENTERAAD PEMATANG - SIANTAR”*. Pada bagian kiri sejajar pintu terdapat lobang persegi empat memanjang, tempat memasukkan surat, bertuliskan *“BRIEVEN”*. Gedung bersejarah ini juga pernah

dijadikan sebagai Kantor Gubernur Sumatera, yang pada waktu itu dijabat oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan, sejak 6 Pebruari sampai 29 Juli 1947.



Gedung Gemeenthuis Siantar sekitar tahun 1925. (foto: kitlv.nl)



Kantor Wali Kota Pematangsiantar Jalan Merdeka kondisi sekarang. (foto/dok.jal)

Pasca pemisahan Kabupaten Simalungun dengan Kotamadya Pematangsiantar, sudah sebanyak 19 Walikota berkantor di gedung ini. Mereka adalah: OKH Salamuddin (1956-1957); Jamaluddin Tambunan (1957-1959); Rakoetta Sembiring (1960-1964); Abner Situmorang (1964); Pandak Tarigan (1965); Zainuddin Hasan (1965); Tarif Siregar (1965-1966); Drs M Pardede (1966-1968); Letkol Laurimba Saragih (1968-1974); Kolonel Sanggup Ketaren (1974-1979); Kolonel Drs MJT Sihotang (1979-1984); Drs Djabanten Damanik (1984-1989); Drs H Zulkifli Harahap (1989-1994); Drs Abu Hanifah (1994- 1999); Drs Marim Purba/Ir Kurnia Rajasyah Saragih (2000-2005); Ir RE Siahaan/Drs Imal Raya Harahap (2005-2010); Hulman Sitorus SE/Drs. Koni Ismail Siregar (2010-2015); Dr. Hefriansyah, SE.,MM/Togar Sitorus SE.,MM (2017-2022) dan saat ini Wali Kota Pematangsiantar tengah dijabat oleh dr. Susanti Dewayani, Sp.A (2022-2027).

Bangunan berlantai dua ini, sampai sekarang tak kalah model, unik dan tampak antik jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan berarsitektur modern lainnya yang ada di kota Pematangsiantar. Pada bagian atas bangunan, terdapat kubah yang ditopang dengan tower kecil dengan bersisi empat, enam dan delapan yang dilengkapi dengan bendera penunjuk arah mata angin serta jam dinding ukuran besar di keempat sisinya.

Tangga menuju lantai dua terbuat dari kayu yang disusun berlipat. Dindingnya yang sangat tebal terbuat dari susunan batu bata berlapis. Pada beberapa bagian tampaknya bagian dalam gedung ini sudah banyak yang mengalami perbaikan maupun perubahan, namun konstruksi utamanya tetap dipertahankan.

Sebagai salah satu bukti adanya pemerintahan otonomi daerah di Pematangsiantar berbentuk kota praja

(*gemeente*) pada tanggal 1 Juli 1917 sudah sewajarnya gedung peninggalan era kolonial Belanda ini dijadikan sebagai cagar budaya sehingga warisan sejarah di pusat kota Pematangsiantar bisa senantiasa menjadi ingatan atau memori kolektif bagi masyarakat.



Kediaman asisten residen sekitar tahun 1935 yang sekarang menjadi rumah dinas Walikota Pematangsiantar. (foto:kitlv/nl)

3. Gedung Bank Rakyat Indonesia



Gedung De Javasche Bank saat dibangun tahun 1923. (foto: kitlv.nl)



Kondisi sekarang gedung BRI di persimpangan Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman. (foto/dok.jal)

Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terletak di Jalan Merdeka, merupakan bangunan warisan pemerintah kolonial Belanda, yang pembangunannya diperkirakan tidak jauh terpaut waktunya dengan pembangunan gedung Balai Kota yang ada di sebelahnya serta Gedung Pengadilan Negeri Pematangsiantar terletak persis di belakangnya.

Awalnya, bangunan bergaya arsitektur Eropa ini, digunakan sebagai gedung *De Javasche Bank* Pematangsiantar yang merupakan bank sentral pemerintah Hindia Belanda sampai menjelang kedatangan Jepang tahun 1942. Namun pasca kemerdekaan Republik Indonesia, gedung ini difungsikan sebagai gedung Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN). Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri, pertama kali didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi).

Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Jika diamati sepintas, konstruksinya mirip dengan gedung Balai Kota, meskipun detailnya tak seindah gedung Balai Kota. Hal ini juga membuktikan bahwa gedung tersebut masih memiliki kaitan dengan Balai Kota pada zaman Kolonial Belanda, sebagai penunjang aktivitas pemerintahan.

Pada bagian puncak gedung, tampak perbedaan yang mencolok, yakni bentuk kubah penutupnya. Bagian puncak Gedung BRI tidak menggunakan bentuk kubah tetapi persegi empat biasa dengan atas juga persegi tanpa penunjuk arah mata angin dan jam dinding.

4. Gedung Juang 1945 (Gedung Nasional)

Gedung Juang 1945 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Nasional ini terletak di Jalan Merdeka, tak jauh dari Kantor depan Kantor Wali Kota Pematangsiantar. Era kolonial Belanda, gedung ini merupakan tempat beristirahat orang-orang Eropa yang bekerja sebagai pejabat-pejabat di perkebunan yang ada di sekeliling Kota Pematangsiantar dan Simalungun. Lokasi ini juga dijadikan sebagai tempat bersantai, berlibur, makan-minum serta berdansa yang dikenal dengan nama *Simeloengoen Club*



Gedung Simeloengoen Club era kolonial Belanda, sampai sekarang masih utuh (foto: kitlv.nl)



Kondisi sekarang Gedung Juang 1945 atau Gedung Nasional di Jalan Merdeka. (foto.dok/jal)

Secara fisik, konstruksi utama Gedung Juang 1945 menggunakan fondasi bangunan masif (padat) dengan susunan batu bata berlapis beratap genteng. Sebagian besar bangunan sudah mulai tampak rusak dan retak karena tidak adanya pemeliharaan yang memadai. Dari inskripsi yang ada di bagian pintu depan, gedung ini pernah direnovasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Simalungun pada tahun 1971 semasa Bupati Simalungun dijabat Radjamin Poerba, SH.

Renovasi yang merupakan perbaikan berat ini juga melibatkan dekorator, Djaiman Saragih mewakili Budayawan serta Pelaksananya, OE. Tambunan. Tetapi pada masa revolusi fisik antara tahun 1945-1949, gedung ini pernah dijadikan sebagai markas Divisi IV, Divisi Gajah dan Divisi X. Gedung ini sebagian sempat dikelola oleh Manajemen Siantar Hotel sebagai bar, pub dan restoran. Sedangkan sebagian lagi

dikelola oleh Dewan Harian Angkatan 45, Legium Veteran Republik Indonesia. Sayangnya, kondisinya sekarang tampak tidak terawat setelah pihak Siantar Hotel tidak lagi mengelolanya sebagai unit usahanya.

Untuk mengenang peristiwa revolusi fisik tersebut, di depan Gedung Juang persis di tepi Jalan Merdeka, dibangun sebuah tugu peringatan.

Pembangunan tugu ini diprakarsai oleh Komandan Korem 021/Pantai Timur, Kolonel Inf. L.Silangit dan tokoh masyarakat Kota Siantar, Kurnia Ginting. Bagian tengah tugu ini dilengkapi dengan inskripsi yang selengkapny berbunyi, *“Tugu 1945-1949 Bangunan Ini Adalah Kedudukan Markas Divisi IV, Divisi Gajah III, Divisi X, Sejarah Pertumbuhan, Pembentukan dan Pembangunan TNI di Sumatera Utara.”* Tugu peringatan masa revolusi fisik 1945 di depan Gedung Juang



(foto/dok.jal)

5. Gedung Pengadilan Negeri

Gedung Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman ini sejak era kolonial Belanda sudah digunakan sebagai tempat menggelar *kerapatan na bolon* (musyawarah besar para Raja-raja Simalungun). Pertemuan khusus bernuansa adat dan kekerabatan ini digelar dalam rangka menyelesaikan atau memutuskan perkara-perkara kaum pribumi di wilayah Simalungun yang saat itu terdiri dari tujuh kerajaan (*marpitu*), yaitu: Siantar, Tanah Jawa, Panei, Dolog Silou, Purba, Raya dan Silimakuta.

Sebelumnya, kerajaan di wilayah Simalungun hanya empat (*marroppat*) yakni: Siantar, Tanah Jawa, Panei dan Dolog Silou. Namun berkat campur tangan pemerintah kolonial Belanda, akhirnya Dolog Silou dibagi menjadi empat kerajaan dengan bertambahnya Purba, Raya dan Silimakuta menjadi kerajaan tersendiri yang awalnya hanya merupakan *partuanon* (daerah vazal kerajaan Dolog Silou).

Namun sejak tahun 1922 gedung ini digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kantor *Asisten Residen Simeloengoen en Karolanden* yang berkedudukan di Pematangsiantar dan untuk sementara pelaksanaan *kerapatan na bolon* digelar di lokasi SMA Negeri 4 sekarang. Sekitar tahun 1934, gedung ini kembali dijadikan sebagai tempat *kerapatan na bolon* yang menjadi cikal bakal Kantor Pengadilan Negeri setelah berpindah dari Kompleks SMA Negeri 4 Jalan Pattimura sekarang.

Hal ini sejalan dengan perkembangan dan penambahan penduduk, tahun 1919 di Saribudolok dibangun gedung *kerapatan na bolon* untuk menangani perkara di wilayah Dolog Silou, Purba dan Silimakuta. Sejak tahun 1934 *kerapatan na bolon* di Pematangsiantar menangani

wilayah Siantar, Tanah Jawa, Panei dan Raya. Setiap persidangan pada *kerapatan na bolon* dipimpin oleh *Controleur* dengan dihadiri seorang Jaksa dan Raja sebagai anggota persidangan.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, gedung ini kemudian diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai gedung Pengadilan Negeri Simalungun dan Pematangsiantar. Sampai akhirnya pada tahun 1982, kedua pengadilan negeri, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dipisah dan sekarang keduanya telah memiliki gedung pengadilan masing-masing. Gedung Pengadilan Negeri Pematangsiantar ini sudah beberapa kali mengalami renovasi sehingga sisa peninggalan era kolonial Belanda di lokasi tersebut sudah tak terlihat lagi. Sebab struktur bangunan gedungnya yang awalnya bergaya arsitektur Eropa kini sudah berubah mengikuti perkembangan zaman.



Gedung Pengadilan Negeri Pematangsiantar di Jalan Sudirman No.5 pasca renovasi . (foto/dok.jal)

6. Markas Polisi Resort Pematangsiantar

Markas kepolisian resor Pematangsiantar di Jalan Sudirman, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat sebelum pemekaran, juga menjadi markas kepolisian resort Simalungun. Tempat ini sejak era kolonial Belanda memang sudah digunakan sebagai kantor polisi, khususnya sejak kota Pematangsiantar ditetapkan sebagai *gemeente* pada tahun 1917.

Letaknya sengaja dibangun berada satu kawasan dengan pusat pemerintahan dan ekonomi kolonial Belanda, termasuk sejumlah kantor-kantor pendukungnya seperti bank, fasilitas publik dan hotel. Keberadaan markas kepolisian (*polizei kantoor*) ini dimaksudkan sebagai antisipasi dan pencegahan kerawanan tindak kriminal seperti pencurian, pembunuhan, mabuk-mabukan bahkan peredaran narkotika (opium). Selain itu, keberadaan kantor polisi ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga kantor-kantor pemerintahan, perkebunan dan fasilitas publik lainnya.

Status personil kepolisian saat itu adalah aparaturnya pemerintah karena mendapat digaji dari pemerintah kolonial Belanda. Biasanya, yang menjadi anggota kepolisian adalah orang-orang Eropa dan sebagian ada juga orang-orang India karena memiliki berpostur tubuh yang tinggi besar. Disamping itu, polisi ini juga dipersiapkan untuk menjaga kantor-kantor pemerintah maupun pengusaha perkebunan.



Markas polisi yang berdekatan dengan kantor asisten residen tahun 1923, sekarang menjadi Mapolres Pematangsiantar. (foto:kitlv.nl)



Markas kepolisian Resor Pematangsiantar sekarang. (foto:dok/jal)

7. Monumen Perjuangan Kemerdekaan

Monumen perjuangan kemerdekaan yang berada di tengah Lapangan Merdeka atau yang lebih dikenal dengan Taman Bunga ini, dibangun dalam rangka mengenang pertempuran Laskar-laskar Pemuda Siantar-Simalungun semasa perang kemerdekaan 1945. Di lokasi ini pertama kali digelar upacara pengibaran bendera sang Merah-Putih sebagai pertanda telah sampainya berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Pematangsiantar dan Simalungun pada tanggal 10 Oktober 1945.

Namun ketika para Pemuda dan Laskar-laskar rakyat mengibarkan bendera Merah-Putih, mereka mendapat serangan mendadak dari tentara *Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang bermarkas di Siantar Hotel. Untuk mengenang peristiwa tersebut sekaligus menghormati perjuangan rakyat dalam merebut kemerdekaan yang terjadi di lokasi ini, pada tahun 1977 dibangun monumen di sepertiga lapangan dan di depan pintu masuk. Monumen akan langsung tampak saat memasuki Lapangan Merdeka dan juga tampak dari Siantar Hotel.

Pembangunan monumen ini langsung dikoordinir oleh Wali Kota Pematangsiantar saat itu, Sanggup Ketaren. Biaya pembangunannya juga berasal dari kedua pemerintah daerah, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, karena monumen ini adalah merupakan bentuk perjuangan bersama kedua daerah ini. Sehari-hari, banyak warga yang mengunjungi Lapangan Merdeka dan menyaksikan monumen ini sekaligus mengabadikan keberadaan mereka di sekitar monumen sembari menikmati sejuknya pepohonan di tengah lapangan.



*Monumen Perjuangan Kemerdekaan di Lapangan Merdeka.
(foto/dok.jal)*



*Monumen dan prasasti pengibaran bendera Merah Putih di sekitar
Lapangan Merdeka. (foto/dok.jal)*

Di lokasi pengibaran pertama Sang Merah Putih di Pematangsiantar pada tahun 1996 telah dibangun sebuah monumen berbentuk prasasti. Hal ini ini pertanda bahwa di sana pernah terjadi peristiwa yang penting dikenang sebagai memori kolektif sekaligus edukasi historis bagi generasi muda. Setidaknya mengingatkan bagi setiap orang yang melihatnya untuk mengenang kembali peristiwa berani nan heroik yang digagas Abdul Aziz Siregar bersama puluhan pemuda ini digelar di Lapangan Pagoda (Lapangan Merdeka) atau yang lebih akrab disebut "Taman Bunga" pada tanggal 27 September 1945.

Prasasti yang diukir pada marmer hitam dilekatkan di atas bangunan konstruksi bata berplester massif tersebut, terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Siantar Barat, tak jauh dari Balai Kota. Jika kita berjalan dari Jalan Merdeka samping Tugu Becak menuju Perpustakaan Sintong Bingei, prasasti itu ada di sebelah kanan kita. Atau persis di sudut kiri Lapangan Pariwisata bersebelahan dengan tembok perpustakaan.

Pada prasasti itu tertulis: "Tanggal 27 September 1945 di sekitar ini terjadi peristiwa upacara penggerakan/pengibaran bendera merah putih yang pertama di Pematangsiantar/Simalungun oleh Pemuda-pemuda dan kekuatan rakyat Siantar/Simalungun. Dibangun oleh: Tim Khusus Perencana/Pelaksana Pembangunan Tetenger di Kodya Tk II P.Siantar. SK Walikota Madya Tk II P. Siantar No.430/15-WK/1996 tanggal 29 Januari 1996".

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2020, persis di sebelah prasasti tersebut, dibangun lagi sebuah monumen yang lebih besar berisikan teks Proklamasi Kemerdekaan, ditambah lagi dengan pemasangan 5 (lima)

buah bendera Merah Putih dengan tiang berbahan stainless. Meskipun keberadaannya kerap seperti tak terurus, bahkan bendera yang dipasang juga sering tak terlihat lengkap

8. Kompleks Bekas Penjara Kolonial



Bekas lokasi penjara lama yang dibangun pada masa Kolonial Belanda, kini telah berubah menjadi pusat bisnis dengan dibangunnya Siantar Bisnis Centre (SBC). (foto/dok.jal)

Bekas bangunan penjara lama yang terletak di pusat kota Pematangsiantar, persisnya antara Jalan Pattimura, Jalan Sutomo dan Jalan Kapten Pierre Tendean, sempat terlantar selama bertahun-tahun karena berpindahnya lokasi penjara ke Jalan Asahan Km 7, Kabupaten Simalungun. Sekarang namanya bukan lagi penjara tetapi disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Sayangnya, sekarang nyaris tak ada lagi sisa bangunan lama yang dapat menjadi bukti, bahwa di Lokasi Siantar

Bisnis Centre (SBC) Jalan Sutomo sekarang ini pernah berdiri sebuah bangunan penjara yang didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena semua bangunannya telah dibongkar habis dan diganti dengan bangunan yang baru untuk keperluan rumah toko (ruko) dan pusat bisnis sejak tahun 2005 lalu.

Dilansir dari laman Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar, disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar yang berada di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara awalnya merupakan peninggalan kolonial Belanda yang beralamat di Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar. Seiring dengan perkembangan Kota Pematangsiantar maka sejak tahun 1982, Lembaga Pemasyarakatan yang berdiri sejak tahun 1926 ini dipindahkan ke Jalan Asahan Km 7 dengan menempati areal lahan seluas 7.08 Ha serta luas bangunan 28.845 m².

Lembaga Pemasyarakatan yang resmi beroperasi sejak tahun 1988 ini merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sistem pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu⁸⁹.

⁸⁹(<https://www.lapaspematangsiantar.com/profile/sejarah-lapas>, diakses 15 Maret 2022).

C. Infrastruktur dan Fasilitas Publik

1. Pabrik Teh Kebun Martoba



Salah satu sisi puing-puing bangunan eks Pabrik Teh kebun Martoba (foto/dok/jal)

Bekas Pabrik Teh Kebun Martoba ini terletak di Kampung Pisang Kipas Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Martoba yang berbatasan langsung dengan Nagori Bosar Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Puing-puing bekas bangunan pabrik teh ini masih banyak yang bisa dilihat sampai sekarang, meskipun sudah tidak utuh lagi.

Keberadaan pabrik teh ini tidak lepas dari masuknya modal asing ke Sumatra Timur sejak tahun 1860-an, yang menjadikan wilayah Sumatra Timur ramai diperebutkan banyak negara asing untuk dijadikan lahan perkebunan. Apalagi wilayah ini sangat subur dan tofografinya terlihat datar menjadikannya sangat cocok untuk penanaman

berbagai komoditi perkebunan, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara asing yang memiliki modal dalam jumlah besar.

Pada tahun 1861 Jacob Niewen Huis dari Belanda melakukan percobaan membuka perkebunan tembakau di daerah Deli. Karena mendapat keuntungan besar, Belanda kemudian melakukan *ekspansi* (pengembangan) usaha perkebunannya hingga ke wilayah Simalungun. Lewat *ekspansinya*, pemerintah kolonial Belanda juga memberikan kesempatan luas kepada pihak asing untuk ikut membuka lahan-lahan perkebunan di Simalungun.

Kesempatan itu dipergunakan para investor asing, terutama dari Eropa dan Amerika untuk menanamkan modalnya di Simalungun. Caranya dengan mendekati para raja di Simalungun guna mendapatkan lahan tanah yang cocok bagi perkebunan dalam rangka memperoleh hak *konsensi* (pinjam kontrak).



*Salah satu rumah Administratur Kebun Teh di Deli
(foto/repro/Museum Sumut)*

Di daerah Sidamanik, Belanda membuka perkebunan teh tahun 1922 yang dikelola *Handels Vereniging Amsterdam (HVA)*. Mengingat sulitnya mendapatkan tenaga kerja, apalagi warga setempat merasa asing dengan tanaman perkebunan, Belanda mendatangkan pekerjanya dari Pulau Jawa dengan sistem kontrak. Kedatangan etnik Jawa ini dilakukan bertahap dimulai tahun 1926.

Sebelum dibukanya perkebunan teh di Sidamanik, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Siantar. Kerajaan Siattar sendiri akhirnya menandatangani *Korte Volkraring* (perjanjian pendek) pada tanggal 16 Oktober 1907, antara pemangku Kerajaan Siantar, Tuan Riahata Damanik yang juga adalah Tuan Sidamanik dengan pemerintah Belanda⁹⁰. Karena saat itu wilayah Sidamanik merupakan salah satu distrik Kerajaan Siattar, yang diperintah dan dikendalikan dari pusat kerajaan di Pamatang.



Perempuan pemetik daun teh di Perkebunan Sidamanik pada zaman Belanda. (foto/repro/Museum Sumatera Utara)

⁹⁰ TBA Purba Tambak. 1982. *Sejarah Simalungun* Percetakan HKBP, Pematangsiantar.

Saat itu, politik *penetrasi* Belanda masuk ke Indonesia berbentuk kolonialisme dengan menanamkan hegemoni kekuasaannya berdasarkan *desintegrasi* (penyimpangan suatu sistem sosial) unsur-unsur nilai budaya, politik dengan sistem *divide et impera* (politik adu domba). Sistem itu mulai diterapkan dengan melakukan kontrak kepada para penguasa kerajaan waktu itu. Caranya, para raja-raja yang berkuasa harus menandatangani sebuah perjanjian pendek, yang pada hakekatnya sangat merugikan raja-raja sendiri.⁹¹

Akibat perjanjian pendek tersebut wilayah Kerajaan Siantar, khususnya yang memiliki daerah pantai semakin berkurang. Namun demikian upaya Belanda untuk menguasai wilayah Simalungun tidak terlepas dari kondisi geografisnya yang memiliki tanah subur dan cocok untuk daerah perkebunan. Setelah berakhirnya *cuultur stelsel* (tanam paksa), terjadilah perubahan sistem penguasaan menjurus ke arah politik *assosiasi*, yaitu politik pintu terbuka dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan asing untuk menanamkan *investasinya* (modal) dengan sistem *land rente* (sewa tanah).

Sistem inilah yang kemudian merambah ke wilayah-wilayah di Simalungun, termasuk Distrik Sidamanik, sebagai bagian dari pemerintahan Residen Sumatra Timur, yang Asisten Residennya berkedudukan di Pematangsiantar. Sementara itu, pembangunan yang dilaksanakan para Kolonial Belanda tertuju pada pembukaan lahan-lahan perkebunan dan irigasi dengan tujuan mengeksploitasi ekonomi.

⁹¹ Maknur Sinaga (tim). 1999. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Daerah Tk II Simalungun*. Pemda Simalungun, Pematangsiantar.

Akibat politik *assosiasi* atau politik pintu terbuka maka muncullah para *investor* (penanaman modal asing) dari berbagai negara Eropa, seperti HVA, *Goodyear*, *Siantar Estate*, *Marihat Sumatra Plantage* dan sebagainya.⁹² Sistem penyewaan tanah yang ditentukan oleh pemerintah Kolonial Belanda kepada pihak swasta asing lebih menguntungkan dari sistem *cuultur stelsel* yang dilakukan sebelumnya.



Pengukuran lahan baru oleh juru ukur pada masa kolonial untuk dijadikan perkebunan (foto/repro.Museum Sumatera Utara)

Menyusul kebijakan politik *assosiasi* itu berdirilah beberapa perkebunan teh di wilayah Simalungun, antara lain: Perkebunan teh yang berlokasi di Nagahuta dan Martoba sekitar tahun 1910, Kasinder/Dolog Panribuan tahun 1912, Sidamanik tahun 1922, Tanah Jawa tahun 1924, Mardjanji/

⁹² *Ibid*

Panei Tonga tahun 1926, dan perkebunan Bahbutong dan Bahbirong Ulu.

Pesatnya perkembangan perusahaan perkebunan di luar Pulau Jawa, adalah karena adanya politik *assosiasi* yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda, untuk memperoleh keuntungan besar dari sistem sewa tanah kepada pihak asing di wilayah jajahannya. Sehingga mereka kemudian berupaya megembangkan perkebunan-perkebunan di luar Pulau Jawa, yang salah satunya adalah wilayah Sumatera Timur. Di mana salah satunya adalah wilayah Kerajaan Siantar, khususnya *Distrik Sidamanik*.

Sesudah tahun 1907, setelah para raja-raja di Simalungun menandatangani perjanjian pendek dengan Belanda, mereka kemudian membuka perkebunan-perkebunan di Simalungun. Akibatnya, lambat laun melalui bermacam cara, Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Simalugun dengan dibantu oleh orang-orang yang diberinya kekuasaan. Selama *partuanon-partuanon* berkuasa, seluruh kebiasaan adat-istiadat dari tujuh kerajaan di Simalungun, tetap berlaku di wilayahnya masing-masing. Dan tanah-tanah kosong dimanfaatkan Belanda untuk membuka perkebunan dengan mendatangkan kuli-kuli kontrak dari Jawa di perkebunan itu⁹³.

Inilah awal masuknya para etnik Jawa yang didatangkan ke Sumatra Timur dengan maksud untuk ditempatkan sebagai pekerja kontrak di perkebunan-perkebunan yang dibuka oleh Belanda maupun pihak asing yang mendapat hak penyewaan dari Belanda. Meski

⁶ JM Saragih. 1984. *Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatra Utara: Simalungun*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984/1985 Medan.

sebenarnya, sebelum mendatangkan etnik Jawa, Belanda sudah lebih dulu mendatangkan orang-orang Cina sebagai pekerja kontrak di perkebunan-perkebunannya.

Namun karena kesulitan-kesulitan yang dialami dalam perekrutan kuli- kuli Cina ini dari negerinya dan Malaya, Belanda kemudian menggunakan tenaga- tenaga kerja dari Hindia Belanda sendiri. Belanda memasukkan tenaga kerja ini secara bertahap melalui kontrak kerja, awalnya untuk perkebunan tembakau di Deli⁹⁴.



*Kedatangan -kuli kontrak di Pelabuhan Belawan tahun 1910.
(foto/repro. Museum Sumatera Utara)*

Sementara, untuk perkebunan teh di Sumatera Timur, Belanda baru mendatangkan pekerja kontrak dari Jawa sekitar tahun 1920-an. Karena perkebunan teh di Sidamanik ini sendiri baru dibuka kira-kira tahun 1924. Meski sebelumnya, penanaman teh di Sumatra Utara telah

⁹⁴ Anthony Reid. 1987. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*. Sinar Harapan, Jakarta.

dilakukan sejak tahun 1898⁹⁵. Salah satu bekas pendirian pabrik teh yang ada di wilayah Kerajaan Siantar waktu itu adalah Kebun Teh Martoba. Hingga sekarang, puing-puing bangunan yang memperlihatkan adanya bekas pabrik teh di lokasi ini masih cukup banyak. Pabrik teh ini kemudian dibakar seiring dengan meletusnya revolusi sosial di Simalungun tahun 1947.

Lokasi bekas bangunan pabrik tersebut kini berada di tengah areal persawahan dan perladangan yang dikelola penduduk setempat dengan nama Kampung Pisang Kipas, Kelurahan Gerillya (Gurilla), Kecamatan Siantar Martoba. Di lokasi bekas pabrik tersebut juga masih bisa dilihat dengan jelas, bangunan-bangunan pendukung pabrik seperti tiang penyangga bangunan rumah sakit, bekas bangunan perumahan karyawan, fasilitas air bersih (sumur), tempat penyimpanan senjata dan lain-lain. Salah seorang saksi hidup peristiwa pembakaran pabrik tersebut, Jasmen Ambarita sempat menuturkan, pembakaran pabrik teh itu dilakukan bersamaan dengan pembakaran pabrik teh Bah Birong Ulu, yang mereka lakukan dalam sebuah operasi oleh laskar-laskar rakyat dibawah pimpinan Kapten Bejo dari Sidamanik.

Pembakaran itu dilakukan menjelang dini hari saat masyarakat dalam kondisi terlelap. Saksi hidup lainnya, Kamon Sitanggang menyebutkan, untuk mendukung operasional pabrik teh Kebun Martoba, Belanda juga mendirikan fasilitas rumah sakit serta pemukiman tersendiri bagi para karyawan pabrik, yang lokasinya juga di kompleks pabrik. Sementara, sebelum adanya perkebunan dan pabrik teh, di lokasi tersebut tidak ada pemukiman penduduk.

⁹⁵ Ika Setiawati., Nasikun. 1991. *Teh: Kajian Sosial – Ekonomi*. Aditya Media, Yogyakarta.

Kehadiran pabrik teh tersebut membuat makin banyak penduduk yang membuka pemukiman baru di sekitar lokasi pabrik.

Karena menurut Mbah Ridin, para pekerja yang menjadi karyawan perkebunan dan pabrik teh tersebut didatangkan dari Jawa melalui kontrak kerja. Mbah Ridin sendiri bersama rekan-rekannya didatangkan dari Jawa pada tahun 1941. Pada masa menjelang pendudukan Jepang, mereka sempat dipekerjakan selama sekitar satu bulan untuk membangun lapangan terbang di Tiga Bolon. Tak lama setelah itu, mereka pun mengetahui jika penguasa asing di Simalungun telah berganti dari pemerintah Belanda ke pemerintah Jepang.

Selain menyisakan bangunan eks pabrik teh, Desa Gerillya juga memiliki kisah tersendiri pada masa revolusi fisik (1945-1947) menghadapi kembalinya kekuasaan Belanda. Menurut penuturan Karim Abdul Nakim (81), mereka yang tergabung dalam laskar Barisan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dibawah pimpinan Umbar Subroto dan Abdullah Sani, pernah beberapa kali terlibat pertempuran dengan tentara Belanda.



Salah satu bangunan di lokasi pabrik teh yang diduga sebagai gudang penyimpanan senjata. (foto/dok.jal)

Pasukan Umbar Subroto dan Abdullah Sani bahkan pernah menghadang pasukan tentara Belanda yang akan memasuki perbatasan kota dari arah Tebing Tinggi melalui perkebunan Martoba, dilengkapi 35 tank, 80 truk, 20 jeep, 25 panzer yang dimotori oleh pesawat-pesawat terbangnya. Tetapi mereka yang tergabung dalam pasukan Banteng Napindo Republik Indonesia ini terpaksa menghindari pasukan Belanda yang begitu besar. Peristiwa ini terjadi sekitar 29 Juli 1947, menjelang jatuhnya Kota Pematangsiantar ke tangan tentara Belanda⁹⁶.

⁹⁶ Edi Saputra. 1985. *Sumatera Dalam Perang Kemerdekaan: Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris & Belanda*, Yayasan Bina Satria 45, Jakarta. Juga dalam Anonim. 1984. *Sejarah Perang Kemerdekaan di Sumatera 1945-1950*. Dinas Sejarah Kodam I/BB, Medan.

Pertempuran para laskar-laskar rakyat dan barisan pemuda di Martoba ini pada masa revolusi fisik, bahkan membuat salah satu desa tempat pertempuran ini dinamai Desa Gerillya sejak tahun 1947. Untuk mengenang pertempuran itu, tak jauh dari lokasi eks pabrik teh Martoba dibangun sebuah monumen berbentuk prasasti pada tahun 1996.



Prasasti peringatan pembentukan Desa Gerillya (foto/dok.jal)

2. Jembatan Marihat (*Marihat Brug*)

Ketiga jembatan yang ada di Jalan Diponegoro, Jalan Sudirman dan Jalan MH.Sitorus ini, dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1920-an dan sampai sekarang masih utuh serta dapat dipergunakan dengan baik. Konstruksi ketiga jembatan sama yakni menggunakan lantai dasar cor beton, pagar tembok dari beton yang dihiasi

dengan deretan kolom-kolom terbuka berbentuk persegi. Pada ujung pagar jembatan terdapat tiang-tiang lampu yang kini tampaknya sudah tak difungsikan lagi.

Ketiga jembatan yang sudah mengalami renovasi tersebut sama-sama berada di atas Sungai Bah Bolon, yang airnya mengalir cukup deras. Aliran sungai Bah Bolon bahkan sempat dipergunakan sebagai pembangkit listrik untuk penerangan seluruh Kota Pematangsiantar (sebelum adanya listrik dari jaringan PLN) dan operasional pabrik es di Pamatang. Pembangunan ketiga jembatan ini diperkirakan tidak jauh berbeda dengan pembangunan bendungan di Pamatang, antara tahun 1920-1922



Jembatan yang menghubungkan Jalan Sudirman sebelum direnovasi (atas)



dan setelah direnovasi (bawah). (foto/dok.jal)



Jembatan di Pematang era kolonial Belanda (foto: kitlv.nl)



Jembatan yang menghubungkan Jalan Diponegoro sebelum direnovasi tahun 2010 (foto/dok.jal)





*Jembatan yang menghubungkan Jalan Kapten MH.Sitorus sebelum direnovasi (atas) dan setelah direnovasi (bawah).
(foto/dok.jal)*

3. Kantor Pos Pematangsiantar

Kantor pos Pematangsiantar yang tereletak di Jalan Sutomo, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat ini sudah berdiri sejak era kolonial Belanda sekitar tahun 1913. Awalnya kantor pos dan telegram ini berdiri atas prakarsa perusahaan *NV. de Deli Maatschappij* yang juga mendirikan perusahaan kereta api, *NV. de Delispoorweg Maatschappij*. Oleh karena itulah, awalnya, keberadaan kantor pos dan telegraf ini fungsinya untuk mendukung kelancaran jalur kereta api.

Dengan adanya telegraf ini keselamatan dalam perjalanan kereta api lebih terjamin karena adanya pos pemantau di persimpangan jalan yang terhubung dengan telegram. Selain itu, kantor pos pada era kolonial ini juga berfungsi untuk menghubungkan orang-orang asing yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan kolonial Belanda

maupun di kantor-kantor perkebunan di Sumatera Timur ke negara asalnya di Eropa.



Kantor Pos dan Telegram Pematangsiantar yang dibangun sekitar tahun 1913 /foto: kitlv.nl)



Kantor PT. Pos Indonesia Pematangsiantar sekarang /foto: dok/jal)

4. Pabrik Es Siantar

PT. Pabrik Es Siantar yang telah berdiri sejak tahun 1916 di kota Pematangsiantar, sekarang berada di kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, awalnya bernama *NV. Ijs Fabriek*. NV merupakan singkatan dari *Naamloze Vennootschap* yang berarti Perseroan Terbatas. Pendirinya adalah Heinrich Surbeck, seorang sarjana teknik kimia berkebangsaan Swiss. Heinrich pertama kali datang ke Sumatera Timur sekitar tahun 1902, dimana ketika itu Sumatera Timur sudah mulai berkembang akibat pembukaan lahan-lahan perkebunan, termasuk Pematangsiantar.

Sebelum mendirikan *Ijs Fabriek*, Surbeck telah mendirikan pabrik gambir di Gunung Melayu (Asahan) dan hotel, yang saat ini menjadi Siantar Hotel. Selain itu, Surbeck telah membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran sungai Bah Bolon yang arusnya sangat deras untuk memutar turbin. Awalnya *Ijs Fabriek* hanya memproduksi es batangan dengan memanfaatkan air jernih, sejuk dan segar yang berasal dari mata air di tepian sungai Bah Bolon.



Lokasi Pabrik Es Siantar sekitar tahun 1923 (foto:kitlv.nl)



Lokasi Pabrik Es Siantar di Pematang yang masih beroperasi hingga sekarang (foto:dok/jal)

Tentunya, Surbeck yang merupakan ahli kimia sudah lebih dulu melakukan pengujian dan menyimpulkan bahwa air yang digunakan sebagai bahan baku es batangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Selain digunakan di *Ijs Fabriek* dan hotel, pembangkit listrik bertenaga air sungai yang dibangun Surbeck juga dimanfaatkan untuk memasok aliran listrik bagi masyarakat kota Pematangsiantar. Termasuk juga pasokan listrik di kantor-kantor pemerintahan di jalan Merdeka sekarang, yang jaraknya memang tak terlalu jauh dari lokasi pembangkit listrik. Maklum ketika itu belum ada perusahaan listrik negara (PLN) yang memasok daya listrik seperti sekarang ini.

Usaha pembuatan es batangan, pembangkit listrik dan hotel yang dirintis Surbeck mengalami kemajuan pesat. Produksi bisnisnya juga terus meningkat dan berkembang. Pada tahun 1920-an, *NV Ijs Fabriek* mulai mengembangkan

produksi minuman berkarbonasi. Awalnya ada 8 (delapan) varian rasa minuman yang sampai sekarang terkenal dengan merek “Badak” ini, yaitu: *Orange Pop, Sarsaparilla, Raspberry, Nanas, Grape Fruit Soda, American Ice Cream Soda, Coffee Bear* dan *Soda Water*.

Saat pendudukan Jepang, *Ijs Fabriek* tetap beroperasi dan memproduksi barang yang sama. Pasca setelah kemerdekaan Indonesia, pabrik ini sempat mengalami masalah akibat terjadinya perlawanan laskar-laskar rakyat kepada Belanda. Sebagai pengusaha Heinrich Surbeck yang dianggap representasi orang asing, sehingga menjadi salah satu incaran laskar rakyat. Surbeck terbunuh dan keluarganya terpaksa diungsikan ke Eropa. Pasca kematian Surbeck, operasional teknis *NV Ijs Fabriek* dikendalikan oleh Elman Tanjung, yang sudah bekerja di perusahaan ini sejak dibuka dan sangat dipercaya oleh Surbeck. Oleh karena itulah, keluarga Surbeck mempercayakan Elman Tanjung untuk melanjutkan operasi pabrik ini.

Tahun 1947, anak Surbeck, bernama Lydia Rosa kembali ke Pematangsiantar mengelola kembali operasional pabrik tersebut. Lydia Rosa menikah dengan pria berkebangsaan Belanda bernama Otto, dan mereka berdua mengelola *NV Ijs Fabriek* bersamasama hingga tahun 1959. Namun kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pasca kedaulatan kemerdekaan Indonesia tahun 1949 terus disuarakan rakyat dan pemerintah berdampak terhadap keberlangsungan *NV Ijs Fabriek*.

Otto bersama istrinya Lydia Rosa akhirnya menyerahkan pengelolaan *NV Ijs Fabriek* kembali kepada Elman Tanjung, meski baru tahun 1963, Otto dan Lydia baru kembali ke negaranya di Swiss. Atas persetujuan keluarga Otto dan Lydia, Elman Tanjung menawarkan *NV Ijs Fabriek*

kepada seorang pengusaha bernama Julianus Hutabarat. Julianus yang merupakan pemilik perusahaan *Barat Trading Company* tertarik dengan tawaran tersebut.

Pada tahun 1969 *NV Ijs Fabriek* beserta aset lainnya, seperti Siantar Hotel dibeli keluarga Julianus Hutabarat dan berubah namanya menjadi PT. Pabrik Es Siantar namun produksinya tetap sama. Di bawah kendali Julianus Hutabarat, pabrik dan hotel bertambah maju. Penambahan gedung dan kamar-kamar baru hotel, penggantian mesin dan fasilitas lainnya merupakan upaya kerja keras mereka yang gigih.

Namun sejak tahun 1990 PT. Pabrik Es Siantar mengalami penurunan pendapatan sebagai dampak negatif globalisasi dan hadirnya pesaing sejenis di pasaran seperti CocaCola. Pabrik Es Siantar mengurangi produksi minumannya dari delapan varian rasa minuman yang diproduksi berkurang tiga rasa yaitu *Sarsaparilla*, *Soda Water* dan produk es batangan.

5. PDAM Tirtauli

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli merupakan salah satu perusahaan daerah milik pemerintah kota Pematangsiantar yang tugas utamanya adalah menyediakan air bersih (air minum) bagi masyarakat kota Pematangsiantar sekitarnya. Perusahaan yang awalnya dirintis dan dikelola perkebunan Siantar Estate ini, mulai beroperasi sejak tahun 1916, tepatnya di lokasi Lapangan Simarito di Jalan Merdeka Pematangsiantar sekarang. Sesuai target awal, sumber air ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan perkebunan Siantar Estate dengan cara membangun bak pengumpul pada umbul (mata air) Simarito dengan kapasitas (debet air) sebanyak 15 liter/detik.

Ketika itu, kota Pematangsiantar merupakan salah satu daerah yang dipilih pemerintahan kolonial untuk menyediakan air bersih yang pengelolaannya kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Pada tahun 1920 pemerintah kolonial Belanda mengambil alih sumber air Simarito dari perkebunan Siantar Estate dan membentuk perusahaan air minum dengan nama *Gemente Water Leiding Bedrijf* (Perusahaan Air Kota). Namun tetap dengan perjanjian akan memberikan suplay air kepada perkebunan tersebut



*Pembangunan pipa air minum di Pematangsiantar tahun 1922
(foto:kitlv.nl)*



Bak air untuk umum yang dibangun Belanda tahun 1922 di sekitar Simarito



Tangki air PDAM Tirtauli yang dibangun Belanda di Timbang Galung tahun 1918, masih berfungsi sesuai dengan bentuk aslinya (foto/jalatua)

Mengingat perkembangan daerah dan penduduk kota Pematangsiantar yang semakin meningkat dan untuk memenuhi kebutuhan air, maka pada tahun 1940 dibangun sumur bor yang terletak di jalan Sabang Merauke dengan kapasitas/debet air 4,1 liter/detik. Pasca kemerdekaan, pada tahun 1953 dibangun lagi beberapa sumur bor, diantaranya *Bron Capetering* pada Umbul Naga Huta dan tahun 1954 di tempat yang sama dibangun lagi sumber tambahan *Bron Capetering* untuk sarana mengumpul. Tahun 1959 dibangun lagi *Bron Capetering* pada umbul Pancur lima untuk memenuhi perkembangan penduduk dan tingginya tingkat kebutuhan air masyarakat.

Demikian seterusnya, pembangunan sumber-sumber atau umbul secara berkala terus dilakukan demi meningkatkan produksi (kapasitas debit air). Pada tahun 1976 dibangun tiga sumber air di Umbul Mual Goit. Status pengolahan air minum sampai waktu itu dilaksanakan oleh Dinas Air Minum Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar. Statusnya baru dirubah pada tanggal 1 April 1978 menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli dan merupakan tahun berdirinya PDAM Tirtauli sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan oleh Sanggup Ketaren sebagai Wali Kota Pematangsiantar⁹⁷.

Kebijakan ini selaras dengan program nasional dalam pelayanan air bersih untuk daerah perkotaan, yang ditargetkan 75 % dari jumlah penduduk berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 26 Tahun 1975 tentang penyesuaian / mengalihkan bentuk Perusahaan Air Minum dari Dinas Daerah menjadi Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah ini bertujuan turut melaksanakan

⁹⁷ *Pemerintah Kota Pematangsiantar*, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kodya Dati II Pematangsiantar, *Pematangsiantar*, 1996,

pembangunan daerah khususnya, disamping pembangunan nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang air minum.

Anggaran perusahaan daerah ini mempunyai anggaran tersendiri, sehingga setiap tahunnya harus menyusun anggaran tersendiri. Namun pada tahun 2021, semasa Wali Kota Pematangsiantar dijabat Dr. Hefriansyah, status PDAM Tirtauli beralih lagi menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtauli.

6. Siantar Hotel

Siantar Hotel yang berada di lokasi strategis pusat kota Pematangsiantar, di Jalan W.R. Supratman mulai dibangun era kolonial sekitar tahun 1913 dan diresmikan pada 1 Pebruari 1915. Hotel ini didirikan oleh tiga orang berkebangsaan Swiss, yakni dr. Erns Surbeck (dokter hewan), Hedwie Euse Surbeck dan Lydia Rosa Otto Surbeck. Operasional pengelolaannya dipercayakan kepada Uegen Ralph Otto sebagai Direktur Utama.

Pada tahun 1969, kepemilikan hotel ini beralih kepada Julianus Hutabarat dan kemudian dikembangkan dengan penambahan kamar, lobby, restoran serta renovasi sejumlah kamar. Namun hingga kini, bangunan awal menunjukkan bentuk asli masih ada yang tersisa, yakni terdiri dari satu blok kamar yang menghadap ke pembatas hotel arah Stasiun Kereta Api.



Siantar Hotel sekitar tahun 1934 (foto:kitlv.nl)



Kompleks Siantar Hotel dan Tugu peringatan Peristiwa Siantar Hotel. (foto/dok.jal)

Siantar Hotel ini memiliki sejarah penting bagi perjuangan merebut kemerdekaan di Kota Pematangsiantar. Karena lokasi ini pernah dijadikan oleh Jepang sebagai markas setelah Belanda menyerah kepada Sekutu tahun 1942. Namun pasca kemerdekaan, para pemuda kemudian menyerang tentara NICA/Belanda yang juga bermarkas di Siantar Hotel.

Untuk mengenang Peristiwa Siantar Hotel Berdarah ini, dibangunlah sebuah tugu, persis di depan Siantar Hotel. Bangunan monumen berbentuk empat persegi terbuat dari batu andesit yang direkat dengan semen ini merupakan sumbangan seorang pengusaha bernama Sintong Bingei pemilik pabrik rokok NV.STTC. Pada bagian tengah monumen ada sebuah inskripsi yang bertuliskan, "*Tanggal 15 Oktober 1945 penjerbuan dan penghantjuran kub N.I.C.A di Siantar Hotel oleh masa rakjat Kota P.Siantar dan Kabupaten Simalungun sekitarnya, gugur Muda Radjagukguk, Ismail Situmorang korban fihak musuh 17 orang*"



Tugu Peringatan Peristiwa Siantar Hotel (foto/dok.jal)

Selain berbentuk monumen, sebuah lukisan yang kini tersimpan di Museum Sumatera Utara-Medan, juga dibuat untuk menggambarkan aksi penyerbuan barisan pemuda dan laskar-laskar rakyat yang tergabung dalam BKPI ke Siantar Hotel untuk menyerang tentara KNIL yang tergabung dalam pasukan NICA tersebut, seperti terlihat di bawah ini.



Lukisan Penyerbuan Laskar Rakyat dan Barisan Pemuda ke Siantar Hotel. (foto/repro. Museum Sumatera Utara)

7. Taman Hewan Pematangsiantar

Taman Hewan Pematangsiantar terletak di Jalan Gunung Simanuk-manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat. Taman rekreasi yang merupakan warisan era kolonial Belanda ini dibangun pada tahun 1936 dengan luas lahan sekitar 4,5 hektar. Secara resmi, taman hewan ini baru dibuka untuk umum pada tanggal 27 Nopember 1936.

Di kompleks taman hewan ini juga terdapat sebuah Museum *Zoologicum* yang merupakan tempat penyimpanan hewan-hewan mati yang telah diawetkan (*diofset*). Aneka jenis hewan yang ada di lokasi ini berasal dari berbagai tempat di Indonesia maupun luar negeri.



Lokasi depan (gerbang masuk) Taman Hewan Pematangsiantar setelah direnovasi. (foto/dok.jal)

Taman Hewan Pematangsiantar merupakan salah satu taman hewan yang telah memenuhi standar pemeliharaan satwa diantara 10 dari 34 Taman Hewan lainnya di Indonesia, menurut data dari Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia (FOKSI). Pengelolaannya sekarang tidak lagi ditangani Pemko Pematangsiantar, karena sejak tahun 1996 sampai sekarang telah diserahkan kepada pihak swasta, yakni lembaga yang dipimpin oleh Rahmat Shah.

Setelah dikelola pihak swasta, Taman Hewan Pematangsiantar mengalami perkembangan dan kemajuan sangat pesat. Aneka satwa langka juga banyak terdapat di taman hewan yang sekarang telah memiliki fasilitas wahana permainan anak-anak, kolam renang serta gedung pertemuan yang bernama Balai Rahmatshah.

Setiap harinya, taman hewan yang termasuk di kawasan pusat kota ini sangat ramai dikunjungi masyarakat, termasuk dari luar kota Pematangsiantar. Apalagi suasana di

dalam taman hewan sangat sejuk dan serasa hutan alamiah karena banyaknya pepohonan besar yang sudah ada sejak era kolonial dan tetap dipertahankan hingga sekarang.

8. RSUD Dr. Djasamen Saragih



Salah satu bagian bangunan lama RSUD yang sempat dibiarkan sesuai aslinya namun kini telah turut direnovasi. (foto/dok.jal)



Rumah kediaman dokter yang masih terlihat dengan konstruksi lama di sekitar RSUD Jombang namun kini telah dibiarkan kosong dan kondisinya memprihatinkan. (foto/dok.jal)



Kondisi bangunan RSUD setelah direnovasi sejak tahun 2005 lalu. (foto/dok.jal)



*Kondisi bangunan RSUD setelah direnovasi sejak tahun 2005 lalu.
(foto/dok.jal)*

Rumah Sakit Umum Daerah (RSU) Kota Pematangsiantar didirikan pada tahun 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Sekarang status RSUD merupakan salah satu unit Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar. Pada tanggal 2 November 1992 RSUD ini ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan berdasarkan persetujuan MENPAN RI No.B-1267/I/1992 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1070/Menkes/SK/XI/1992 tanggal 28 November 1992 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 445/3155/K/1992 tanggal 31 Desember 1992.

Selanjutnya, pengelolaan RSU diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tanggal 27 Desember 2001,

semasa Wali Kota dijabat Drs. Marim Purba. Kemudian pada masa kepemimpinan Wali Kota berikutnya, Ir.R.E.Siahaan dan Kepala RSU dijabat dr.Ria Novida Telaumbanua,M.Kes, terhitung sejak 23 April 2007 nama RSU Kota Pematangsiantar dirubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Djasamen Saragih berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 515/Menkes/SK/IV/2007. Dr. Djasamen Saragih merupakan putra pertama etnik Simalungun yang berhasil menjadi dokter dan pernah mengabdikan dirinya di RSUD Pematangsiantar.

Selain mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak tahun 1974 RSU Pematangsiantar telah mengadakan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Methodis Indonesia (UMI) Medan. RSUD dijadikan sebagai tempat pendidikan bagi mahasiswa kedokteran UMI untuk melaksanakan Praktek Kepaniteraan Klinik Senior (*Co - Schap*).

Sebagian lahan RSU pernah dicoba untuk dijual kepada pihak ketiga melalui proses *ruilslagh*. Pembelinya PT Bahana Jasa Pratama dengan persetujuan DPRD No.9/2004 tanggal 19 Mei 2004. Persetujuan DPRD ini merupakan respon atas permohonan Wakil Wali Kota yang juga Pelaksana Tugas (Plt Wali Kota) Ir Kurnia Rajasyah Saragih No.061/3190/2004 tanggal 30 April 2004. Ketika itu Wali Kota, Marim Purba dinonaktifkan sementara oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno karena diduga terlibat kasus *mark up* pembangunan kios darurat Pasar Horas.

Lokasi lahan yang sempat *diruilslagh* kepada pihak pengusaha asal Medan ini berada di Jalan Sutomo dan Jalan Sabang Merauke Kompleks RSUD seluas 53.041 m² dengan sertifikat hak pakai No.153, bernilai Rp 38.179.302.000,-. Rencana Pemko Siantar ini mendapat protes keras dari para pegawai/perawat/dokter-dokter RSUD, mahasiswa, serta elemen-elemen masyarakat lainnya dibawah pimpinan almarhum dr .Sihar Siahaan. Praktis setiap hari terjadi gelombang aksi selama setahun dan terjadi secara terus-menerus ke DPRD dan Wali Kota.

Penjualan sebagian lahan RSUD ini dinilai hanya untuk kepentingan sekelompok orang (kolusi), bukan dalam rangka pembangunan RSUD yang sesungguhnya agar menjadi lebih baik. Bahkan rencana penjualan sebagian aset RSUD ini sangat berpotensi merugikan keuangan negara serta menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Hingga akhirnya proses *ruilslagh* dihentikan tetapi akibatnya, PT Bahana Jasa Pratama membawa kasus ini ke jalur hukum, karena mereka merasa dirugikan dengan dihentikannya proses *ruilslagh* tersebut.

Sejak tahun 2005 sampai sekarang, sudah beberapa kali dilakukan renovasi serta penambahan berbagai fasilitas alat-alat kesehatan terus dilakukan. Bahkan sudah sebagian besar bangunan RSUD yang lama diganti dengan bangunan yang baru, setidaknya mengalami renovasi berat. Sehingga sekarang, kondisi fisik RSUD Pematangsiantar sudah berubah total, jauh dari kesan bangunan kolonial Belanda.

9. Rumah Sakit Tentara



Salah satu sudut depan bangunan RS Tentara Pematangsiantar di Jalan Gunung Simanuk-manuk. (foto/dok/jal)

Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Pematangsiantar terletak di Jalan Gunung Simanuk - manuk Nomor 6 Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat Provinsi Sumatera Utara. Sejarah rumah sakit ini berawal ketika pada tahun 1917 seorang dokter pribumi, dr. Mahmud Hamzah ditugaskan di Dinas Kesehatan di wilayah kota Pematangsiantar.

Penempatan dokter ini sekaligus dengan pembangunan rumah dinas di daerah Timbang Galung yang juga dipergunakan untuk merawat pasien dari daerah. Tak lama setelah penempatannya dibangunlah sebuah rumah sakit milik pemerintah daerah (*landschap*) yang bentuknya sederhana tak jauh dari rumah dr Mahmud, menunggu pembangunan rumah sakit permanen selesai. Kondisi kesehatan penduduk ketika itu menurut Asisten Residen

H.E.C. Quas , tampak memprihatinkan akibat banyaknya jenis wabah penyakit yang menyerang. Banyak penduduk di kota Pematangsiantar sekitarnya bahkan kaum pendatang yang terserang penyakit kudis (rasa atau rutu). Selain itu banyak pula yang menderita penyakit tulang (buhak) yang kerap menimbulkan kelumpuhan jika diabaikan. Guna mencegah meluasnya penyebaran beragam jenis penyakit tersebut, pada pertengahan tahun 1928 sebuah rumah sakit dibangun di kota Pematangsiantar dengan biaya dari pemerintah daerah. Untuk konstruksi bangunannya serta pembangunan perumahan staf dialokasikan dana sebesar f. 179.000. Sebelumnya di lokasi tersebut sudah ada bangunan tua namun dianggap tidak lagi cocok. Rumah sakit yang baru dibangun ini menawarkan ruang untuk 150 tempat tidur .

Bangunan rumah sakit yang diresmikan tahun 1929 ini sekarang dipergunakan menjadi Rumah Sakit Daerah Militer I/BB. Kerja keras dr. Mahmud Hamzah selama 25 tahun mengabdikan di Pematangsiantar berhasil membangun dan mengembangkan fasilitas kesehatan masyarakat.

Pekerjaan pelayanan medis terus diupayakan untuk ditingkatkan dalam beberapa tahun setelah bangunan selesai dikerjakan. Sebagian pendapatan dari rumah sakit diupayakan untuk menangani jumlah pasien yang dirawat agar bisa terus ditingkatkan. Hal ini tidak memungkinkan jika hanya dikerjakan sendiri oleh orang yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah.

Mengingat alasan inilah dr. Mahmud Hamzah kemudian meminta penambahan tenaga medis. Permintaan ini disetujui pemerintah kolonial Belanda dengan mengangkat seorang perawat asal Eropa, Miss Smith. Dalam suratnya Nomor 14756/1 tanggal 18 Oktober 1928 ke Gubernur General Hindia Belanda, H. Beeuwkes selaku

Asisten Residen juga meminta tambahan tenaga dokter dari kalangan pribumi untuk membantu tugas dr. Mahmud Hamzah di wilayah onderafdeeling Simaloengeon. Gajinya akan diupayakan dikeluarkan dari anggaran keuangan daerah.

Pemerintah Gubernur General melalui Kepala Kesehatan Masyarakat dilaporkan menanggapi surat tersebut. Pada pertengahan tahun 1929 seorang dokter pribumi bernama Mr. Acmad Ramali dikirimkan untuk bertugas di Pematangsiantar dan Simalungun. Pejabat lanskap kemudian membuat kebijakan pembayaran saat masuk rumah sakit yang kontribusi biaya perawatan dari 1% dari gaji bulanan mereka per hari.⁹⁸

Dilansir dari laman Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar, status rumah sakit ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1949 terbentuklah Rumah Sakit Militer dengan sebutan *Hospital Militer*. Sebagai Kepala Rumah Sakitnya adalah Mayor CDM dr. Suryo. Pada tahun 1951 sebutan *Hospital Militer* diubah menjadi *Rumah Sakit Tentara* dengan dr. Sajiman sebagai pimpinannya.

Pada tahun 1952 sebutan *Rumah Sakit Tentara* dirubah lagi menjadi *Tempat Perawatan Tentara* dan sebagai pimpinannya adalah Letnan Kolonel CDM dr. Imam. Pada tahun 1982 sebutan Rumah Sakit Militer 021 Pantai Timur dirubah lagi menjadi *Rumah Sakit Resort Militer 022 Pantai Timur*. Pada tahun 1986 sebutan Rumah Sakit Resort Militer 022 Pantai Timur dirubah kembali menjadi Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.03 Pematangsiantar sampai saat sekarang, sesuai Surat Keputusan Panglima Daerah Militer I/ Bukit Barisan nomor: Skep 118 II 1986 tanggal 18 Pebruari 1986.

⁹⁸ *Ibid.*

Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar memiliki visi “Menjadikan rumah sakit kebanggaan prajurit, PNS TNI dan keluarganya serta masyarakat umum. Sedangkan misinya adalah “Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi Prajurit, PNS TNI dan keluarganya serta masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kesehatan”. (<https://rumkit-siantar.net>, diakses 21 Maret 2022)

10. Stasiun Kereta Api



Stasiun Kereta Api Pematangsiantar era kolonial (foto: kitlv.nl)



*Gedung Utama Stasiun Kereta Api Pematangsiantar yang merupakan warisan kolonial Belanda namun masih dipergunakan hingga saat ini dengan mempertahankan konstruksi awalnya.
(foto/dok.jal)*

Stasiun Kereta Api Pematangsiantar yang terletak di Jalan Kartini Bawah, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat ini diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1915. Pembangunan jalur kereta api ini awalnya untuk kepentingan pihak perkebunan yang pengelolaanya dilakukan oleh NV. *Deli Spoorweg Maatschappij (DSM)*. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan jawatan kereta api di Sumatera, sementara di Jawa sudah ada 11 perusahaan sejenis.

Jalur kereta api yang ada di Pematangsiantar, merupakan jalur penghubung ke Kota Medan. Pembangunannya diperkirakan sama dengan pembukaan jalur kereta api Medan-Besitang, Tanjung Balai dan Rantau Prapat yang diselesaikan pada tahun 1934. Dengan adanya

jalur kereta api ini, pengangkutan komoditi perkebunan di daerah Deli dan sekitarnya semakin lancar.

Secara umum, bangunan stasiun yang masih merupakan warisan kolonial ini tidak banyak berubah. Bagian depan stasiun, pada pintu masuk dihiasi dengan bentuk bulatan-bulatan yang terbuat dari bata. Sedangkan atap stasiun terbuat dari genteng. Pada sisi kiri dan kanan bangunan stasiun terdapat gudang-gudang penyimpanan barang-barang. Tetapi kondisi pergudangan kini sudah banyak berubah karena telah dialihfungsikan oleh warga atas persetujuan pengelola, yakni PT. Kereta Api Indonesia

11. Museum Simalungun

Museum Simalungun yang terletak di Jalan Sudirman No.10 Kota Pematangsiantar ini didirikan pada tanggal 10 April 1939. Ide pendiriannya telah mulai berkembang sejak tahun 1928 yang diawali dengan pertemuan antara perwakilan Raja-raja di Simalungun, pemuka-pemuka masyarakat dan juga kalangan cerdik-pandai dan pejabat-pejabat pemerintahan kolonial Belanda di Pematangsiantar-Simalungun. Pembicaraan awal adalah usaha mengenai pembangunan Simalungun baik dalam bidang pertanian, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Salah satu yang menjadi pokok pembicaraan kala itu adalah mengenai kebudayaan dan keberadaan barang-barang purbakala yang merupakan warisan dari para leluhur Simalungun.



Museum Simalungun pada Masa Kolonial (foto: kitlv.nl)



*Museum Simalungun sekarang di Jalan Sudirman
Pematangsiantar (foto/dok.jal)*

Jika tidak ada upaya untuk pelestariannya, diyakini barang-barang antik yang memiliki nilai sejarah tinggi tersebut akan hilang begitu saja. Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuklah Dewan Pengawas Museum Simalungun dalam sebuah Harungguan Raja-raja Simalungun, yang tugasnya mengumpulkan barang-barang kuno peninggalan leluhur Simalungun. Pengurusnya waktu itu adalah: Ketua: A.H.Doornik (*Ketua Kerapatan Na Bolon*); Sekretaris: Tuan Maja Purba (*Kepala Mantri Algemene Dients*) dengan anggota: Tuan Mogang Purba (Raja Purba), Jaudin Saragih (*Pangulu Balei*), Tn. R.H.Volbeda (Adm Perkebunan Laras). Sedangkan Penasehat adalah: Dr.P.Voorhoeve⁹⁹.

Lahan yang menjadi lokasi Museum Simalungun sekarang merupakan pemberian dari *burgemeester* (Walikota). Selain tanah juga diberikan bantuan sebesar 1.650 *poundsterling* untuk keperluan pembangunan gedung museum. Gedung pertama yang dibangun pada 10 April 1939 masih berbentuk *balei bolon*, karena untuk mendirikan *rumah bolon* memerlukan biaya besar.

Konstruksi bangunan menggunakan galang sebanyak 4 buah sebelah, atap ijuk, dinding papan/nibung serta memakai para-para (*etalase*). Peresmian museum dilakukan pada tanggal 30 April 1940 dengan menggelar upacara adat Simalungun. Saat peresmian, hadir pejabat-pejabat pemerintahan kolonial, Raja- raja Simalungun, para pengetua adat dan pemuka masyarakat.

⁹⁹ T.Moesa Sinaga (Tim).1983. *Sejarah Museum Simalungun Pematangsiantar* Yayasan Museum Simalungun, Pematangsiantar.



Plank inventaris Museum Simalungun dan Rumah Bolon Pematang Purba. (foto/dok/jal)

12. Becak Antik Khas Siantar



Becak antik khas Siantar yang dipamerkan pada saat Perayaan Jubileum 50 Tahun Dewan Gereja Asia tahun 2007 di Kompleks Jalan Gereja Pematangsiantar. (foto/dok/jal)

Becak bermotor yang tergolong antik dan menjadi salah satu ikon Kota Pematangsiantar merupakan kendaraan sisa Perang Dunia II. Becak Siantar berbeda dengan becak bermesin yang ada di mana-mana. Sepeda motor yang digunakan rata-rata merupakan bekas tunggangan pasukan Sekutu pada Perang Dunia II, bermerek BSA (*Birmingham Small Arms Company*). Perusahaan yang didirikan untuk menyuplai persenjataan Inggris pada Perang Crimean (1853-1856).

Setelah perang usai, BSA terus mengembangkan produknya. Selama PD II, BSA menjadi salah satu pemasok utama kendaraan militer untuk tentara Inggris. Pada masa itu, mereka memproduksi 126.000 sepeda motor tipe M20 berkapasitas mesin 500 cc. Sepeda motor yang pertama kali dibuat tahun 1941 inilah yang ikut dibawa pasukan sekutu ke Pematangsiantar pasca pendudukan Jepang di Indonesia.

Produk BSA di Pematangsiantar sebenarnya tak hanya yang dimiliki tentara Sekutu, tetapi juga pengusaha partikelir pemilik perkebunan di sekitar kota hingga bekas administratur pemerintahan kolonial Belanda. Setelah kepergian, Sekutu dan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, ratusan unit sepeda motor BSA di Pematangsiantar ditinggalkan begitu saja, termasuk milik tentara Inggris. Sebagian pengusaha perkebunan Belanda dan Eropa lainnya berbaik hati dengan memberikannya ke penduduk pribumi bekas pegawai mereka.

Selain BSA, sepeda motor *old fashion* lainnya, seperti *Norton*, *Triumph*, *BMW*, hingga *Harley Davidson*, juga banyak yang dijadikan becak. Suku cadang BSA mudah ditiru dan bisa menerima onderdil dari sepeda motor lain, misalnya RX King atau Honda CB. Efisien dalam soal *sparepart* menjadi sangat penting karena pabrik BSA sejak 1972 sudah ditutup

dan tak lagi berproduksi, seiring dengan kebakaran besar yang melanda pabrik mereka. Sepeda motor BSA mulai dijadikan becak sekitar tahun 1950-an. Para partikelir becak mencari sepeda motor BSA hingga ke berbagai pelosok Tanah Air. Pada periode 1980-1990 di Pematangsiantar masih terdapat sekitar 2.000 unit becak bermesin BSA. Siantar merupakan satu-satunya kota di dunia yang masih mengoperasikan sepeda motor BSA dalam jumlah besar.

Keberhasilan penarik becak ini ditopang oleh kerja para mekanik dan pemilik bengkel yang bisa dianggap sebagai maestro untuk urusan sepeda motor BSA. Di Pematangsiantar, ada lima bengkel dan dua orang yang dianggap berjasa terus melestarikan becak siantar. Bengkel Handayani milik Syafii Leo, bengkel Rahayu milik Mbah Sari dan bengkel bubut milik Rohim. Dua lainnya adalah bengkel khusus dinamo BSA milik Tikno dan bengkel milik Yadi di daerah Karang Sari. Meski BSA sudah tak lagi memproduksi *sparepart* tetapi sepeda motor BSA bisa bertahan di Pematangsiantar. Seiring waktu, becak khas Siantar ini semakin berkurang akibat dioperasikan sebagai becak motor biasa.

Becak antik Siantar ini sering digunakan untuk menyambut tamu-tamu khusus maupun pejabat-pejabat penting yang datang ke Pematangsiantar, maupun saat adanya perayaan-perayaan tertentu, termasuk ketika musim kampanye ketika Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan becak antik Siantar benar-benar menjadi ikon kota Pematangsiantar yang bernilai historis.

Kini, kota Pematangsiantar juga memiliki sebuah tugu becak yang dibangun di Lapangan Parkir Pariwisata Jalan Merdeka pada tahun 2016. Ketika itu Drs. Jumsadi Damanik,SH.,M.Hum mengemban tugas sebagai Penjabat

Walikota, karena adanya penundaan Pilkada Pematangsiantar pada akhir tahun 2015. Tugu Becak yang diprakarsai Presiden *BSA Owner Motorcycles (BOMS)*, Kusma Erizal Ginting ini diresmikan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, M.Si. Sekarang setiap hari di lokasi Tugu Becak ini banyak warga berkunjung sembari melakukan swafoto, khususnya saat sore hari atau hari-hari libur.



Prasasti peresmian Tugu Becak Siantar oleh Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi pada tahun 2016. (foto:dok/jal)



Tugu Becak di Lapangan Pariwisata Jalan Merdeka kota Pematangsiantar. (foto:dok/jal)

13. Lapangan Merdeka (Taman Bunga)



Alun-alun di depan Balai Kota Pematangsiantar tahun 1925, yang sekarang telah menjadi Lapangan Merdeka. (foto: kitlv.nl)



*Lapangan Merdeka (Taman Bunga) sekarang di depan Balai Kota
(foto:dok/jal)*

Masyarakat Kota Pematangsiantar lebih mengenal Lapangan Merdeka sebagai Taman Bunga. Karena memang lapangan ini dipenuhi dengan pepohonan dan bunga-bunga yang sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Padahal awalnya, era pemerintahan kolonial Belanda, lapangan ini merupakan fasilitas Balai Kota setelah Pematangsiantar dijadikan daerah *gemeente* (kota praja) yang berfungsi sebagai lapangan terbuka alun-alun kota atau *esplanade*¹⁰⁰.

Lapangan Merdeka sudah ada sejak era pemerintahan tradisional Kerajaan Siantar untuk lokasi berbagai pertemuan dan upacara adat kerajaan. Belanda hanya menatanya setelah

¹⁰⁰ *Esplanade* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai lapangan terbuka yang berada di dekat kantor *gemeente* (balai kota). Sebelum menjadi *esplanade*, lapangan ini sudah digunakan pada masa Kerajaan Siantar sebagai tempat kegiatan upacara kerajaan, karena dari sekian banyak lapangan dan tanah kosong, lapangan ini adalah yang paling dekat dengan rumah kerajaan yang terletak di kampung Simalungun.

Pematangsiantar menjadi *controleur* dan menguasai kerajaan-kerajaan di Simalungun termasuk Kerajaan Siantar. Lapangan ini mulai berkembang setelah pemerintah Belanda membuat jalan-jalan aspal yang disebut *wandelpad* dan membangun berbagai sarana serta bangunan di sekelilingnya.

Lapangan Merdeka terletak di Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat dengan luas \pm 3.600 meter persegi dengan panjang \pm 80 meter dan lebar \pm 45 meter. Setelah kantor *gemeente* Siantar dibangun, selain dijadikan sebagai alun-alun kota, lapangan ini juga berfungsi sebagai tempat perayaan hari-hari nasional pemerintah kolonial Belanda, seperti upacara hari ulang tahun kelahiran Ratu Wilhelmina (Ratu Belanda pada masa itu). Selain itu, lapangan ini juga sering dipakai untuk bermain sepakbola oleh orang-orang Belanda¹⁰¹.

Saat kekuasaan kolonial Belanda beralih ke Jepang pada tahun 1942, lapangan ini tetap berfungsi sebagai alun-alun kota. Jepang menyebutnya dengan istilah *fuku raidu* (istilah alun-alun kota dalam bahasa Jepang). Pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949, di lapangan ini terjadi insiden saat ada berita proklamasi kemerdekaan wilayah Sumatera Timur, yang baru dikumandangkan pada 30 September 1945 dan setelahnya pada tanggal 3 Oktober Mr. T.M Hasan mengumumkan bahwa dirinya telah resmi menjadi Gubernur Sumatera.

Lapangan Merdeka menjadi saksi pertempuran pasukan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan pasukan Belanda pada peristiwa Siantar Hotel 15 Oktober 1945 saat

¹⁰¹ Jefri Simbolon. 2016. *Lapangan Merdeka Pematangsiantar Tahun 1957-2004 (Sebuah Tinjauan Historis)*. Skripsi S-1 pada Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Sumatera Utara. Medan.

terjadinya agresi militer Belanda. Berlatar belakang dari peristiwa inilah sebabnya lapangan ini disebut dengan Lapangan Merdeka hingga saat ini. Secara resmi digunakan oleh pemerintah pada tahun 1960 setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1960 tentang lapangan-lapangan yang ada di kota Pematangsiantar.

Saat ini, Lapangan Merdeka tidak lagi berpagar dan terbuka untuk umum tanpa ada pungutan apapun. Bahkan Pemerintah Kota Pematangsiantar sudah menambah sejumlah fasilitas olahraga, tempat bermain anak-anak maupun bangku-bangku terbuat dari besi untuk duduk santai pengunjung serta trotoar yang diperlebar. Setiap pagi dan sore hari, masyarakat cukup banyak memanfaatkan Lapangan Merdeka sebagai tempat olahraga, khususnya jalan dan berlari.

14. Pusat Pasar Horas

Pusat Pasar Horas yang berada di inti kota Jalan Merdeka dan jalan Sutomo, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat ini merupakan pengembangan dari pasar rakyat yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1918. Lokasinya tidak terlalu jauh dengan pusat Kerajaan Siantar di Pematang. Semakin bertambah dan berkembangnya berbagai aktivitas kota, pusat kegiatan perdagangan juga semakin menggeliat. Baik untuk konsumsi kota Pematangsiantar sendiri maupun bagi daerah penopang sekitarnya (*hiterland*).

Awalnya Pasar Horas bernama pasar Trikora, yang arealnya hanya seluas 9.300 m². Penggunaan lahan dari pusat perdagangan ini sangat banyak, dengan beraneka ragam kegiatan dengan kios-kios pedagang masih sangat sederhana. Hanya terdiri dari beberapa balairung terbuka, untuk jualan

beras, kain kodian yang sifatnya kecil-kecilan. Selebihnya dipergunakan untuk tempat pemberhentian sarana transportasi yang masih sangat sederhana seperti, sado, kereta lembu dan motor.



Kondisi pasar dan geliat aktivitas perdagangan di Pematangsiantar sekitar tahun 1938. (foto: kitlv.nl)





Kondisi pasar dan aktivitas perdagangan di Pematangsiantar sekarang (foto:dok/jal)

Menurut dokumen Dinas Pasar tahun 1980, pada tahun 1934 balairung yang ada ditambah dan luas arealnya juga bertambah. Pertambahan tersebut karena mengingat semakin bertambahnya atau semakin meningkatnya jumlah penduduk yang diakibatkan adanya arus urbanisasi dan transmigrasi dari Pulau Jawa ke perkebunan-perkebunan yang ada di sekitar Kota Pematangsiantar. Dengan perluasan tersebut, kemudian ditata kembali letak para pedagang.

Dulunya antara lokasi para pedagang menyatu dengan pemberhentian alat pengangkutan, sekarang sudah terpisah. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1958-1960 ditandai dengan munculnya *parengge-rengge*, yaitu para pedagang kaki lima yang umumnya terdiri dari kaum ibu-ibu. Maraknya *parengge-rengge* ini berkaitan dengan

pemberontakan PRRI sehingga banyak penduduk dari desa-desa di Simalungun pindah ke kota Pematangsiantar.

Pemerintah daerah kemudian membangun kios-kios tambahan di sekitar lokasi tersebut seluas 2.868 meter persegi. Selanjutnya didirikan toko-toko sebanyak 52 pintu di Jalan Surabaya yang terletak tidak jauh dari lokasi pasar tersebut. Pada akhir tahun 1961, sesuai dengan perkembangan politik ketika itu maka pasar-pasar yang telah dibangun ini diberikan nama Trikota I untuk balairung yang awal dan Trikora II untuk balairung-balairung yang dibangun kemudian.

Sejalan dengan itu, pada tahun 1969 dibangun lagi kios-kios di Jalan Wandelpaad dan Jalan Diponegoro. Pada mulanya kios-kos di Jalan Diponegoro direncanakan untuk jualan barang-barang antik (*souvenir*). Namun pada akhirnya tempat tersebut dipakai para pedagang sebagai toko-toko kelontong, bahkan ada juga yang sempat menggunakannya sebagai lapo tuak. Pada bulan April 1978, toko-toko di Jalan Surabaya dibongkar, dan dijadikan kembali menjadi jalan umum. Mereka yang mempunyai hak sewa toko, dipindahkan ke Pasar Dwikora Parluasan sekarang. Catatan Dinas Pasar, pada akhir tahun 1978 seluruh areal dan luas bangunan sebagai pusat perbelanjaan di Kota Pematangsiantar sudah mencapai 49.900 m², dengan luas bangunan sekitar 19.727 m².

Areal seluas itu tersebar di 6 (enam) tempat yakni: Pasar Trikora I dan Trikora II, Pasar Dwikora, Pasar Jalan Wandelpaad, Pasar Jalan Diponegoro dan Pasar Rambung Merah. Berdasarkan master plan Kota Pematangsiantar waktu itu, kebutuhan pasar tahun 1978 untuk 1.000 jiwa

adalah 200 m², sedangkan jumlah penduduk pada tahun itu adalah 139.032 orang.¹⁰²

Pada tanggal 27 Juli 1980 sekitar pukul 23.45 Wib terjadi musibah kebakaran di Pasar Trikora I. Terbakarnya Pasar Trikora I, mengakibatkan para pedagang kehilangan mata pencaharian. Untuk menanggulangnya, sementara waktu para pedagang tersebut ditampung di Pasar Dwikora Martoba (Parluasan sekarang). Pembangunan kembali Pasar Trikora I sekaligus dengan membangun Pasar Trikora II menjadi menjadi satu dan mengganti namanya menjadi Pusat Pasar Horas berdasarkan SK Walikota Nomor. 290/WK.29-12-1980.

Atas persetujuan Gubernur Sumatera Utara, dilakukan studi kelayakan yang dipercayakan kepada Konsultan Andalas Graha Utama Medan. Studi tersebut digunakan oleh pemerintah daerah tingkat II Pematangsiantar sebagai pedoman untuk memohon kredit Inpres Nomor 8 tahun 1979 kepada Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juli 1981 Nomor 170/1981, kredit disetujui sebesar Rp. 4.257.000.000,- yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pematangsiantar. Pelaksanaan pembangunan Pusat Pasar Horas dipercayakan kepada PT. Tulung Agung sebagai pemenang tender, dengan jumlah tawaran sebesar Rp. 4.129.787.525,-. Peletakan batu pertama oleh Gubernur E.W.P. Tambunan pada tanggal 24 Oktober 1981. Konstruksi pembangunan Pusat Pasar Horas terdiri dari 4 gedung utama yang dibangun di atas areal seluas 24.771 m², dengan jumlah kios sebanyak 3.419.

¹⁰² *Arsip Dinas Pasar Kota Pematangsiantar Tahun 1980*

Peresmian dilakukan Gubernur Sumatera Utara berikutnya, Kaharuddin Nasution pada tanggal 6 Agustus 1983. Sejak saat itu, kegiatan perdagangan di Pusat Pasar Horas semakin banyak dimanfaatkan penduduk Kota Pematangsiantar dan sekitarnya. Kegiatan perdagangan ini juga sudah dilakukan sebelum diresmikannya gedung tersebut. Selanjutnya sejak tahun 2014, Pusat Pasar Horas tidak lagi dikelola Dinas Pasar tetapi sudah dimandirikan dengan pengelolaan oleh Perusahaan Daerah Horas Jaya, yang dibentuk semasa Walikota dijabat oleh Hulman Sitorus, SE.

D. Bangunan Keagamaan

1. Mesjid Raya Pematangsiantar



Salah satu sisi Mesjid Raya Kota Pematangsiantar dilihat dari Jalan Sapiro. (foto/dok.jal)

Mesjid yang terletak di Jalan Sipirok dan Jalan Mesjid, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat ini merupakan mesjid tertua di Kota Pematangsiantar. Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara No. LB/2C/1110/77 tanggal 7 April 1977.¹⁰³

Secara fisik, mesjid ini mulai didirikan pada tahun 1911 yang dipelopori oleh: Penghulu Hamzah, Tuan Syeh H. Abdul Jabbar Nasution, dr. M. Hamzah Harahap dan Dja Aminuddin. Sedangkan lahan mesjid awalnya merupakan hibah dari Raja Siantar kepada Pangulu Hamzah bin Japarentah Dauley tahun 1910, masa pemerintahan Asisten Residen Kolonial Belanda, Tuan Kuast. Raja Siantar kemudian menerbitkan surat grant tanah lokasi mesjid pada tahun 1921 dengan nomor persil 80 dan 85, dengan maksud agar kelak tidak terjadi silang sengketa dengan masyarakat sekitarnya.

Ketika awal didirikan, konstruksi bangunan mesjid ini terbuat dari tiang kayu berdinding papan serta atasnya dari daun nipah, tanpa pintu dan jendela. Awalnya mesjid ini sering disebut Mesjid *Godang* (Mesjid Besar) dan ada pula yang menyebutnya Mesjid Jami. Karena waktu itu, hanya Mesjid Raya satu-satunya mesjid sehingga warga yang datang untuk sholat Jumat banyak juga yang berasal dari Kampung Melayu, Marihat, Tomuan, Kampung Bantan, bahkan dari luar Siantar.

Renovasi Mesjid Raya mulai dilakukan pada tahun 1927 dengan dana dari masyarakat. Konstruksinya mulai dibangun secara permanen dengan ukuran 13 x 13 meter. Uniknyanya, empat buah tiang penyangga utama dalam mesjid

¹⁰³ Maskut Harahap, 1994, *Sejarah Singkat Mesjid Raya Pematangsiantar*

dengan diameter 70 cm sama sekali tidak menggunakan besi beton maupun cor. Tetapi susunan batu bata yang dipasang dengan konstruksi melingkar. Selanjutnya secara bertahap, renovasi bangunan mesjid berikut fasilitasnya terus dikembangkan hingga terlihat megah seperti kondisi sekarang.

Dalam perkembangan selanjutnya, mesjid ini terus diperlengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk perpustakaan dan lokasi parkir kendaraan. Bahkan menurut pengelola mesjid, gedungnya yang megah dan berlantai dua itu, gaya arsitekturnya dibangun dengan corak arsitektur kombinasi antara beberapa mesjid terkenal lainnya yakni, Mesjid Nabawi di Madinah, Mesjid Azizi di Tanjung Pura Langkat dan sejumlah mesjid lainnya yang ada di Pulau Jawa. Bahkan mesjid dengan konstruksi permanen ini dirancang untuk daya tahan seratusan tahun kedepan

2. Gereja HKBP Resort Pematangsiantar



Gereja HKBP Pematangsiantar tahun 1934 (foto:kitlv.nl)

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Pematangsiantar terletak di Jalan Gereja, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan. Berdirinya HKBP Pematangsiantar sangat berkaitan erat dengan kedatangan orang-orang Batak Toba dari Tapanuli ke Simalungun dalam rangka mencari penghidupan yang baru.¹⁰⁴ Karena mereka mendengar kesuburan tanah Simalungun sehingga cocok untuk lahan pertanian.

Mereka yang hijrah dari Tapanuli ke Simalungun sejak tahun 1900-an kebanyakan sudah memeluk agama Kristen karena gencarnya penginjilan para missionari yang dipimpin Pdt.Dr.I.L.Nommensen di Tanah Batak. Apalagi, melalui kebijakan politik etisnya pemerintah kolonial Belanda kemudian membangun jaringan irigasi untuk keperluan persawahan di wilayah Siantar dan Pematang Bandar. Pembukaan areal persawahan inilah yang membuat makin banyaknya orang-orang Toba dari Tapanuli bermigrasi ke Sumatera Timur, seperti Pematang Bandar, Panei Tonga, Tanah Jawa, Tiga Dolok, Balata dan tempat- tempat lainnya.

Raja-raja di Simalungun pada waktu itu telah mengikat kontrak dengan kolonial Belanda melalui perjanjian pendek, sebagai bukti bahwa mereka mengakui pemerintahan Belanda di wilayah Simalungun. Penginjilan awal di Siantar juga dilakukan oleh Evangelis Tiophilus Pasaribu berdasarkan suruhan Tuan Pdt. G.Simon untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Tapanuli yang datang ke Siantar.¹⁰⁵

Sebagai tempat peribadahan hari Minggu, mereka mendirikan sebuah balerong (los) di persimpangan Jalan

¹⁰⁴ Purba, O.H.S. 1997. *Migran Batak Toba di Luar Tapanuli Utara: Suatu Deskripsi* Monora, Medan.

¹⁰⁵ Ibid

Toba dengan Jalan Tarutung. Konstruksinya sangat darurat, dinding terbuat dari papan, lantai tanah dan beratap ilalang. Jemaatnya berkisar 100 orang tetapi hanya para kaum pria. Salah seorang pemrakarsanya adalah Jaksa, Ria Jahya Nainggolan yang sebelumnya sudah berkenalan dengan Pdt.G.Simon ketika di Pematang Bandar. Kondisi ini berlangsung sampai dengan tahun 1906.

Tahun 1907, pemerintah kolonial Belanda memindahkan pusat pemerintahannya dari Perdagangan Tomuan ke Pematangsiantar dengan menempatkan *Controleur* dari Batubara. Seiring dengan kebijakan Belanda tersebut, Pdt.Dr.I.L. Nommensen juga memindahkan Pdt.Edward Muller dari Pematang Bandar ke Pematangsiantar, persisnya tanggal 29 September 1907. Pengangkatan Pdt. Edward Muller inilah kemudian yang dianggap sebagai cikal- bakal lahirnya HKBP Pematangsiantar¹⁰⁶

¹⁰⁶ L.Sitorus, (Tim Sejarah). 2007. *Sejarah Jubileum 100 Tahun HKBP Pematangsiantar Ressort Pematangsiantar Distrik V Sumatera Timur. Pematangsiantar*



Gereja HKBP Pematangsiantar sekarang. (foto/dok.jal)

Selanjutnya secara bertahap, sejak tahun 1927 gereja ini mengalami pemugaran terus-menerus. Gereja ini diresmikan pada tanggal 16 Desember 1928 oleh Pdt.Schmidt sebagai Direktur *Rheinischen Mission Gesellscharf (RMG)* dari Barmen (Jerman) dan didampingi Ephorus HKBP waktu itu, Pdt. J.Warneck. Pesatnya perkembangan HKBP Pematangsiantar ini tidak terlepas dari pergolakan politik waktu itu. Peranan sejumlah pendeta yang berasal dari Jerman juga turut mengembangkan gereja dan pendirian sekolah-sekolah di kompleks gereja.

Pada tahun 2007 lalu, HKBP Pematangsiantar merayakan Jubileum 100 Tahun, persisnya 29-30 September 2007. Perayaan Jubileum ini juga dihadiri langsung oleh Hans Muller sebagai undangan khusus dari Jerman yang

merupakan cucu dari Pdt. Ed.Muller, misionaris pertama di HKBP Pematangsiantar.

Masih berada di kompleks lahan HKBP Jalan gereja Pematangsiantar, terdapat sebuah pohon terang berkonstruksi baja yang disebut-sebut merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Pohon terang berbentuk pohon pinus setinggi 33 meter ini, dibangun pada masa pemerintahan Wali Kota, Drs. Abu Hanifah dan Bupati Simalungun, Drs. Djabanten Damanik tahun 1996.

Pemrakarsa pembangunan pohon terang ini adalah Panitia Natal Oikumene Kota Pematangsiantar Tahun 1996. Panitia Natal ini kemudian membentuk Tim Pembangunan Pohon Natal Oikumene yang diketuai Kadis Pekerjaan Umum (Ir. Agus Gultom), Wakilnya (Muda Saragih BE), Sekretaris (Ir.Jhonson Tambunan) dan Bendahara, (Ir.RE.Siahaan). Pohon terang ini awalnya dibangun sebagai wujud kebersamaan secara oikumenis gereja-gereja yang ada di Kota Pematangsiantar dan Simalungun. Biaya pembangunannya juga tidak langsung menggunakan APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar atau Kabupaten Simalungun, tetapi diupayakan lewat patungan sejumlah donateur yang didahulukan oleh salah seorang rekanan Dinas Pekerjaan Umum, Ir. Benny Siagian sebesar Rp 168 juta.



Pohon Terang konstruksi baja di Kompleks HKBP Pematangsiantar Jalan Gereja. (foto/dok.jal)

Pada saat hari raya Paskah dan Natal, lampu-lampu hias yang ada di sekeliling pohon terang dinyalakan dan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Pematangsiantar serta orang-orang yang melintas di jalan. Apalagi Jalan Gereja merupakan penghubung Kota Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun menuju destinasi Danau Toba, Samosir dan Parapat. Meski bukan bagian dari bangunan bersejarah, tetapi pohon terang ini telah menjadi salah satu ikon keagamaan di Kota Pematangsiantar, khususnya bagi umat Kristen yang terdiri dari berbagai denominasi gereja.

3. Gereja Katolik St. Laurentius Brindisi



Gereja Katolik St. Laurentius Brindisi Jalan Sibolga Pematangsiantar. (foto/dok.jal)

Gereja yang terletak di Jalan Sibolga, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan ini merupakan gereja Katolik yang pertama berdiri di Kota Pematangsiantar di bawah naungan Keuskupan Agung Medan. Gereja yang telah menjadi paroki mandiri ini, dibangun di era kolonial Belanda 1 Juli 1931. Awalnya gereja ini bergabung dengan Paroki Katredal Medan. Saat ini gereja yang memiliki jemaat sebanyak 5.316

jiwa ini dipimpin oleh RP. Leopold Purba, OFM. Cap sebagai Parochus yang dibantu sejumlah pastor lainnya dengan tugas masing-masing.

Berdirinya gereja ini tidak terlepas dari banyaknya kaum misionaris yang mulai berdatangan ke Siantar dan Simalungun pada tahun 1902-an ke Prefektur Apostolik Padang. Tahun 1923, Kongregasi Belanda, para Frater berkarya sebagai pimpinan muda di Padang, seperti sebelumnya Suster-suster Berbelas Kasih (Tillburg) masuk lebih dulu pada tahun 1885. Sekitar tahun 1925, para imam dan frater kapusin datang dari Belanda untuk mendukung perluasan tempat berkarya para misionaris di Sumatera Utara (Medan dan Daerah Siantar). Orang-orang Batak yang berada di daerah ini sempat melarang para misionaris tersebut masuk ke wilayah mereka sampai tahun 1930-an. Namun pada tahun 1931 telah ada seorang imam Katolik berada di Pematangsiantar datang dari tempatnya bekerja di dataran tinggi Tapanuli untuk mencari orang-orang yang ingin menjadi penganut Katolik.¹⁰⁷

Ketika itu, perkembangan kota Medan dan Pematangsiantar sekitarnya memiliki daya tarik yang atraktif akibat pembukaan lahan-lahan perkebunan, serta populasi penduduk yang berkembang dengan cepat. Meski masih dalam jumlah terbatas, umat Katolik mulai mendirikan biara-biara di wilayah ini. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1962 pelayanan di Medan dipisahkan dari pusat tempat biarawan berkarya dan menjadi satu unit pastoral. Kebijakan ini juga menandai perkembangan gereja Katolik di wilayah Sumatera Utara termasuk juga ke kota Pematangsiantar.

¹⁰⁷ <https://archdioceseofmedan.or.id/sejarah-kam>, diakses, Jumat, 25 Maret 2022

Tahun 1967, Paroki Jalan Bali didirikan, pendirian Paroki Jalan Medan pada tahun 1968 dan pada tahun 1976 distrik di luar Kota Pematangsiantar menjadi sebuah Distrik Pastoral yang terpisah.

Di sekitar kompleks lokasi gereja, terdapat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikelola Yayasan Cinta Rakyat yang sudah berdiri sejak awal kemerdekaan Indonesia. Lokasinya kompleks sekolah dan gereja yang cukup luas membuat sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang diminati anak-anak di Kota Pematangsiantar.

4. GKPS Sudirman dan Kantor Pusat Jl. Pdt. J.Wismar Saragih



Gereja GKPS Sudirman di Kota Pematangsiantar (foto/dok/jal)

Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Jl. Jendral Sudirman Resort Siantar I ini terletak di Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Selatan. Awalnya, gereja yang berdiri sejak tahun 1953 ini merupakan Huria Kristen Batak

Protestan Simalungun (HKBPS), yang kemudian berdiri sendiri menjadi GKPS, sejak 1 September 1963. Namun penginjilan kekristenan sendiri telah masuk sejak 02 September 1903 ke Simalungun yang dirintis oleh para missionaris atau badan zending dari *Rheinische Missionsgesellschaft (RMG)*, Jerman.

Sejak tahun 1903 RMG mendirikan gereja-gereja di Simalungun sebagai bagian dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan menggunakan Bahasa Batak Toba sebagai bahasa pengantar. Pendeta August Theis, penginjil RMG yang merintis penyebaran Injil di daerah Simalungun sempat mengira bahwa Simalungun merupakan bagian dari sub etnik Toba. Hal ini menyebabkan perkembangan penyebaran Injil di Simalungun kurang pesat. Resistensi masyarakat Simalungun terhadap orang-orang Barat dan kekurang-mengertian mereka terhadap bahasa Toba mengurangi efektivitas kegiatan RMG. Seorang zendeling RMG, Bregenstroth, akhirnya menyadari bahwa orang Simalungun bukanlah bagian dari Batak

Kesadaran di kalangan masyarakat Simalungun untuk meningkatkan usaha pengabaran Injil mempercepat laju penyebaran Injil di wilayah Simalungun, terutama setelah Bahasa Simalungun digunakan sebagai pengantar. Kemandirian ini berlanjut sampai jemaat HKBP di Simalungun memandirikan dirinya menjadi satu distrik hingga akhirnya mandiri total menjadi GKPS dan memberikan pelayanan bagi lingkungan sekitarnya di berbagai bidang¹⁰⁸.

¹⁰⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Kristen_Protestan_Simalungun, diakses , Minggu 27 Maret 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 1952 anggota Sinode Distrik Simalungun bersidang agar Simalungun berdiri sendiri dan terpisah dari HKBP, serta mengangkat pengurus harian dan majelis Gereja di HKBPS. Pemisahan ini dilakukan secara sepihak oleh HKBP distrik Simalungun, dan baru diakui oleh wakil-wakil HKBP pada rapat bersama antara delegasi HKBP dan Pengurus Harian HKBP Simalungun tentang *pandjaeon* (pemisahan) HKBP Simalungun di Pematangsiantar pada 21-22 Januari 1953 yang keputusannya ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1953.

Kantor pusat (Zentrum) GKPS semula berada di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan seberang jalan kompleks GKPS Jalan Sudirman Pematangsiantar. Sebelumnya kantor pusat GKPS adalah di Pematang Raya. Seiring dengan proses waktu, dan dengan berbagai pertimbangan oleh Pimpinan Pusat GKPS, dan persetujuan Sinode Bolon GKPS maka lokasi Kantor Pusat GKPS yang ada di Jalan Sudirman pun dipindahkan ke wilayah baru yaitu ke daerah kelurahan Bah Kapul kecamatan Siantar Sitalasari di kota Pematangsiantar. Pembangunan kantor pusat GKPS di lokasi ini dimulai sejak tanggal 4 September 1988 dimulailah pembangunan Kantor Pusat GKPS ke lokasi sekarang di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih dan resmi ditempati sejak tanggal 2 Maret 1992.

Lokasi kantor pusat GKPS yang berada di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara ini memiliki lahan cukup luas, sekitar 33 hektar. Selain gedung administrasi dan pelayanan Kantor Pusat GKPS, juga ada GKPS Peniel, dua unit bangunan auditorium yang akrab disebut Balai Bolon, Panti Karya Remaja sebagai pusat pelatihan keterampilan bagi anak-anak remaja. Di dalam kompleks lahan tersebut juga berdiri Kantor Perwakilan *United Evangelical Mission (UEM)* wilayah Asia.

Lokasi yang sangat luas ini sangat cocok dijadikan sebagai objek wisata religi dan budaya, khususnya pusat pengkajian Budaya Simalungun. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dijadikan lokasi agrowisata maupun kawasan wisata hutan kota. Sebab lokasinya sangat cocok untuk tempat *reatret* khususnya anak-anak muda gereja dan kegiatan-kegiatan out door serta pembinaan pemuda



*Kantor Pusat GKPS di Jl. dt. J.Wismar Saragih Pematangsiantar
(foto: dok/gkps.or.id)*



Kantor Seksi Bapa GKPS di Kompleks Kantor Pusat GKPS menghadap ke jalan raya, menggambarkan rumah adat etnik Simalungun (foto: dok/jal)

5. GPIB Maranatha Jl. Simbolon



Gereja GPIB Maranatha Pematangsiantar tahun 1935 (foto: kitlv.nl)



*Gereja GPIB Maranatha di Jl. Simbolon Kota Pematangsiantar
(foto/dok/jal)*

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Maranatha Pematangsiantar, terletak di Jalan Simbolon, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat telah berdiri sejak tahun 1935, di era kolonial Belanda. Kehadiran GPIB yang awal sejarahnya bernama *De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie* atau *Indische Kerk*.

Oleh karena itu pula sejarah GPIB berkaitan erat dengan pembentukan *De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie* atau *Indische Kerk* yang sekarang dikenal sebagai Gereja Protestan di Indonesia. Di mana pada tanggal 27 Februari 1605 melaksanakan ibadah Protestan untuk pertama kalinya di Benteng Victoria Ambon Maluku. pada tahun 1619, kantor pusat *De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie* dipindahkan ke Batavia, __sehubungan dengan

berpindahnya pusat pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Ambon ke Batavia¹⁰⁹.

Sebagaimana diketahui, bahwa kota Pematangsiantar ketika itu merupakan salah pusat kantor administrasi pemerintahan dan kantor-kantor perkebunan di wilayah Sumatera Timur. Para pegawai administrasi dan pegawai-pegawai perkebunan milik perusahaan Belanda dan Eropa lainnya kebanyakan penganut agama Protestan. Oleh karena itulah, mereka berinisiatif membangun tempat ibadah tersendiri, yang tidak jauh dari pusat perkantoran mereka.

Sampai sekarang, jemaat GPIB Maranatha masih mempertahankan konstruksi awal bangunan gereja, yang terletak tidak jauh dari Taman Hewan Pematangsiantar. Sebagai sebuah bangunan era kolonial yang hingga sekarang masih utuh, bangunan ini layak menjadi salah satu destinasi wisata historis di kota Pematangsiantar. Apalagi lokasinya yang berada tak jauh dari inti kota serta hanya terpaut beberapa puluh meter dari rumah dinas Wali Kota Pematangsiantar di Jalan MH.Sitorus.

¹⁰⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Protestan_di_Indonesia_bagian_Barat, diakses Minggu, 27 Maret 2022.

6. Gurdwara Shree Guru Nanak Devji Pematangsiantar



Para jemaat Gurdwara Shree Guru Nanak Devji Pematangsiantar tahun 1928 (foto/dok/kuil)



Gurdwara Shree Guru Nanak Devji Pematangsiantar di Jl. Thamrin (foto/dok/jal)



Lantai dua Gurdwara Shree Guru Nanak Devji yang digunakan sebagai tempat umat agama Sikh melakukan ibadah (foto/dok/jal)

Gurdwara Shree Guru Nanak Devji Pematangsiantar terletak di Jalan Thamrin, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur. Bangunan kuil bergaya arsitektur India Utara ini mulai berdiri sekitar tahun 1911, dirintis oleh etnik Punjabi yang ada di kota Pematangsiantar sekitarnya. Mereka datang ke wilayah Sumatera Utara dan secara khusus ke Pematangsiantar pada era kolonial Belanda, seiring dengan dibukanya usaha perkebunan sekitar abad ke 19. Selain Kuil, di lokasi tersebut sejak tahun 1956 juga berdiri Perguruan Khalsa, yang sampai sekarang masih eksis memberikan kursus Bahasa Inggris bagi masyarakat kota Pematangsiantar.

Mereka kebanyakan berasal dari daerah Amritsar dan Jullundur di kawasan Punjab, India Utara. Kuil ini merupakan tempat ibadah penganut Sikh atau atau yang dikenal sebagai agama dengan sepuluh guru yang digagas oleh Guru Nanak Sahib Ji akhir abad ke-15. Kebanyakan

mereka saat ini merupakan pedagang dan peternak sapi, karena memang kedua hal ini merupakan keahlian mereka sejak dari tanah leluhurnya.

Sebagai pendatang di kota Pematangsiantar, etnik Punjabi membawa serta misi budayanya dari daerah asalnya dan menjadikan agama Sikh sebagai pedoman hidup mereka. Namun karena mereka juga harus berinteraksi sosial dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga berdampak terhadap pembauran budaya dalam kehidupan mereka. Apalagi, sebagai kelompok masyarakat minoritas di tengah masyarakat yang plural di kota Pematangsiantar mereka harus beradaptasi beragam etnik lainnya yang juga punya budaya masing-masing.

Menurut salah seorang pengurus kuil, Surjit Singh Bramphur (03/04/2022), selain di Pematangsiantar, etnik Punjabi juga banyak bermukim di kota Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan daerah lainnya di Sumatera Utara. Lazimnya di wilayah masing-masing mereka juga mendirikan kuil sebagai tempat peribadahan. Mereka mudah dikenali karena mayoritas menganut agama Sikh.

Para lelaki memakai *pagh* (serban atau penutup kepala sebagai pelindung *kesh* (rambut) dan lambang kehormatan) serta gelang besi (*karra*) dengan postur tubuh yang tegap dan besar. Sedangkan kaum perempuan sering menggunakan *pardah* (selendang yang digunakan untuk menutupi bagian kepalanya) dan pakaian khas Punjab, berambut panjang, berhidung mancung dan berkulit kuning langsat.

Bangunan berlantai dua ini sudah beberapa kali direnovasi, namun yang paling besar dilakukan pada tahun 2000 dan diresmikan pada tanggal 16 Mei 2003 oleh Walikota Pematangsiantar, Drs. Marim Purba dan Bupati Simalungun, Ir. John Hugo Silalahi. Biaya pembangunannya berasal dari

para donateur yang kebanyakan adalah umat Sikh sendiri. Bagian lantai dasar, merupakan ruangan makan, sedangkan ruangan khusus ibadah berada di lantai dua.

“Setiap umat yang datang beribadah pada hari Minggu pagi lebih dulu makan, baru naik ke lantai dua untuk sembahyang. Namun makanan yang disajikan tak boleh mengandung daging atau ikan, tetapi yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Mereka datang dari kota Pematangsiantar, Simalungun bahkan dari luar daerah. Selain ibadah, kuil ini juga tempat upacara kematian, pernikahan serta penabalan nama anak yang baru lahir,” ujar Surjit Singh Bramphur.

Menurutnya, ajaran yang dibawa oleh Guru Nanak (guru pertama Sikh) bukanlah agama Hindu dan bukan pula Islam. Oleh karenanya, para pengikutnya tetap setia meyakini ajaran agama Sikh dengan kitab sucinya Sri Guru Granth Sahib yang dianggap merupakan Guru Tertinggi. Sedangkan Sikh sendiri berarti murid atau pelajar. Ajaran Sikh mempercayai hanya ada satu Tuhan (*Ek Onkar*) yang pantheistik sebagai penegak kebenaran dan keadilan (*Khanda*) serta berpegang pada sepuluh ajaran Guru Sikh yang terangkum dalam kitab suci (*Sri Guru Granth*).

Dasar ajaran agama Sikh adalah persatuan jiwa dengan Tuhan. Seorang Sikh harus disiplin antara pikiran dan tindakan. Sehingga lima hambatan, yakni: nafsu, kemarahan, ketamakan, keterikatan dan ego terhalau dan jiwa dapat bersatu dengan Tuhan. Kesepuluh Guru yang mengajarkan *Sikhisme* bagi pengikutnya adalah: Guru Nanak, Guru Angad, Guru Amar, Guru Ram, Guru Arjan, Guru Har Gobind, Guru Har Rai, Guru Har Krishan, Guru Tegh Bahadur dan Guru Gobind Singh.

7. Vihara Avalokitesvara dan Patung Dewi Kwan Im



*Vihara di samping istana Raja Siantar di Pematang tahun 1923
(foto: kitlv.nl)*



*Vihara Avalokitesvara Pematangsiantar sebelum terbakar tahun
2008 (foto/dok/jal)*



Kondisi saat ini Vihara Avalokitesvara Pematangsiantar setelah direnovasi (foto/dok/jal)



Patung Dewi Kwan Im di kompleks Vihara Avalokitesvara Pematangsiantar yang dibangun pada tahun 2003 (foto/dok/jal)

Vihara Avalokitesvara yang cukup terkenal di kota Pematangsiantar ini terletak di Jalan Gunung Pusuk Buhit, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan. Awalnya lokasi cikal-bakal vihara ini, merupakan lahan pemberian Raja Siantar kepada warga Tionghoa untuk tempat ibadah sekitar tahun 1920. Semasa kepemimpinan Biku Dharma Batama, sekitar tahun 1970-an dilakukan pengembangan dan pembangunan gedung tempat ibadah yang lebih besar untuk dapat menampung jemaat yang lebih banyak. Sayangnya, pada tahun 2008, gedung megah yang dirintis Biku Dharma Batama ini terbakar namun kini sudah dibangun kembali.

Selain mengembangkan vihara, Biku Dharma Batama juga membangun sekolah yang sekarang menjadi Perguruan Buddist Manjusri dan juga sebuah klinik perobatan. "Beliau memang memiliki misi sosial untuk layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya kepada orang-orang yang kurang mampu di Kota Pematangsiantar. Hanya saja, satu lagi misi beliau, yakni mendirikan Panti Jompo belum dapat diwujudkan, sampai akhir hayatnya tahun 1989 lalu," ujar Pengurus Yayasan Buddist Manjustri, Chandra (01/04/2022).

Kepemimpinan Biku Dharma Batama kemudian dilanjutkan Biku Dhyonavira. Biku yang meninggal tahun 2011 ini berinisiatif membangun patung Dewi Kwan Im di lokasi vihara sejak tahun 2000 dan diresmikan pada tanggal 15 November 2005. Sejak diresmikan, nyaris setiap hari warga ramai berkunjung, bahkan yang datang dari luar Sumatera Utara atau mancanegara. Namun menurut Candra, selama masa pandemi Covid-19, lokasi ini tertutup untuk umum dan hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja.

Bangunan megah di pelataran vihara ini diklaim merupakan patung Dewi Kwan Im terbesar di Asia Tenggara dengan ketinggian 22,8 meter. Oleh karena itulah, patung

yang berbahan dasar batu granit ini tampak menonjol ketinggiannya jika dibanding sejumlah bangunan lain di sekitarnya. Apalagi letaknya yang berada di pusat kota Pematangsiantar, kian menambah minat masyarakat mengunjunginya. Kemegahan vihara Avalokitesvara sudah terlihat dari kejauhan berbagai sudut kota Pematangsiantar karena keberadaan Patung Dewi Kwan Im yang menjulang tinggi.

Selain Dewi Kwan Im, di vihara ini juga terdapat beragam patung lainnya, seperti patung dari beberapa shio yang letaknya berurutan sesuai urutan shio. Patung-patung shio tersebut terdiri dari patung babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, harimau, kerbau, tikus. Patung-patung shio tersebut memberikan eksotika tersendiri yang menambah keindahan bangunan vihara ini sehingga siapapun yang berkunjung ke Vihara Avalokitesvara akan terpesona dengan gaya arsitektur patung-patung shio tersebut. Di sekitar patung terdapat pula sebuah lonceng besar dan sebuah roda doa (*praying wheel*). Di halaman bawah, terdapat 33 patung Kwan Im ukuran kecil mengelilingi patung raksasa ini.

Kemegahan Patung Dewi Kwan Im ini pernah meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI). Patung Dewi Kwan Im ini terbuat dari bebatuan yang dipahat dan dikerjakan langsung di China dengan waktu sekitar 3 (tiga) tahun. Untuk mendatangkannya sampai ke Pematangsiantar butuh biaya sekitar Rp.9 miliar. Batu-batu yang telah selesai dipahat di China, dibawa lalu dirakit dan didirikan di kota Pematangsiantar dengan tenaga ahli khusus yang didatangkan langsung dari China.

Posisi Kwan Im di Pematangsiantar ini bernama Kwan Im Pemegang Sutra atau kitab ajaran Buddha. Posisi ini

adalah satu dari 33 julukan Kwan Im. Kwan Im ini disebut pula Avalokitesvara, sama dengan nama vihara lokasi patung ini berada. Aval berarti mendengar, lokite artinya dunia dan suara berarti suara. Avalokitesvara berarti mendengar suara dunia. Avalokitesvara sesuai kepercayaan Buddhis berarti kasih sayangnya akan datang dan mereka yang kesusahan akan didengar¹¹⁰.

Wajar saja jika keantikan arsitekturnya serta kemegahan Patung Dewi Kwan Im yang sangat fenomenal ini menjadi daya tarik wisatawan, bahkan dari mancanegara. Meski belum tergolong sebagai bangunan bersejarah di kota Pematangsiantar, namun keberadaan Patung Dewi Kwan Im ini sudah sangat dikenal masyarakat yang datang dari berbagai daerah.

¹¹⁰ Fitria Anggina Siregar. 2016. *Wisata Vihara Avalokitesvara (Studi Etnografi Mengenai Wisata Religi Di Kota Pematangsiantar)*. Skripsi S-1 pada Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan.

8. Maha Vihara Vidya Maitreya



Maha Vihara Vidya Maitreya di Jalan Ade Irma Suryani Pematangsiantar. (foto/dok/jal)

Maha Vihara Vidya Maitreya yang terletak di *Jalan Ade Irma Suryani*, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara ini merupakan pengembangan dari rumah ibadah umat Buddha Maitreya di Pematangsiantar. Awalnya, ajaran Buddha Maitreya masuk sekitar tahun 1967 ke Pematangsiantar dibawa oleh YM Sesepeuh Prajamita yang datang dari kota Medan. Mereka awalnya melakukan peribadahan di sebuah rumah toko sederhana yang dikontrak di Jalan Diponegoro¹¹¹.

Semakin bertambahnya penganut ajaran Buddha Maitreya, mereka kemudian membangun tempat ibadah di

¹¹¹ <https://mahaviharamaitreya.org/sejarah-pendirian>, diakses Jumat, 25 Maret 2022.

Jalan Thamrin, yakni Vihara Kshanti Maitrea. Seiring pesatnya pertumbuhan penganut ajaran ini, mereka bersepakat mencari lokasi untuk membangun tempat ibadah yang lebih layak menampung banyak umat. Pada tahun 2003 gedung vihara yang cukup besar di lokasi Jalan Ade Irma Suriyani mulai dibangun. Gedung berlantai 3 (tiga) ini memiliki fungsi berbeda. Lantai 1 digunakan sebagai sarana gedung olahraga; lantai 2 digunakan sebagai tempat ibadah bagi masyarakat umum; dan lantai 3 digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah khusus penganut ajaran Buddha Maitreya. Diperkirakan, penganut ajaran Buddha Maitreya di Pematangsiantar sudah mencapai 6.500 jiwa yang didominasi etnik Tionghoa.

Inti ajaran Buddha Maitreya ini adalah mengenai kasih yang bukan hanya untuk sekelompok orang, tetapi merupakan kasih universal. Artinya setiap orang berhak memperoleh kasih seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan. Implementasi ajaran yang mereka pelajari adalah mewujudkan kasih sesama individu ke individu yang lain, kepada setiap orang dan juga lapisan masyarakat lainnya. Ada 4 (empat) inti ajaran kasih yang harus dimiliki oleh setiap pengikut ajaran Buddha Maitreya, yaitu: wajah kasih, hati kasih, perilaku kasih dan senyum kasih¹¹².

Di kompleks vihara ini terdapat sebuah patung besar bernama Pramita Buddha Maitreya yang sering disebut sebagai pembawa berkah (*lucky Budha*). Ada juga yang menyebutnya sebagai Budha Tawa Ria (*launghing Budha*)

¹¹²<http://petulanganrahman.blogspot.com/2019/01/lxviii-buddha-maitreya-di-pematang.html>, diakses Jumat, 25 Maret 2022

serta sebutan lainnya Budha sukacita (*happy Budha*). Patung yang digambarkan dengan wajah senyum, daun telinga yang terkulai ke bawah, perut yang bulat dan besar, leher dan perut terbuka lebar, tangan menggenggam kantong, sikap-Nya yang lugu, polos serta jujur. Oleh karenanya, setiap orang yang melihat dan menatapnya akan menimbulkan rasa suka yang mendalam terhadap-Nya.

Gambaran tersebut merupakan karakteristik penganut Buddha Maitreya, yakni: senyum kasih yang memenuhi wajah yang menggambarkan cerminan kasih-Nya yang tiada tara; daun telinga yang terkulai ke bawah yang menggambarkan kasih Buddha Maitreya yang tiada batas, mampu mendengar, memahami dan memutuskan masalah umat manusia dan meskipun diri-Nya dimarahi dan dicerna namun beliau tidak pernah emosi dan marah; leher dan dada yang terbuka lebar menggambarkan Buddha Maitreya yang berlapang dada, panjang sabar, polos, tulus dan jujur serta dalam hati-Nya semua makhluk sama rata tidak ada diskriminasi; perut yang besar dan bulat menggambarkan bahwa kasih Buddha Maitreya yang tiada tara menampung segala masalah dunia tanpa membedakan yang bijaksana maupun yang dungu, serta ketiadaan perbedaan atau diksiminasi; dan kantong gaib Buddha Maitreya yang menggambarkan kasih dan dharma agung Buddha Maitreya yang tiada tara. Kantong-Nya dapat menampung segala benda yang ada di jagat raya, serta membawa kecemerlangan dan kebahagiaan bagi umat manusia serta menyelesaikan kekacauan dunia.

Setiap sore, banyak masyarakat yang datang ke lokasi ini untuk sekadar berswafoto, terutama di dekat patung Pramita Buddha Maitreya yang selalu tampak tersenyum lebar. Apalagi, halaman vihara ini cukup luas dan selalu

terawat dan bersih, sehingga semakin mengundang orang-orang yang melintas untuk singgah. Meski belum tergolong bangunan bersejarah di kota Pematangsiantar ini, namun lokasi ini sangat potensial dikembangkan sebagai objek wisata religi dan budaya.

9. Pura Jagadhita Toba Pematangsiantar

Semakin banyaknya etnik Bali yang masuk ke kota Pematangsiantar membuat mereka butuh tempat ibadah khusus. Apalagi menurut kepercayaan etnik Bali, di mana ada umat yang bermukim haruslah juga ada pura yang berdiri sebagai tempat berdoa dan sembahyang. Kedatangan etnik Bali ke kota Pematangsiantar dilatarbelakangi sejumlah alasan, termasuk akibat meletusnya gunung Agung pada tahun 1963 silam. Pada tahun 1997, mereka mulai mencari lahan dan mendirikan sebuah pura bernama Pura Jagadhita Toba berlokasi di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari.

Pura *Jagadhita Toba* yang diresmikan Wali Kota Pematangsiantar, Drs. Abu Hanifah pada tanggal 27 Maret 1999 ini merupakan satu-satunya pura umat Hindu di kota Pematangsiantar. Berdirinya pura ini di lokasi sekarang dilatar belakang hal sederhana, bahwa dulunya ada beberapa kepala keluarga etnik Bali bermukim di daerah ini. Pemberian nama pura ini disebut *Jagadhita* yang berarti jagat raya, menggambarkan alam semesta dan *Toba* adalah nama daerah/kampung di Tanah Batak dengan objeknya adalah air Danau Toba yang menurut kepercayaan mereka, diartikan kehidupan dengan pusat pada air Danau Toba.

Tampak depan Pura Jagadhita Toba Jalan Cadika



Pematangsiantar. (foto/dok.jal)

Etnik Bali senantiasa mempertahankan kebudayaan asli mereka, yang merupakan tradisi turun-temurun leluhur nenek moyang mereka. Mereka tetap menyajikan banten atau sesajen setiap sembahyang, mengoleskan tepung beras pada dahi, mulut dan leher, mengikat kepala pada pria dan mengikat pinggang pada pria dan juga wanita dan sebagainya. Mereka nyaris tidak pernah lepas dengan seluruh aktivitas budayanya. Hal inilah yang menjadi simbol diri bagi mereka atau kekhasan dari etnik tersebut.

Ritual khusus yang kerap digelar di pura ini diantaranya adalah *piodalan* yang merupakan wujud nyata penghormatan, ucapan syukur dan pemujaan kepada *Dewa Sang Hyang Widhi*. Kegiatannya dirangkaikan dengan *purwa daksina* (pengelilingan alam semesta yang disimbolkan dengan pengelilingan patung *Fatmah Hasanah*, dan acara yang terakhir adalah *Dharma Wacana* (ajaran keagamaan singkat) dan diakhiri dengan sembahyang *Saraswati*. Menyediakan

Banten Pejati/ Pokok dalam ritual *Piodalan* etnis Bali merupakan sebuah simbol yang mengandung makna menyatakan kesungguhan hati dihadapan *Dewa Sang Hyang Widhi*, serta memohon dipersaksikan dengan tujuan agar memperoleh keselamatan dan sejahtera¹¹³.

Tempat khusus pelaksanaan ritual umat Hindu etnik Bali di



bagian dalam Pura Jagadhita Toba Pematangsiantar. (foto/dok.jal)

E. Fasilitas Pendidikan

1. SMA Negeri 4

Kompleks SMA Negeri 4 terletak di lokasi strategis pertigaan antara Jalan Pattimura, Jalan Merdeka dan Jalan Sutomo. Sekolah ini sempat dijadikan sebagai Sekolah Guru Atas (SGA) Negeri sejak 1 Januari 1950. Kompleks sekolah ini

¹¹³ Febhy Rizky Tanjung. 2016. *Ritual Piodalan Etnik Bali Di Pura Jagadhita Toba Di Kelurahan Bahkapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar*. Skripsi S-1 Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri: Medan.

dulunya dibangun bersamaan dengan SMP Negeri 1 yang ada di seberangnya (Jalan Merdeka) pada era pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1917.

Pada tanggal 1 Januari 1966, SGA Negeri dirubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri yang lokasi belajarnya tetap gedung SMA Negeri 4 sekarang. SPG Negeri ini kemudian ditutup dan dirubah menjadi SMA Negeri 4 Pematangsiantar sejak tahun ajaran 1991/1992. Selama transisi (peralihan) dari SPG menjadi SMA, sekolah ini dipimpin Drs. PM Sitinjak. Setelah semua siswa SPG Negeri ditamatkan pada tahun ajaran 1991/1992, praktis SPG Negeri beralih menjadi SMA Negeri 4.

Pada era kolonial, sekitar tahun 1920-1934, di lokasi ini berdiri *Noormal School* yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Sekolah ini kemudian dipindahkan ke Padang Panjang Sumatera Barat tahun 1935. Selanjutnya gedung sekolah ini dijadikan Kantor Pengadilan Negeri (*Landraad*) sampai pendudukan Jepang tahun 1942. Selama pendudukan Jepang, lokasi sekolah ini beralih fungsi menjadi markas tentara Jepang di Pematangsiantar.

Sesudah proklamasi kemerdekaan atau pada masa revolusi fisik antara laskar-laskar rakyat dengan tentara Belanda/Sekutu, gedung ini dijadikan lokasi penampungan pengungsi, khususnya pegawai yang berasal dari Kota Medan dari tahun 1945-1947. Pada masa agresi militer Belanda tahun 1947 lokasi ini digunakan Belanda sebagai markas sampai tahun 1948. Sejak 1 Agustus 1948, sekolah guru kembali dibuka kembali dengan nama *Normaal School* Negeri Sumatera Timur. Selain itu, sebagian lokasi sekolah ini

dipakai untuk sekolah *Kweek School Niauwe Styl* yang berlangsung selama berdirinya Negara Sumatera Timur¹¹⁴.



Gerbang SMA Negeri 4 Pematangsiantar menghadap Jalan Pattimura setelah direnovasi (foto/dok.jal)



Bangunan lama ruang kelas SMA Negeri 4 sebelum direnovasi (foto/dok.jal)

¹¹⁴ Dokumen dan Arsip SMA Negeri 4 Pematangsiantar (1950 – 2005)



Gedung di kompleks SMA Negeri 4 yang masih digunakan sebagai ruang belajar namun kini sudah direnovasi. (foto/dok.jal)



Gedung utama di SMA Negeri 4 yang digunakan sebagai ruangan belajar dan kantor kepala sekolah, yang sempat menjadi gedung Pengadilan Negeri, sebelum direnovasi. (foto/dok.jal)



Salah satu rumah dinas guru di kompleks SMA Negeri 4 yang masih sesuai dengan konstruksi aslinya. (foto/dok.jal)

Selain gedung sekolah di kompleks ini juga terdapat 5 (lima) unit rumah dinas pimpinan sekolah dan guru yang sampai sekarang masih tampak sesuai dengan aslinya. Tahun 2005, Kompleks SMA Negeri 4 ini sempat diupayakan *diruilslagh* (tukar-menukar barang pemerintah dengan pihak swasta) oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pihak ketiga untuk dijadikan sebagai lokasi bisnis dan perhotelan.

Namun rencana *ruilslagh* yang diinisiasi Wali Kota, Ir. RE Siahaan ini mendapat perlawanan keras siswa, guru dan komite sekolah yang mengakibatkan konflik berkepanjangan hingga tahun 2010. Gelombang aksi protes ini bahkan sempat menjadi pembicaraan nasional. Persoalan mereda pasca Wali Kota berganti dan *ruilslagh* dihentikan. Sejak tahun 2017, SMA Negeri 4 dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara, sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. SMP Negeri 1



Gedung Utama (depan) SMP Negeri 1 Pematangsiantar sebelum direnovasi. (foto/dok.jal)

Kompleks gedung SMP Negeri 1 Pematangsiantar yang berada di Jalan Merdeka, Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur ini dibangun bersamaan dengan SMA Negeri 4 sekitar tahun 1915-1917. Kedua kompleks sekolah ini sekarang dipisah oleh Jalan Merdeka. Sebelum difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1950-an, lokasi SMP Negeri 1 ini pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit yang dikelola pemerintah kolonial Belanda.¹¹⁵

¹¹⁵ Dokumen SMA Negeri 4 Pematangsiantar

Sayangnya, sekarang konstruksi bangunan sekolah yang menunjukkan bahwa di lokasi tersebut pernah dijadikan sebagai rumah sakit sudah tidak terlihat. Karena konstruksi bangunan lama sudah berubah serta banyaknya penambahan gedung baru di kompleks tersebut. Bangunan lama yang tersisa hanya gedung utama bagian depan yang tetap dipertahankan konstruksi dinding dan rangka atapnya sedangkan untuk atapnya sudah diganti dengan bahan kekinian.

3. SD Negeri 122350



SD Negeri 122350 Jalan Sutomo Pematangsiantar setelah direnovasi. (foto/dok.jal)

Keberadaan SD Negeri 122350 Jalan Sutomo, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur yang juga merupakan warisan kolonial Belanda ini tak bisa dipisahkan dengan pendirian SMA Negeri 4 dan SMP Negeri 1 yang ada di sebelahnya. Ketika itu, kota Pematangsiantar dijadikan

Belanda sebagai pusat pemerintahan dan kantor-kantor perkebunan. Oleh karenanya, pemerintah Belanda merasa perlu membangun sekolah dalam rangka menyiapkan tenaga administrasi di pemerintahan maupun di kantor-kantor perkebunan. Pertimbangannya, jika harus mendatangkan tenaga administrasi rendah dari kalangan orang Eropa akan mengeluarkan biaya besar.

Pemerintah kolonial Belanda kemudian berinisiatif membuka sejumlah sekolah rendah di Pematangsiantar. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajarnya, Belanda kemudian membuka sekolah guru (*Normaal School*) di lokasi SMA Negeri 4 dan SD Negeri 122350 sekarang. Karena itulah lokasi SD Negeri 122350 sebenarnya masih berada di kompleks yang sama dengan SMA Negeri 4 sejak dibangun tahun 1917 sampai sekarang¹¹⁶. Posisinya, SD Negeri 122350 menghadap Jalan Sutomo sedangkan SMA Negeri 4 menghadap Jalan Pattimura dan sudah ada pagar pembatas yang memisahkan keduanya.

Peruntukkan awal lokasi ini sebenarnya bukan untuk sekolah, tetapi rumah sakit khusus untuk kepentingan kolonial Belanda. Termasuk untuk perawatan para tentara dan pegawai perkebunan serta para tahanan politik mereka. Sebab di sebelah kompleks rumah sakit tersebut (Jalan Sutomo sekarang) dulunya terdapat bangunan penjara. Namun sekarang lokasi tersebut telah beralih fungsi menjadi kompleks pertokoan Siantar Bisnis Centre (SBC). Namun dari konstruksi dan bangunan yang tersisa, masih terlihat gambaran jika lokasi sekolah ini pernah berfungsi sebagai rumah sakit.

¹¹⁶ Dokumen SD Negeri 122350 Pematangsiantar

Antara tahun 1920-1934 di lokasi ini berdiri *Noormal School* berbahasa Belanda yang kemudian dipindahkan ke Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1935. Saat pendudukan Jepang, sekolah ini dijadikan markas militer dan gudang amunisi tentara serta kegiatan latihan kemiliteran. Karena itulah, praktis tak ada kegiatan pendidikan di lokasi ini sejak tahun 1935 sampai dengan masa kemerdekaan tahun 1945.

Dalam perkembangan selanjutnya, disertai kesadaran makin pentingnya pendidikan bagi generasi bangsa yang baru merdeka, pemerintah Republik Indonesia melakukan penambahan sekolah-sekolah calon guru. Pada tahun 1949 - 1950, di samping *Normaal School* di lokasi ini juga didirikan *Kweek School* yang berlangsung selama berdirinya Negara Sumatera Timur. Pasca pengakuan kedaulatan tahun 1949 *Kweek School* ini kemudian dirubah menjadi Sekolah Guru Atas (SGA) dengan masa pendidikan selama 6 tahun bertempat di SMA Negeri 4 sekarang. Siswa SGA ini mula-mula adalah siswa-siswa *Normaal School* dan *Kweek School* yang telah duduk di tingkat IV.

Status sekolah ini kemudian diresmikan menjadi Sekolah Guru Atas (SGA) Negeri pada tanggal 1 Januari 1951 dengan *Instaling Besluit* (Surat Keputusan) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1296/B.II/52 tertanggal 2 Mei 1952. Sedangkan lokasi SD yang sebelumnya juga telah dijadikan tempat praktek siswa-siswa *Normaal School* tetap dijadikan semacam sekolah laboratorium, tempat para siswa SGA berpraktek dan latihan mengajar.

Oleh karena fungsinya sebagai sarana pelatihan bagi siswa-siswa SGA, maka sejak awal SD Negeri 122350 sering disebut dengan SD Latihan dengan pembagiannya menjadi

SD Latihan 61 dan SD Latihan 62. Penyebutan istilah 61 ini diambil dari tahun pembukaan sekolah tersebut yakni tahun 1961 dan tahun 1962. Dengan ruang belajar sebanyak 6 lokal masing-masing sekolah tersebut membagi siswanya dengan sistem belajar bergantian. Caranya, jika siswa SD Latihan 61 belajar pagi mulai pukul 08.00 WIB siswa SD Latihan 62 belajar siang mulai pukul 13.00 WIB. Demikian sebaliknya terus-menerus dilakukan secara bergantian dengan pergantian waktu yang telah disepakati.

Inilah awalnya mengapa bangunan di kompleks SMA Negeri 4 dan SD 122350 sekarang dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk lokasi Sekolah Guru Atas (SGA) yang kemudian menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan sebagaian lagi menjadi lokasi Sekolah Dasar Latihan 61 dan 62. Tahun 1979 terjadi lagi perubahan dimana SD Latihan tersebut menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan ketentuan SD Latihan 61 menjadi SD Negeri 122351 dan SD Latihan 62 menjadi SD Negeri 122350. SD Negeri 122351 kemudian oleh pemerintah dipindahkan lokasi belajarnya ke Komplek PN Kertas yang berada di Jalan Asahan sekitar tahun 1995.

Dalam perkembangan selanjutnya, sekolah ini secara fisik telah banyak mengalami perubahan dan penambahan bangunan maupun fasilitas. Namun untuk konstruksi bangunan utamanya masih dipertahankan sebagaimana aslinya. Renovasi yang dilakukan pun terbatas pada beberapa bagian saja, tanpa ada perubahan konstruksi secara mendasar terhadap bangunan lama. Sebagai salah satu warisan sejarah dan bukti telah berkembangnya pendidikan dasar era kolonial di Pematangsiantar, sekolah ini layak dijadikan cagar budaya dan destinasi historis agar bisa jadi sumber pencerahan masa lalu bagi masyarakat

4. Perguruan Sultan Agung



Gedung Chung Hua School era kolonial Belanda yang menjadi cikal bakal Perguruan Sultan Agung Pematangsiantar (foto: kitlv.nl)



Perguruan Sultan Agung sekarang yang terletak di pusat perekonomian dan keramaian kota Pematangsiantar, Jalan Surabaya. (foto/dok/jal)

Perguruan Sultan Agung Pematangsiantar berlokasi di Jalan Surabaya Nomor 19 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat. Sekolah yang berdiri sejak 9 September 1909 ini berada persis di jantung kota yang padat pemukiman dan rumah pertokoan. Dengan usia yang sudah memasuki 113 tahun pada tahun 2022, sekolah ini merupakan salah satu sekolah swasta perintis yang cukup tua di Indonesia bahkan bisa jadi merupakan sekolah tertua untuk wilayah Sumatera Utara.

Cikal-bakal sekolah ini awalnya bernama *Chong Hua School* atau *Zhong Hua* atau *Xian Zhong* yang dibuka khusus untuk warga Tionghoa atas izin pemerintahan kolonial Belanda. Pendirinya ada beberapa orang, yakni: Lie Yen Liang, Chen Chun Ming, Chen Sun Tan, Cen ong dan sejumlah nama lain yang merupakan tokoh masyarakat Tionghoa di Pematangsiantar. Pendidikan di sekolah ini masih tingkat sekolah rakyat (SR) dan menempati sebuah rumah sederhana.

Salah seorang pendiri, Chen Sun Tan atau yang dikenal dengan Tan Sun Tan kemudian menyumbangkan tanahnya seluas 4.910 M2 untuk lokasi sekolah yang sampai sekarang menjadi lokasi Perguruan Sultan Agung Pematangsiantar. Pembangunan dan pengembangan secara bertahap terus dilakukan. Pada tahun 1936 dibuka jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, sekolah ini terus berkembang. Pada tahun 1958 terjadi penggantian pengurus yayasan, terpilih antara lain: Si Ping Sin, Huang Yi Chang, Chen Kui Chuan, Si Nan dan beberapa nama lainnya.

Untuk menghindari penutupan sekolah oleh pemerintah akibat bias pemberontakan G 30 S PKI, pengurus

yayasan mengutus Kepala Sekolah, Sie Chien Fang untuk bekerjasama dengan pihak Depertemen Pendidikan dan Ketentaraan di Medan. Hasilnya, nama sekolah berubah menjadi PN Sehati (Perguruan Nasional Sehati).

Untuk mengoptimalkan manajemen sekolah sekaligus kaderisasi kepengurusan, pada tahun 1972 terjadi perubahan struktur di PN Sehati, dimana Yayasan memutuskan mengangkat Wu Tien Yu (Paul Wu) menjadi Direktur Pelaksana (Kepsek) PN Sehati. Tahun 1977 PN Sehati berubah nama lagi menjadi Perguruan Sultan Agung, karena saat itu disyaratkan pemerintah agar nama sekolah swasta diambil dari nama pahlawan.

Sejak tahun 2000 Perguruan Sultan Agung diketuai oleh Hasan Wijaya (A Ken) sekaligus menambah jenjang pendidikan dengan membuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE). Program studinya ada Manajemen S1, Akutansi D3 dan Manajemen Pemasaran D3 serta Akutansi S1. Saat ini praktis Perguruan Sultan Agung mengelola sekolah dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sekaligus berada dalam satu kompleks. Siswa dan gurunya juga telah berbaur datang dari beragam etnis dan agama

Prestasi spektakuler pernah diraih Perguruan Sultan Agung saat siswanya tampil sebagai penari pada 17 Agustus 2008 di Istana Merdeka dalam acara resmi Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 63. Penampilan tersebut merupakan yang kedua kalinya penari Perguruan Sultan Agung di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudoyono setelah sebelumnya pada acara Pesta Danau Toba bulan Juni 2008. Sejak itu penari Perguruan Sultan Agung kerap diundang tampil dalam even dan acara besar seperti pada HUT Kodam Bukit Barisan yang diadakan di Pematangsiantar 2009.

5. Perguruan HKBP



*Perguruan HKBP di Jalan gereja Pematangsiantar tahun 1910
(foto: kitlv.nl)*



*Perguruan HKBP yang terletak di kompleks HKBP
Pematangsiantar Jalan Gereja setelah mengalami renovasi.
(foto/dok/jal)*

Kompleks Yayasan Pendidikan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pematangsiantar ini terletak di Jalan

Gereja, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan. Sekolah ini awalnya berdiri atas prakarsa missionaris asal Eropa yakni *Rheinische Missions Gesellschaft (RMG)* yang berpusat di Barmen, Jerman dan *Rotterdamsche Zendings Genootschap (RZG)* yang berpusat di Rotterdam, Belanda yang mendapatkan izin dari pemerintah kolonial Belanda.

Para misionaris Eropa kemudian bekerjasama dengan kaum pribumi yang sudah mereka didik untuk menjadi pelayan-pelayan di gereja yang tergabung dalam sebuah lembaga, yakni *Batakmission*. Awalnya mereka membuka sekolah tingkat dasar ini adalah khusus untuk anak-anak raja di Pematangsiantar sekitar tahun 1909. Tujuan sekolah ini adalah dalam rangka memberikan pendidikan khusus kepada anak-anak raja, agar kelak dapat menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda. Terutama sebagai pamong praja atau pamong desa, sehingga mereka diberikan pelajaran bahasa Belanda yang gurunya pun langsung ditangani para *zending*.¹¹⁷

Era kolonial Belanda, pemerintah daerah (*gemeente*) Kotamadya Pematangsiantar juga diminta ikut bertanggungjawab untuk memberikan bantuan dana pengelolaan pendidikan yang diambil dari kas daerah.¹¹⁸ Untuk kota Pematangsiantar subsidi dialokasikan dalam bentuk tunai sebesar f 480 yang diberikan setiap tahun. Selain itu disediakan pula dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fisik dan fasilitas sekolah yang dianggap perlu sebesar f 1.900. Dengan demikian untuk keperluan

¹¹⁷ Jan S Aritonang. *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.1988

¹¹⁸ H.E.C.Quast. *Memorie van Overgave van de Afdeling Simaloengoen en de Karolanden, Sumatra's Oostkust*, December 1913.

pendidikan rakyat diperhitungkan besaran subsidiya antara f11.280 sampai f131.80.¹¹⁹

Saat ini, di kompleks sekolah yang sudah berdiri sejak era kolonial Belanda ini, terdapat sekolah mulai dari anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

6. Perguruan Taman Asuhan

Sekolah Taman Asuhan Pematangsiantar terletak di inti kota, Jalan MH.Sitorus Nomor 17 Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat. Sekolah yang sudah ada sejak era kolonial Belanda ini awalnya bernama *Internaat Voor Europese Kinderen*, sebuah sekolah berasrama yang didirikan oleh perusahaan perkebunan milik Belanda bernama *Handels Vereeniging Amsterdam* (HVA).

Perusahaan HVA berdiri pada 1878 sebagai akibat dari tekanan situasi setelah perang Jawa (1825-1830). Tidak kondusifnya situasi dikarenakan situasi perang yang memberikan tekanan dan akhirnya mengganggu proses perekonomian di Hindia Belanda ketika itu. Situasi yang penuh tekanan tersebut akhirnya membuat beberapa perusahaan (firma) perkebunan berusaha untuk keluar dari kondisi tersebut dengan cara bergabung dan mencari investor baru yang dapat menyuntikkan dana segar sebagai modal perusahaan.

¹¹⁹ Ibid.



Internaat Voor Europese Kinderen yang sekarang menjadi Perguruan Taman Asuhan Pematangsiantar era kolonial (gambar atas) dan kunjungan Barones A.C. de Jonge-Van Wassenaer Van Catwijck, istri Gouverneur Generaal B.C. de Jonge ke sekolah ini ketika mendampingi suaminya melakukan kunjungan kerja ke Pematangsiantar (gambar dibawah). (foto: Collectie Tropenmuseum 1900-1940)



Kondisi sekarang sekolah (SD dan SMP) Taman Asuhan yang terletak di Jalan MH.Sitorus Pematangsiantar. (foto/dok/jal)

Setelah berupaya untuk berkoalisi secara strategis, akhirnya pada September 1878 perusahaan baru dibentuk sebagai kelanjutan beberapa perusahaan perkebunan yang sebelumnya sudah ada ditambah dengan perusahaan baru yang masuk sebagai investor. Untuk selanjutnya perusahaan yang baru dibentuk itu diberi nama *Handels Vereeniging Amsterdam*. Akta pendirian perusahaan dibuat dihadapan Notaris J. G. Pouw Jr di Amsterdam pada tanggal 23 Desember 1878 dengan saham sebanyak 2.500 lembar dan modal ditempatkan sebesar NLG 1.250.000. berlaku efektif mulai 1 Januari 1879.

Di wilayah Sumatera, perusahaan HVA mengelola sebanyak 4 komoditas dengan 16 unit produksi yakni: 4 unit komoditi serat (Dolok Ilir, Laras, Bah Djambi dan Bandar Betsy); 5 unit kebun kelapa sawit (Tindjowan, Dolok Sinumbah, Pagar Djawa, Tonduhan, dan Boeloe Blang Ara); 3 unit kebun teh (Balimbingan, Sidamanik dan Kajoe Aro), 4 unit kebun karet (Bangoen, Gohor Lama, Aloer Djamboe dan Poelaoe Tiga). Selain unit produksi,

perusahaan juga mengelola unit non produksi dalam bentuk fasilitas kesehatan dalam bentuk rumah sakit dan sekolah, yakni *hospitaal* Ngadiredjo, *hospitaal* Toeloeng Redjo, *hospitaal* Balimbingan dan *Internaat Voor Schoolgande Kinderen* Pematangsiantar, dan poliklinik serta sekolah di kebun untuk pekerja tempatan.¹²⁰

Awalnya *Internaat Voor Europese Kinderen* yang menjadi cikal bakal Sekolah Taman Asuhan, merupakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak pegawai asal Eropa yang bekerja di perkebunan sekitar tahun 1925. Ketika itu, perusahaan HVA sudah lebih dulu mendirikan sekolah serupa di di Pulau Jawa, yang dipusatkan di kompleks SF Goenoeng Sari.

Pelajaran yang diberikan di *Internaat Voor Europese Kinderen* ini adalah pelajaran setingkat Sekolah Dasar. Sebagai tenaga pengajarnya, seluruh guru didatangkan khusus dari Eropa dalam rangka menjaga kualitas pembelajaran serta alumnusnya terbaik. Hal tersebut jugalah yang membuat Barones A.C. de Jonge- Van Wassenaer Van Catwijck, istri dari *Gouverneur Generaal* B.C. de Jonge menyempatkan diri berkunjung ke sekolah ini ketika mendampingi suaminya melakukan kunjungan kerja ke Pematangsiantar.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian dibarengi dengan pengambil alihan lahan-lahan perkebunan milik perusahaan asing pada tahun 1959, sekolah ini berubah nama menjadi Sekolah Taman Asuhan yang tetap dikelola perusahaan perkebunan. Sekolah ini berubah dari sekolah berasrama menjadi sekolah umum. Artinya, anak-anak yang bersekolah di Taman Asuhan ini

¹²⁰<https://plantersclub.blogspot.com/2012/12/handels-vereeniging-amsterdam.html>, diakses Rabu 23 Maret 2022.

bukan lagi khusus anak-anak pegawai perkebunan yang ada di sekitar Pematangsiantar dan Simalungun. Meskipun memang, masyarakat di Kota Pematangsiantar masih saja banyak yang beranggapan bahwa sekolah ini khusus anak-anak perkebunan. Padahal pelajar yang menuntut ilmu di sekolah ini tidak lagi ada mengalami pembedaan.

Meski guru-guru yang mengajar di sekolah ini tidak lagi berasal dari Eropa, tetapi tetap saja sekolah yang berada di bawah naungan PTP Nusantara IV ini masih jadi favorit. Saat ini, Taman Asuhan mengelola pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

BAB IV

SITUS SEJARAH, KEARIFAN LOKAL, DAN NILAI-NILAI PERJUANGAN BANGSA

A. Upaya Pelestarian

Kata pelestarian dalam kamus besar bahasa Indonesia¹²¹ memiliki arti perlindungan atau perawatan dari kemusnahan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelestarian adalah upaya perlindungan atau menjaga atau merawat benda peninggalan supaya tidak rusak. Selain itu kata pelestarian dapat disebut dengan istilah konservasi. Konservasi merupakan upaya pelestarian atau pemeliharaan suatu benda atau yang lainnya.

Secara umum, konservasi, mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan/ mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu, kegiatan konservasi dapat pula mencakupi ruang lingkup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi.

Preservasi atau pelestarian arsip adalah proses dan kerja dalam rangka perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak dan restorasi/ reparasi bagian arsip yang rusak, yang disebabkan oleh faktor dari dalam (*intrinsik*) arsip itu sendiri maupun faktor dari luar fisik arsip

¹²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, (2002), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka : Jakarta. Hlm 665

itu sendiri (*ekstrinsik*). Oleh karena pelestarian masih sangat luas cakupannya, maka preservasi ini mencakup semua pertimbangan manajerial dan keuangan termasuk ketentuan penyimpanan dan akomodasi, susunan staf, kebijakan, teknik dan metode pelestarian bahan perpustakaan serta informasi yang terkandung di dalamnya.

Restorasi diartikan sebagai upaya perbaikan bahan perpustakaan yang telah mengalami kerusakan dengan memperbaiki tampilan fisik dokumen, sehingga paling tidak dapat mendekati keadaan semula sesuai dengan aturan dan etika konservasi yang berlaku. Hal ini menyangkut teknik dan pertimbangan yang digunakan oleh staf teknis terkait perbaikan bahan perpustakaan yang dalam kondisi rusak. Kerusakan ini baik yang diakibatkan oleh waktu yang lama (*usang*), frekuensi penggunaan oleh pemustaka yang cukup tinggi, faktor biota, faktor lingkungan (fisika dan kimia), maupun faktor kerusakan lainnya. Restorasi ini dilakukan untuk memperpanjang umur bahan perpustakaan.

Dalam rangka pelestarian situs-situs sejarah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, perlu dilakukan upaya-upaya secara serius, berkomitmen serta berkesinambungan. Karena selain upaya pelestarian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk pembentukan karakter (*jati diri*) generasi bangsa, situs-situs sejarah tersebut juga dapat dikemas untuk dikembangkan sebagai objek wisata sejarah dan bernilai ekonomis.

Peninggalan bangunan bersejarah cukup banyak ditemukan di kota Pematangsiantar, sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab 3 buku ini. Peninggalan tersebut seperti peninggalan kerajaan Siantar, Infrastruktur dan Fasilitas Publik, Bangunan Keagamaan dan Fasilitas Pendidikan dimana ini sangat potensial untuk dikemas

sebagai wisata sejarah. Paradigma pembangunan berwawasan pelestarian warisan budaya yang bersifat kebendaan atau bendawi/ragawi atau berwujud) tidak terlepas dari artipenting warisan budaya bangsa, yaitu sebagai rekaman dasar dan pengikat nilai sekaligus sebagai bukti dari pemikiran dan aktivitas manusia di masa sebelumnya. Sebagai rekaman dasar, tentunya warisan budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan menggali ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan serta dapat berdampak pada bidang ekonomi dan pariwisata¹²².

Upaya untuk melestarikan dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh semua pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Beberapa langkah secara teoritis adalah :

1. Memelihara peninggalan sejarah sebaik-baiknya, menjaga kebersihan dan keindahan.
2. Melestarikan benda sejarah tersebut agar tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun buatan.
3. Tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah.
4. Turut menjaga kebersihan dan keutuhan.
5. Wajib menaati tata tertib yang ada dalam setiap tempat peninggalan sejarah, dan
6. Wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku.

Memelihara peninggalan sejarah sebaik-baiknya, menjaga kebersihan dan keindahan tentunya secara teoritis adalah sangat mudah. Namun demikian pelaksanaan ini sangat sulit bagi setiap orang yang tidak memahami kebersihan dan keindahan. Namun sebagai tindakan nyata hal ini harus dilaksanakan dalam rangka pelestarian. Tentu

¹²² Saifuk Bahri dkk, (2019), Upaya Pelestarian Cagar Budaya Hollandsch Inlandsche School (HIS) Pertama Di Pontianak, Dalam GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3, No. 1, Juni 2019. hlm 154.

upaya yang dilakukan adalah secara terus menerus dilakukan upaya menciptakan budaya bersih dan indah dalam kehidupan masyarakat. Upaya ini adalah melibatkan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta secara serentak dan penuh komitmen. Pemanfaatan warisan budaya sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya untuk kepentingan pembangunan karakter bangsa seperti pendidikan dan pariwisata budaya, bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia.¹²³

Melestarikan benda sejarah agar tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun buatan, juga merupakan tugas dari masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Dalam hal ini peran pemerintah adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga memahami akan pentingnya menjaga benda sejarah. Benda sejarah yang berada di sekitar lingkungan perlu dijaga, setidaknya dikenal secara bersama oleh masyarakat. Demikian pihak swasta yang memperoleh keuntungan dari usahanya diharapkan memperikan bantuan untuk melestarikan benda sejarah.

Tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah, adalah merupakan keharusan. Tindakan coretan sering dilakukan oleh orang secara tidak sadar terhadap benda sejarah dengan menuliskan sesuatu pada benda tersebut. Akibat coretan dapat menimbulkan kerusakan terhadap benda bersejarah tersebut. Dalam hal ini peran masyarakat, terutama dari keluarga perlu pemahaman bersama bahwa mencoret benda itu adalah tindakan perusakan.

Turut menjaga kebersihan dan keutuhan, adalah merupakan hal yang sangat mendasar dalam upaya melestarikan benda bersejarah. Bagaimana pun benda

¹²³ Saifuk Bahri dkk, (2019). Hlm 155

bersejarah yang sudah sedemikian tua usianya perlu dijaga kbersihan dan keutuhannya sehingga dapat bertahan. Dalam keberadaan sebuah benda bersejarah tentunya disitu juga merupakan cerminan masyarakat pendukungnya ketika zamannya.

Wajib menaati tata tertib yang ada dalam setiap tempat peninggalan sejarah, terutama pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai bagian dari peninggalan sejarah. Pada setiap wilayah kawasan peninggalan bersejarah sudah dituliskan aturan-aturan bagi para wisatawan, atau siapa saja yang berkunjung untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya adalah merupakan bagian dari pada upaya pelestarian.

Upaya ini patut dilakukan karena semua memiliki arti penting bagi masa lalu yang sangat berkaitan dengan tradisi dan perkembangan kultural setiap generasi. Hal ini dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan perkembangan kekinian sehingga dapat menjadi inspirasi bagi penataan masa mendatang.

Meskipun harus disadari benar, bahwa upaya pelestarian dan pengembangannya sangat terkait dengan berbagai kendala serta ancaman terhadap situs sejarah itu sendiri. Bahkan jika dicermati lebih jauh, punahnya situs sejarah dimasa lalu itu, akan mengancam karakter fungsional serta ancaman terhadap makna dan nilai yang disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Faktor internal antara lain adalah faktor kelemahan bawaan yang menyatu dalam situs-situs sejarah tersebut. Hal ini tentunya menyangkut tentang kondisi fisik bangunan, bahan-bahan yang digunakan, konstruksi atau desain yang dibuat, struktur tanah, lokasi tofografisnya, iklim setempat,

yang semuanya ini sangat berpotensi untuk mempengaruhi terjadinya kerusakan dan pelapukan. Faktor eksternal antara lain adalah faktor lingkungan yang mencakup ulah manusia, pengaruh urbanisasi dan globalisasi, pengalihan fungsi lahan, penataan tata ruang wilayah bahkan bencana alam.

B. Inventarisasi dan Dokumentasi

Salah satu komitmen dalam rangka upaya pelestarian situs-situs sejarah yang banyak terdapat di wilayah Kota Pematangsiantar adalah dengan melakukan inventarisasi, verifikasi serta dokumentasi. Dengan upaya ini, akan dapat diketahui, seberapa banyak situs sejarah yang telah punah dan tak terdapat sedikitpun artefak-artefaknya, rusak berat tetapi masih dapat diidentifikasi, tak terawat sama sekali, rusak ringan dan masih dapat direnovasi atau fakta-fakta lain yang mungkin didapatkan.

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu bahwa kita melihat bahwa banyak situs-situs sejarah yang berada di Kota Pematangsiantar nyaris punah. Keberadaan situs-situs sejarah ini luput dari perhatian publik sehingga banyak yang kondisinya sudah beralih fungsi atau kurang dirawat. Pendokumentasian melalui penelitian seperti ini harusnya lebih intensif dilakukan dalam rangka menggali lebih dalam tentang berbagai situs sejarah, terutama yang dibangun semasa Kolonial Belanda. Karena keterbatasan berbagai hal, belum semua situs-situs sejarah yang ada di kota Pematangsiantar dapat teridentifikasi.

Kota Pematangsiantar berkembang menjadi kawasan permukiman perkotaan yang padat sejak mulai didatangi para pendatang dari berbagai daerah. Dengan berkembangnya permukiman maka secara langsung menyebabkan perubahan pada bentang alam yang ada di

kawasan ini. Saat ini Kota Pematangsiantar hampir tidak lagi mempunyai vegetasi dan bentang alam asli kecuali di beberapa sempadan dan ruas Sungai Bah Bolon. Sementara kawasan lainnya telah berubah menjadi kawasan budidaya yang telah dikembangkan sejak masa penjajahan Belanda, sehingga kawasan-kawasan inilah kemudian yang bisa dikategorikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menopang fungsi ekologis

kawasan Kota Pematangsiantar secara keseluruhan.¹²⁴

Taman Keanekaragaman Hayati dan Hutan Kota terletak di Bantaran Sungai Bah Bolon (Belakang komplek Perguruan Taman Asuhan), Jalan Kapten M.H. Sitorus, kelurahan Teladan, kecamatan Siantar Barat, Pematangsiantar. Berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 660/402/V/Wk-Thn 2014 tentang Penunjukan Taman Keanekaragaman Hayati dan Hutan Kota di kota Pematangsiantar, telah diputuskan bahwa kawasan hijau seluas 2,50 ha tersebut sebagai Taman Keanekaragaman Hayati. Taman Koordinat Keanekaragaman Hayati dan Hutan Kota yang terletak pada koordinat 02^o 57'04,8" LU dan 99^o 03' 40,7" BT tersebut bertujuan untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli atau lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan kepunahannya.

Taman Koordinat Keanekaragaman Hayati dan Hutan Kota Pematangsiantar memiliki fungsi konservasi in-situs dan atau ex-situs, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat

¹²⁴ Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kota Pematangsiantar Tahun 2018-2025.

mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji. Taman Koordinat Keanekaragaman Hayati dan Hutan Kota Pematangsiantar juga memiliki manfaat untuk koleksi tumbuhan, pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit, sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal, sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata, sumber bibit dan benih, ruang terbuka hijau, dan atau penambahan tutupan vegetasi¹²⁵.

Dalam Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 660/402/V/Wk-Thn 2014 tentang Penunjukan Taman Keanekaragaman Hayati dan Hutan Kota di Kota Pematangsiantar, disebutkan pula kawasan lainnya yang ditunjuk menjadi kawasan hutan kota. Seitidaknya terdapat 4 (empat) lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota, yaitu :

1. Kawasan Bantaran Sungai Bah Bolon (Komplek Universitas FKIP HKBP Nomensen) Kawasan Bantaran Sungai Bah Bolon (Komplek Universitas FKIP HKBP Nomensen) terletak di jalan Sang Nawaluh, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur. Kawasan ini memiliki luas 3,0 Ha.
2. Kawasan Bantaran Sungai Bah Bolon Kawasan Bantaran Sungai Bah Bolon terletak di jalan SKI, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan. Kawasan yang berfungsi sebagai hutan kota ini memiliki luas 4,5 Ha.
3. Areal Kantor Pusat GKPS. Areal kantor pusat GKPS terletak di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara. Areal ini memiliki

¹²⁵ Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kota Pematangsiantar Tahun 2018-2025.

luas yang paling luas diantara ketiga Hutan Kota lainnya, yaitu seluas 5,0 Ha.

4. Kompleks Pekuburan Cina, Kompleks Pekuburan Cina dengan luas 3,0 Ha ini terletak di Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat.

126

Tujuan ditetapkan Hutan Kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Penetapan Hutan Kota berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Selain itu, Hutan Kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nuftah dan atau budidaya hasil hutan bukan kayu. Kota selain taman keanekaragaman hayati dan hutan kota yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 660/402/V/Wk-Thn 2014, juga telah dilakukan pemilihan lokasi lainnya yang akan dijadikan sebagai Hutan Kota dengan luas total mencapai 7,0 hektar dengan Dasar hukum penentuan Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 522/004/Wk-Thn 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Hutan Kota Pematangsiantar. Lokasi hutan kota yang telah ditentukan tersebut diantaranya:

¹²⁶ Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kota Pematangsiantar Tahun 2018-2025.

1. Komplek Universitas Simalungun, Komplek Universitas Simalungun terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bah Hapal, dengan luas sebesar 3,0 Ha.
2. Komplek Brimob Komplek Brimob terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bah Hapal. Komplek Brimob memiliki luas 2,0 Ha.
3. Komplek HKBP Komplek HKBP yang memiliki luas 2,0 Ha terletak di Jalan Gereja, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bah Bolon.

Selain penetapan Hutan Kota, Surat Keputusan Walikota tersebut juga memutuskan penetapan Hutan Rakyat yaitu Sibatu – batu Blok III yang terletak di Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan : Siantar Sitalasari dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bah Hapal. Hutan Rakyat ini memiliki luas 5,0 Ha¹²⁷.

C. Pemeliharaan dan Pelestarian Secara Teknis

Upaya pelestarian aneka situs sejarah di Kota Pematangsiantar apalagi mengembangkan sebagai potensi wisata tentu sangat sulit dilakukan tanpa adanya upaya pelestarian terhadap fakta-fakta sejarah berupa peninggalan-peninggalan masa lalu yang masih ada sekarang. Setidaknya dengan cara ini, keaslian fakta-fakta sejarah itu tetap terjaga,

¹²⁷ Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kota Pematangsiantar Tahun 2018-2025.

sehingga berguna bagi setiap generasi. Sebab benda-benda ini memiliki arti penting terhadap tradisi masa lalu, untuk pembelajaran masa kini dan sumber inspirasi masa mendatang.

Namun disadari, pelestarian benda-benda purbakala ini memerlukan keahlian khusus yang tak bisa dilakukan sembarangan orang. Sebab jika pemeliharaan benda-benda tersebut tidak teliti, bisa mengakibatkan kerusakan fatal yang membuat makna dan nilai historisnya jadi berkurang. Misalnya jika hendak memugar atap bangunan-bangunan peninggalan Kolonial Belanda yang bergaya Eropa yang terbuat dari genteng, tentu harus diupayakan kembali dibuat seperti aslinya. Jika diganti dengan seng biasa, tentu akan mengurangi nilai historisnya.

Faktor alam seperti proses pelapukan yang akan mengakibatkan kerusakan, tentunya tak bisa dihindari. Terutama bangunan fisik situs-situs sejarah yang usianya sudah diatas limapuluhan tahun, tentu perawatannya juga memerlukan keahlian khusus. Belum lagi kerusakan faktor lingkungan akibat ulah manusia, atau tangan-tangan jahil yang suka merusak benda-benda antik bersejarah demi kepentingan pribadi. Terbukti di sejumlah situs-situs yang masih ada, banyak sekali bagian-bagian dari situs tersebut yang sudah tidak kelihatan, terutama benda-benda antik semacam pusaka Kerajaan Siattar.

Padahal leluhur-leluhur kita terdahulu banyak menyimpan benda-benda pusaka yang biasanya juga diwariskan secara turun-temurun. Tetapi faktanya bekas istana Raja Siattar nyaris tak ditemukan lagi benda-benda kuno dan antik yang masih bisa disebut pusaka kerajaan. Padahal benda-benda sangat penting untuk menceritakan, bagaimana pola kehidupan di istana Kerajaan Siattar ketika

itu. Sayang sekali, benda-benda bersifat pusaka ini sama sekali tak ditemukan lagi di bekas istana Raja Siattar¹²⁸.

Pengembangan sektor pariwisata di perkotaan umumnya akan berhadapan dengan masalah lingkungan hidup. Jika sumber daya tarik wisata tidak ada yang bersifat keanekaragaman hayati asli (flora dan fauna yang hidup alami di habitatnya), maka daya tarik wisata yang bernilai terletak pada pengelolaan lingkungan yang asli, berkelanjutan dan komprehensif.

Dari hal tersebut dapat muncul kreasi-kreasi produk atau program serta fasilitas perkotaan yang dapat dinikmati oleh wisatawan dengan nyaman. Masalah lingkungan hidup di perkotaan memang merupakan masalah yang kompleks. Sebuah kota dapat berkembang sehat jika di dalam kota terdapat suatu ciri keseimbangan yang dinamis. Sebuah kota dalam pertumbuhannya dapat berkembang atau mengalami kemunduran atau kematian, hal ini tergantung kepada sumber daya yang dimiliki, dimana dasar sumber daya alam merupakan nyawa sebuah kota. Sehingga dalam perencanaan pengembangan kota, peranan taman, tanaman, dan pohon cukup besar, bukan saja sebagai penghias kota, tetapi juga untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman.

Banyak masalah perkotaan antara lain masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain:

1. Perusakan alam, salah satunya meliputi pencemaran sungai di dalam kota. Misalnya, masalah sungai menjadi saluran pembuangan limbah, reklamasi pantai dan laut, serta penurunan dan penyempitan ruang hijau;

¹²⁸ Tentang istana Raja Siantar baca Damanik, Eron L. dan Dasuha, Juandaha Raya Purba, (2016), *Kerajaan Siantar Dari Puau Holang Ke Kota Pematangsiantar*, Simatri Institute; Medan. hlm. 56.

2. Perusakan nilai historis kota;
3. Prioritas diberikan pada kendaraan bermotor, bukan pejalan kaki;
4. Konsentrasi pembangunan di perkotaan, pertumbuhan yang cepat di pinggir kota, pembangunan yang tidak beraturan serta memperpanjang jarak tempuh.

Sejalan dengan itu, lingkungan perkotaan perlu diarahkan agar tercipta suatu keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan ini dimungkinkan terwujud dengan adanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan yang tetap terjaga dan terpelihara baik kuantitas maupun kualitasnya.

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang disebut dengan Ruang Terbuka Hijau Kota adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan (*vegetasi*) guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Semakin hari keberadaan RTH semakin terdesak dengan kebutuhan masyarakat. Walaupun terdapat peraturan dan standar mengenai jumlah dan luas minimal penyediaan RTH di perkotaan, ternyata perwujudannya masih terbentur pada berbagai persoalan, salah satunya adalah masalah keterbatasan lahan.

Hal ini disebabkan perkembangan kegiatan di perkotaan cenderung mendorong perkembangan fisik kota sehingga akan semakin banyak lahan terbangun dan semakin berkurangnya ruang terbuka. Padahal dengan bertambahnya tutupan lahan berupa gedung-gedung atau perkerasan, maka kebutuhan terhadap RTH pun seharusnya semakin bertambah. Selain itu, pemerintah juga tidak konsisten dalam

menjaga RTH yang ada, karena banyak alih fungsi tata guna lahan, seperti pelebaran jalan yang tidak diimbangi dengan peremajaan RTH, atau membiarkan sempadan sungai, rel dan instalasi berbahaya ditempati oleh pemukiman kumuh tanpa ada sanksi yang tegas. Hal - hal tersebut menjadikan RTH di perkotaan harus bersaing dengan keadaan yang sulit mulai dari keterbatasan lahan, hingga kondisi lingkungan yang buruk karena akibat polusi dari kendaraan bermotor dan utilitas lainnya. Persoalan ini tentunya akan berujung pada upaya dalam penyediaan RTH yang sesuai dengan ketentuan yang ada serta mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini.

D. Penguatan Kelembagaan dan Komponen Masyarakat

Suatu hal yang sampai sekarang masih merupakan masalah yang memprihatinkan adalah masalah kurangnya pengertian dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai warisan budaya dan situs-situs sejarah sebagai sesuatu yang perlu dilestarikan. Kita sering mendengar adanya pengerusakan dan pencurian terhadap peninggalan-peninggalan arkeologi, lingkungan situs atau situs-situs budaya yang dilakukan oleh bangsa sendiri, yang tidak memiliki rasa tanggungjawab. Kasus yang paling sering dialami dunia arkeologi sampai sekarang adalah pencurian. Pencurian besar-besaran mulai teridentifikasi pada tahun 1960-an, ketika sejumlah arca dan berbagai ornamen diketahui hilang dari berbagai candi di pulau Jawa, seperti Plaosan, Sewu, Bhima, Siwa, Sambisari, Banyunibo, Morangan dan gambar¹²⁹.

Kejahatan yang paling sadis adalah pencongkelan terhadap sekitar 200 relief dari kompleks percdandian Gunung

¹²⁹ Susanto, Djulianto (2010), *Berbagai Kejahatan Terhadap Peninggalan Arkeologi*, Dalam Majalah Arkeologi Indonesia.

Penanggungan Jawa Timur pada tahun 1980-an. Pencurian paling sensasional terjadi pada tahun 1987 ketika maling menggondol tujuh keramik antic dan langka dari Museum Nasional Jakarta. Pencurian benda-benda kuno pernah pula dialami Museum Trowulan, Museum Bali, dan Museum Negeri Sulawesi Tengah. Bukan hanya benda di alam terbuka dan museum saja yang diincar orang. Benda-benda antic milik kolektor pun sering raib digasak pencuri. Sejumlah koleksi keris antic milik seorang kolektor, misalnya pernah hilang pada tahun 2002.¹³⁰

Apalagi dalam rangka memenuhi keinginan banyak pihak sebagai wisatawan agar mau mengunjungi situs-situs sejarah tentu dibutuhkan ketersediaan sumber-sumber sejarah agar para wisatawan memahami latar belakang situs-situs tersebut. Hal ini tentunya membutuhkan pengelolaan serius oleh sebuah institusi/lembaga serta mendapat apresiasi masyarakat setempat. Berbagai unsur maupun komponen masyarakat tentu harus diikutsertakan, sehingga mereka merasa ikut bertanggungjawab terhadap upaya pelestarian situs-situs yang ada di sekitar pemukimannya.

Pengelolaan situs-situs sejarah ini juga sebaiknya dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini untuk Kota Pematangsiantar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apalagi sejumlah peraturan maupun undang-undang mengenai perlindungan tinggalan-tinggalan arkeologi atau situs-situs sejarah di negara kita sudah banyak, misalnya UU No.5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah No.10/1993 tentang Pelaksanaan UU No.5/1992, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

¹³⁰ Susanto, Djulianto (2010), *ibid.*

No.63/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.

Turunan dari sejumlah peraturan perundang-undangan ini tentunya dapat diterjemahkan oleh pemerintah daerah dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Upaya Pelestarian Situs-situs Sejarah yang ada di Kota Pematangsiantar. Masalah teknis dan kajian akademisnya tentu bukan hal yang sulit untuk dilakukan.

Masyarakat melalui elemen-elemen terkait, termasuk kalangan organisasi non pemerintah dan kalangan perguruan tinggi harus turut mendorong pemerintah Kota Pematangsiantar, baik langsung melalui Walikota maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar ada perhatian untuk pelestarian situs-situs sejarah ini.

Apalagi sejalan dengan perubahan struktur dalam pemerintahan dalam konteks otonomi daerah yang titik beratnya adalah daerah tingkat kota/kabupaten, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup untuk pelestarian situs-situs sejarah dimaksud. Bahkan untuk tingkat pusat di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, juga telah ada Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya serta telah ada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional serta sejumlah lembaga-lembaga terkait lainnya yang dapat dijadikan sebagai mitra.

Usaha-usaha dimaksud tentu dapat dilakukan melalui pemberian penerangan dengan menggandeng media massa, melakukan pameran-pameran kepurbakalaan dengan tujuan memberikan dan menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya dan situs-situs sejarah, seminar-seminar di kampus-kampus dengan melibatkan perguruan tinggi, maupun memberikan pendanaan hibah untuk membiayai penelitian-penelitian secara ilmiah dan akademis.

E. Penulisan Situs-situs Sejarah Kota Pematangsiantar

Upaya lain yang patut dipertimbangkan dalam rangka upaya pelestarian situs-situs sejarah di Kota Pematangsiantar, dalam hubungannya dengan pembentukan karakter generasi bangsa dengan pemaknaan nilai-nilai perjuangan bangsanya adalah melakukan penulisan sejarah.

Penulisan sejarah yang disebut juga historiografi¹³¹ dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (*verifikasi*) dan diinterpretasi lewat metode sejarah.¹³² Sesuai dengan tugas penelitian sejarah untuk merekonstruksi sejarah masa lampau, maka rekonstruksi itu hanya akan menjadi eksis apabila hasil-hasil penelitian tersebut ditulis (historiografi). Sehingga setiap orang dapat membacanya, menelaahnya, bahkan memberikan respon maupun kritik dalam rangka perbaikan secara berkesinambungan.

Meskipun harus disadari bahwa penulisan sejarah tidak semudah seperti penulisan ilmiah lainnya. Sebab penulisan sejarah tidak cukup dengan menghadirkan informasi dan argumentasi. Penulisan sejarah, terikat oleh aturan-aturan logika dan bukti-bukti empirik, serta tidak boleh dilupakan bahwa sejarah adalah juga karya sastra yang menuntut kejelasan struktur dan gaya bahasa, aksentuasi serta nada retorika tertentu.

Apabila sejarawan mampu menampilkan kejelasan, keteguhan dan kekuatan, serta kerapian dalam ekspresi penulisan, maka ia akan mampu mencapai apa yang menjadi

¹³¹ Tentang historiografi baca, Kartodirdjo, Sartono (2020), *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Penerbit Ombak : Yogyakarta.

¹³² Tentang Metode Sejarah, baca Sulasman (2014), *Metodologi Penelitian Sejarah, Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, Penerbit Pustaka Setia : Bandung.

dambaan setiap sejarawan, yakni memadukan kesejarawanan dan kesasterawanan, antara keahlian dan ekspresi bahasa.

Karya penulisan penelitian sejarah dapat mengambil beberapa bentuk seperti paper, artikel, atau buku, bahkan dalam bentuk buku-buku yang berjilid-jilid. Masing-masing bentuk memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, menuntut komposisi dan gaya bahasa, serta jenis-jenis kerja yang berlainan pula. Dalam penulisan ini lebih difokuskan pada prinsip-prinsip penulisan sejarah ilmiah pada umumnya.

Setelah menyelesaikan secara tuntas setiap tahap penelitiannya, sejarawan masih harus memikirkan strategi bagaimana menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitiannya. Seorang sejarawan yang gagal menyusun strategi penulisan penelitiannya akan beresiko kehilangan makna sumber-sumber, dan bukti-bukti (*evidence*) sejarah yang selama ini telah dikumpulkannya dan yang dengan jerih payah pula telah dipelajari dan dikajinya.

Menulis karya penelitian sejarah memang tidak cukup sekedar meringkaskan hasil-hasil penelitiannya, menuliskan kesimpulan-kesimpulannya tanpa memperhatikan gaya, strategi bagaimana dapat menampilkan kemampuan penulisannya secara efektif, sehingga pembaca dapat diyakinkan dan mau menerima hasil pemahamannya melalui interpretasi mengenai peristiwa, periode, individu dan proses sejarah.

Hanya memang, secara teknis kendala penulisan karya sejarah ini adalah menyangkut masalah pendanaan. Hal ini tentunya dapat teratasi jika ada lembaga, masyarakat maupun pemerintah yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya pelestarian situs-situs sejarah yang sangat penting bagi kelangsungan generasi bangsa ini.

F. Kesadaran Sejarah Bangsa Indonesia

Ada kesepakatan umum bahwa setiap peradaban dimulai dengan peninggalan tertulis, tidak lain oleh karena tulisanlah yang “menjinakkan” memori (ingatan) manusia serta menyimpan data dan fakta bagi generasi berikutnya, jadi diabadikan. Jadi timbul kemungkinan bagi generasi kemudian untuk mengungkapkan dan menghidupkan kembali pengalaman masa lampau. Di sini monumen dan dokumen menghadirkan kembali kepada generasi kemudian pengalaman bersama dari suatu reaktualisasi pengalaman kolektif suatu bangsa yang lajim disebut sejarah. Transformasi dari kekinian menjadi kelampauan merupakan persaksian kesadaran dan aliran waktu yang bergerak menurut garis lampau-kini-masa depan. Disini perspektif waktu tercipta sebagai bentuk kesadaran sejarah. Lebih jelas lagi ialah bentuk penulisan sejarah tradisional seperti babad, hikayat, kronik dan sebagainya.¹³³

Beberapa monumen sejarah yang sesungguhnya sudah merupakan citus di kota Pematangsiantar adalah sebagai peninggalan kolektif masyarakat lokal. Masyarakat kota Pematangsiantar yang diperkirakan telah ada semenjak abad-abad ke-5 Masehi, telah menunjukkan dan meninggalkan kesadaran sejarah.

Apabila manusia Indonesia yang ada di Pematangsiantar menunjukkan kehadirannya dalam alam semesta melalui penciptaan artefak, maka keberadaan ruang dan waktu dalam kesadarannya telah dituangkan dalam tradisi lisan dan tertulis, prasasti, kronik, geneaologi, sejarah, dan sebagainya.

¹³³ Sartono Kartodirdjo, 1993, *Pembangunan Bangsa*, Yogyakarta : Aditya Media. hlm. 56.

Pelbagai fakta yang diabadikan dalam tradisi tertulis menimbulkan tempat penyimpanan yang melembaga sebagai historiografi, suatu proses yang amat fundamental dalam formasi peradaban, tidak lain karena dengan demikian manusia dapat “membebaskan diri” dari waktu subjektif, yaitu kesadaran waktu pada manusia individual. Proses objektivikasi waktu terlaksana melalui proses penulisan sejarah, yang disatu pihak merekonstruksi waktu dan di pihak lain mengkonstruksi pengalaman kolektif suatu kelompok.¹³⁴

Masyarakat kota Pematangsiantar yang pada awalnya adalah etnis Simalungun, telah meninggalkan berbagai tradisi tertulis seperti Huruf *Lak-lak*, *Parhalaan*, dan sebagainya dan citus ini telah tersimpan di Museum Simalungun kota Pematangsiantar. Kesadaran masyarakat dewasa ini perlu digugah untuk menangkap pesan apa yang tersimpan dari koleksi citus yang tersimpan pada lembaga tersebut. Untuk historiografi tradisional bahwa masyarakat Simalungun mempunyai karya *Parpadanan NaBolag*, *Turiturian Ompung Na I horsik*, *Si Jonaha*, *Si Marsingkam*, dan lain-lain. Karya tersebut mengandung mitos. Oleh karena asal-mula mitologis menjadi dasar legitimitasi eksistensi suatu dinasti maka setiap kali hal itu perlu diaktualisasikan lewat upacara, sehingga kita menghadapi gejala paradoksal, ialah bahwa kesadaran sejarah dituangkan melalui aktualisasi mitos.

Momentum historis dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia terjadi pada akhir dasawarsa pertama abad ke-20, yaitu apa yang lajim disebut Kebangkitan Nasional. Gerakan Budi Utomo merintis proses kebangkitan nasional

¹³⁴ Ibid.

adalah penuh makna terutama apabila dipandang dalam hubungannya dengan munculnya kesadaran nasional. Nasionalisme lahir sebagai kekuatan antagonis terhadap kolonialisme. Tidak dapat diingkari bahwa perlawanan terus menerus telah terjadi dalam abad-abad sebelumnya, namun pada umumnya merupakan jawaban yang kurang efektif.

Munculnya gerakan Nasionalisme adalah adanya kesadaran sejarah yang merupakan sumber inspirasi kaum pemimpin Budi Utomo seperti dr.Wahidin, dr.Sutomo, dr. Ciptomangunkusumo, maupun tokoh nasionalisme lainnya seperti Ki Hajar Dewantara, dan lain sebagainya.

Untuk kota Pematangsiantar, tokoh Sang Nawaluh Damanik dapat mewakili tokoh lokal yang berskala nasional, yang berupaya membebaskan bangsanya dari penjajahan colonial. Berangkat dari kesadaran sejarah yang dimiliki Sangnawaluh tidak mau bekerjasama dengan kolonial, konsekwensinya siap dibuang ke Bengkalis¹³⁵.

Dengan adanya citus Sangnawaluh di Pamatang, dapat memberikan kesadaran sejarah bagi masyarakat pendukungnya. Lewat sejarah orang dapat menemukan diri sendiri atau sebaliknya orang menemukan sejarahnya agar dapat mengenal kembali diri sendiri atau identitas dirinya.

Sebagai analogi, dapat kita meniru kesadaran sejarah apa yang dilakukan Nehru di India. Nehru menulis "*Discovery of India*", dia hendak "menemukan" kepribadiannya. Sistem kolonial serta pendidikan yang diterima Nehru menyebabkan aliansi terhadap kebudayaan serta sejarahnya dan dengan demikian kehilangan identitas atau kepribadiannya. Nehru berusaha menemukan identitas

¹³⁵ TBA Purba Tambak, 1982. *Sejarah Simalungun*, HKBP, Pematangsiantar. hlm.35.

kebangsaannya dengan membangkitkan kesadaran sejarahnya atau pengalaman kolektifnya¹³⁶.

Identitas sukubangsa merupakan suatu unsur yang dinamis dan situasional, daripada suatu unsure budaya yang “primordial”, sebagaimana yang ditunjukkan banyak ahli sosial. Kesukubangsaan bahkan bahasa dan agama bisa dintensifkan, namun bisa juga berubah dalam suatu jangka waktu hidup seseorang, atau pada generasi berikutnya. Hanya identitas ras dan kasta yang tidak berubah selama masa hidup individu, sedangkan ciri-ciri ras tetap berlangsung selama beberapa generasi keturunan. Koentjaraningrat¹³⁷ mengatakan bahwa suatu sejarah nasional yang panjang dengan kasus-kasus kesatuan nasional, integrasi suku bangsa, dan toleransi keagamaan yang membuat rakyat dan para pemimpin negara multi etnik mengacu untuk meningkatkan integrasi nasional, selanjutnya mencegah konflik etnik dan agama, dan merupakan suatu factor penting untuk meningkatkan kesatuan nasional dan solidaritas nasional. Bahwa pembentukan suatu kebudayaan nasional yang kuat meningkatkan identitas nasional dan bahwa adanya suatu bahasa nasional mengintensifkan kesatuan nasional.

Kalau citus sejarah budaya di kota Pematangsiantar, dapat diajarkan kepada warganya, tentunya akan membangkitkan pengalaman kolektif warga, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Apabila pembangunan bangsa difokuskan pada mengkonstruksi kepribadian bangsa, sedang pengalaman kolektif masa lampau inheren dalam

¹³⁶ Sartono Kartodirdjo, Ibid.

¹³⁷ Koentjaraningrat, (1993) *Masalah Kesukubangsaan Dan Integrasi Nasional*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta. hlm.49-50.

struktur kepribadian itu, maka sejarahlah merupakan unsure esensial bagi kepribadian bangsa.

Dengan menyadari kedudukan dan peran sejarah dalam rangka pembangunan bangsa, sejarawan diharap berusaha meningkatkan profesinya sehingga hasil usahanya dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi pembangunan bangsa.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN MANAJEMEN PARIWISATA

A. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan adalah kata kunci terpenting dalam pemerintahan semua negara. Semua propaganda dan kampanye politik dalam rangka menguasai aparatur negara berkuat disekitar kata pembangunan. Sebab pembangunan diartikan sebagai upaya-upaya memajukan kehidupan negara dan warganya melalui penciptaan sarana dan prasarana baru atau mengembangkan yang telah ada untuk mencapai tujuan baru.¹³⁸ Termasuk dalam bidang pembangunan pariwisata, sebab objek pariwisata boleh diciptakan, dan atau boleh dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Buku ini membicarakan mengenai pembangunan pariwisata melalui situs sejarah dengan lokasi situasi sosial di kota Pematangsiantar. Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh kepuasan yang beraneka ragam. Selain itu dijelaskan pariwisata sebagai suatu industri yang menghasilkan produk yang dikonsumsi di tempat tujuan. Bagi daerah tujuan wisata, hal ini merupakan suatu ekspor yang tidak kentara (*invisible-exports*). Dan manfaat lainnya adalah berpengaruh positif bagi perekonomian, kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

¹³⁸ Abdullah, Oekan S (2016), *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia : Dipersimpangan jalan*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta. Hlm. 3

Wisatawan adalah orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungannya itu. Tipologi wisatawan merupakan aspek sosiologis wisatawan yang menjadi bahasan yang penting karena pada penelitian ini akan meneliti persepsi wisatawan terhadap suatu objek wisata.

Ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata yaitu : atraksi, transportasi, fasilitas, dan kelembagaan. Atraksi adalah daya tarik daerah tujuan wisata untuk menarik para wisatawan seperti keadaan alam, masyarakat atau budayanya, situs sejarah tinggalannya. Transportasi dimaksudkan adalah agar para wisatawan dapat dengan mudah dalam mencapai tujuan ke lokasi wisata. Fasilitas adalah tempat berupa sarana seperti hotel, atau acomodasi yang nyaman bagi wisatawan. Kelembagaan adalah adanya lembaga pariwisata yang dapat melindungi para wisatawan sehingga merasa nyaman tanpa gangguan dari orang-orang yang dikunjungi.¹³⁹ Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut : harga, pendapatan, sosial budaya, sosial politik, intensitas keluarga, harga barang substitusi, dan harga barang komplementer.

Harga yang terlalu mahal di lokasi wisata akan memberikan dampak timbal balik pada wisatawan yang akan bepergian, sehingga permintaan wisatapun akan berkurang begitu pula sebaliknya. Berkaitan dengan aspek pendapatan, manakala pendapatan suatu negara tinggi, kecendrungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan semakin tinggi dan bisa jadi calon

¹³⁹ I Gusti Bagus Rai Utama (2014), *Pengantar Industri Pariwisata*, Penerbit Deeppublish : Yogyakarta, hlm. 118.

wisatawan membuka usaha pada lokasi tujuan wisata manakala dianggap dapat memberikan keuntungan.

Berkaitan dengan aspek sosial budaya yang unik dan bercirikan atau berbeda dari apa yang ada di negara calon wisata berasal maka, peningkatan permintaan terhadap wisata akan tinggi hal ini akan membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai khasanah kekayaan pola pikir budaya wisatawan.

Berkaitan dengan aspek sosial politik, dampak sosial politik belum terlihat apabila keadaan lokasi wisata dalam kondisi aman dan tenteram, tetapi apabila hal tersebut berseberangan dengan kenyataan, maka akan sangat terasa dampak dan pengaruhnya dalam terjadinya permintaan. Berkaitan dengan aspek intensitas keluarga banyak atau sedikitnya keluarga juga berperan serta dalam permintaan wisata yang dapat diratifikasi, yaitu bahwa jumlah keluarga yang banyak tentu banyak pula keinginan untuk berlibur dari keluarga tersebut akan semakin besar, tentu kondisi demikian dapat dilihat dari kepentingan wisata itu sendiri.

Berkaitan dengan aspek barang substitusi, harga barang pengganti juga termasuk dalam aspek permintaan, dimana barang-barang pengganti dimisalkan sebagai pengganti lokasi wisata dijadikan cadangan dalam berwisata. Sebut saja contoh : Pulau Bali sebagai tujuan wisata utama di Indonesia, akibat suatu dan lain hal pulau Bali tidak dapat memberikan kemampuan dalam memenuhi syarat-syarat sebagai lokasi wisata sehingga secara tidak langsung wisatawan akan mengubah tujuannya ke daerah terdekat seperti ke Sulawesi Utara (Menado) dan atau Papua (Raja Ampat).

Berkaitan dengan aspek harga barang komplementer, merupakan sebuah barang yang saling melengkapi atau dengan kata lain barang komplementer adalah barang yang

saling membantu menyempurnakan keinginan, dimana apabila dikaitkan dengan pariwisata barang komplementer ini sebagai objek wisata yang saling melengkapi dengan objek wisata lainnya.¹⁴⁰

B. Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan

Aspek yang terkait dengan sumberdaya wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik tujuan wisata. Faktor-faktor yang terkait dengan aspek fisik terdiri dari: aspek lingkungan alamiah, aspek lingkungan buatan, aspek sarana dan prasarana.

Faktor lingkungan alamiah adalah benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta. Hal-hal yang menjadi atribut dalam pengembangan produk wisata antara lain: keindahan, yaitu berkaitan dengan kondisi iklim, dengan indikator cuaca cerah, banyak cahaya matahari, sejuk, kering, panas, hujan, dan sebagainya. Selain kondisi iklim, yang berpengaruh adalah bentuk tanah dan pemandangan, dengan indikator pemandangan yang menarik. Kelestarian berkaitan dengan keberadaan hutan belukar misalnya hutan yang luas, tumbuh aneka pohon, aneka fauna dan aneka flora, aneka tanaman, aneka burung, aneka ikan, cagar alam, kawasan perburuan.

Kebersihan, adalah kondisi kawasan wisata yang bersih bebas dari pencemaran. Faktor lingkungan buatan merupakan segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan buatan manusia. Kriteria yang digolongkan dalam lingkungan buatan adalah: atraksi wisata, yang memiliki defenisi segala sesuatu sajian wisata

¹⁴⁰ I Gusti Bagus Rai Utama (2014), *ibid*.hlm. 120

yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat dan dinikmati. Atraksi wisata dapat berupa tari-tarian, nyanyian, kesenian rakyat tradisional, upacara adat dan lain-lain. Tinggalan benda tradisional, yaitu berupa benda bernilai sejarah, kebudayaan dan keagamaan dengan beberapa indikatornya yaitu: adanya monumen bersejarah, adanya museum bersejarah, perpustakaan, dan kerajinan tradisional. Kesederhanaan tata cara hidup tradisional dari masyarakat yang merupakan salah satu sumber yang amat penting untuk ditawarkan kepada wisatawan.

Faktor prasarana dan sarana wisata dinilai berdasarkan faktor-faktor kualitas yang terdiri dari sarana wisata dan transportasi yang tersedia. Prasarana wisata adalah sarana pendukung pariwisata yang secara tidak langsung sangat dibutuhkan oleh wisatawan. Seperti tersedianya pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal bus, stasiun Kereta Api, fasilitas jalan raya, tersedianya instalasi air dan lain-lain yang menunjang sarana wisata yang dibutuhkan.

Prasarana pariwisata secara langsung maupun tidak langsung merupakan pendukung pemenuhan kebutuhan wisatawan yang sangat utama dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan profesional. Keberadaan sarana dan prasarana wisata tersebut sangat menentukan dan berperan penting sebagai daya tarik utama wisatawan untuk mau datang berkunjung kembali. Manakala sarana prasarana disebuah kawasan wisata kurang memadai dapat menciptakan kesan negatif yang merusak pencitraan dalam pemasaran selanjutnya¹⁴¹.

¹⁴¹ Isdarmanto, (2017), *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Wisata*, Penerbit Gerbang Media Aksara dan STiPrAm : Yogyakarta. hlm.50.

Hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana wisata terkait beberapa komponen yaitu : sarana rekreasi berupa semua fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olah raga. Fasilitas yang dapat menampung kedatangan wisatawan yang berbentuk akomodasi wisata, seperti penginapan hotel atau tempat makan atau restoran. Sarana pelengkap atau penunjang kepariwisataan adalah tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, tetapi yang terpenting adalah untuk membuat wisatawan dapat lebih lama tinggal di tempat wisata. Sarana penjualan yaitu berupa toko-toko yang menjual barang-barang souvenir atau benda-benda lain khusus wisatawan. Utilitas, yaitu terkait dengan ketersediaan listrik dan sanitasi seperti tersedianya toilet dan air bersih.

Sarana Wisata adalah sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan, dari aspek ekonomi yang merupakan berbagai fasilitas yang selalu diperlukan atau dibutuhkan langsung oleh wisatawan, seperti: adanya transportasi, akomodasi, restoran, jasa penunjang/ pemandu wisata, souvenir dan lain-lain.

Sarana transportasi dapat memudahkan orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu, daerah tujuan wisata. Kemajuan fasilitas transportasi mendorong kemajuan kepariwisataan dan sebaliknya ekspansi yang terjadi dalam industri pariwisata dapat menciptakan permintaan transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa fungsi utama transportasi sangat erat hubungannya dengan "*accessibility*". Maksudnya frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak yang jauh seolah-olah menjadi lebih

dekat. Hal ini berarti mempersingkat waktu dan tentunya lebih meringankan biaya perjalanan¹⁴².

Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya, sedang klasifikasi dan manajemen pengelolaannya dapat dibedakan sesuai dengan tingkat standar kualitasnya seperti: hotel bintang dan non bintang, hotel melati, penginapan. Manajemen perhotelan diperoleh dari pendidikan vokasi perhotelan yang sesuai, dan praktek yang efektif serta pengembangan seni kreatif dan inovatif untuk menjalankan bisnis hotel, restoran dan bisnis pariwisata lainnya. Manajemen perhotelan memastikan melibatkan semua operasionalnya, termasuk penyediaan akomodasi, makanan dan minuman dan pelayanan serta penyediaan fasilitas hotel lainnya dapat berjalan lancar.

Dalam pariwisata fasilitas losmen, *guest house*, apartemen memiliki pangsa pasar tersendiri. Selain itu prasarana sosial juga sangat penting adalah sarana pendidikan dan kesehatan. Sarana pendidikan terdiri dari fasilitas pendidikan yang mengkhususkan diri dalam pendidikan kepariwisataan. Dan fasilitas kesehatan berupa pelayanan kesehatan melalui penyediaan klinik kesehatan, pusat kesehatan masyarakat untuk memberikan jaminan kesehatan pada para wisatawan.

1. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Dalam fenomena saat ini terjadi pergeseran pasar wisata ditunjukkan oleh adanya pergeseran orientasi pengembangan produk wisata. Konsep pengembangan

¹⁴² Isdarmanto, (2017), *ibid.* hlm. 34

wisata sebelumnya berorientasi pada pengembangan produk wisata massal yaitu pengembangan skala besar pada budaya korporasi secara multinasional. Pengembangan produk berorientasi pada volume dan target kuantitatif, serta berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Saat ini orientasi produk wisata menuju konsep produk wisata yang berkualitas¹⁴³.

Suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal didasarkan pada empat aspek yaitu : (1) Mempertahankan kelestarian lingkungannya, ; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.; (3) Menjamin kepuasan pengunjung, ; (4) Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat disekitar kawasan dan zona pengembangannya.

Mempertahankan kelestarian lingkungan adalah bagian dari keterkaitan antara pariwisata dengan lingkungan sekitar. Dalam Program pembangunan berkelanjutan bahwa daya dukung lingkungan perlu dan mutlak dikelola sehingga tetap berkelanjutan, dan generasi berikutnya tetap dapat merasakan lingkungan yang nyaman. Jika pun dalam membangun pariwisata maka lingkungan tidak berubah folumenya, kontribusinya dalam memberikan kenyamanan bagi kehidupan sekitarnya.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pariwisata, adalah merupakan bagian dari tujuan pembangunan. Berkembangnya pariwisata, seperti semakin banyaknya wisatawan yang masuk ke sebuah kawasan objek wisata tentunya akan membawa kesejahteraan bagi warga masyarakat setempat. Sebab para wisatawan pasti akan berbelanja, berbagai kebutuhan wisatawan, termasuk

¹⁴³ Yogi Indra Pratama, *ibid.* hlm. 26

misalnya souvenir. Untuk itu masyarakat setempat harus mampu memanfaatkan peluang memperoleh kesejahteraan dari para wisayawan yang akan berbelanja di kawasan objek wisata.

Menjamin kepuasan pengunjung, adalah sesuatu yang didambakan oleh para wisatawan. Pelayanan yang prima dari segenap masyarakat sekitar objek wisata baik secara langsung maupun secara tidak langsung dibutuhkan demi menciptakan suasana yang asri, menyenangkan, bagi para wisatawan. Barang barang produk wisata yang dijual pada lokasi wisata tentunya diharapkan terjangkau, atau murah meriah, dan tentunya dari segi kepuasan pengunjung, maka penyedia barang ataupun jasa tetap dapat memenuhi selera dari pengunjung. Untuk itu pengetahuan psikologis akan para wisatawan juga perlu diketahui oleh masyarakat setempat, pengelola objek wisata, sehingga mereka dapat menyesuakannya dengan produk wisata yang disediakan.

Untuk pembangunan pariwisata juga membutuhkan adanya kemampuan daya dukung untuk setiap kawasan yang berbeda-beda sehingga perencanaan secara spatial akan lebih bermakna, tergantung pada dimana lokasi pengembangan wisata berada.

2. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Sejak tahun 1990-an isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mulai dibicarakan di kalangan para ahli. Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut diartikan sebagai proses pembangunan yang mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dimana nilai keberlanjutan itu bukan hanya menyangkut aspek fisik tetapi

juga aspek sosial¹⁴⁴. Untuk mewujudkan pola pembangunan berkelanjutan, diperlukan tiga langkah kebijakan yaitu pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta pembangunan sumber daya manusia.

Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kelemahan konsep sebelumnya, sehingga perlu dirumuskan pendekatan *new tourism* dalam sebuah rangkaian kegiatan pariwisata. Pembangunan berkelanjutan, salah satu rumusan penting adalah deklarasi “piagam pariwisata berkelanjutan” tahun 1995 adalah pengembangan pariwisata didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang secara ekologis harus dikelola dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, etika dan sosial masyarakat¹⁴⁵.

Pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana yang didefinisikan oleh *The World Tourism Organization (UNWTO)* adalah pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industry (pariwisata), lingkungan dan masyarakat lokal tuan rumah.

Pariwisata berkelanjutan dapat dikatakan sebagai pembangunan yang mendukung secara ekologis, sekaligus layak sebagai ekonomis, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan

¹⁴⁴ Abdullah, Oekan S (2016), *Ibid* . hlm. 34.

¹⁴⁵ Sulistyadi Yohanes dkk., (2017), *Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat*, Penerbit Ara: Bandar Lampung. hlm. 4.

pemeliharaan sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan.

Berdasarkan konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap memperlihatkan kelestarian lingkungan dan memberi manfaat baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Hal tersebut hanya dapat terlaksana melalui sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga demokrasi, hak azasi manusia, dan isu lain yang lebih luas.

Pembangunan Pariwisata berkelanjutan dimaksudkan adalah sebagai pembangunan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mempertaruhkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tujuannya adalah memadukan pembangunan dengan lingkungan sejak awal proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang strategis sampai kepada penerapannya di lapangan.

Beberapa persoalan dalam pembangunan pariwisata misalnya pada kawasan alam, areal pariwisata dapat menimbulkan masalah ekologis, mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama. Manakala suatu kawasan alami dibangun untuk rekreasi, biasanya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya juga wajib dikembangkan. Pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dapat dikembangkan dan diwaspadai dampaknya dengan memasukkan rencana manajemen lingkungan dan pemantauannya kedalam suatu rencana

terpadu dan pelaksanaannya yang kemudian dimasukkan dalam tahap perencanaan pariwisata.

Kebudayaan¹⁴⁶ suatu masyarakat yang ada di kawasan pariwisata adalah tidak terlepas dari benda-benda alam, rumah, sawah, ternak dan lainnya yang ada di kawasan itu. Kebudayaan dan manusia pendukungnya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang saling mendukung sebagai suatu kawasan wisata alam. Kebudayaan dan lingkungan manusia mutlak dijaga, diberi hubungan yang serasi penataannya sehingga dapat memberi daya tarik wisata yang relatif tinggi bagi wisatawan.

Partisipasi masyarakat setempat (lokal) sangat memberikan peluang efektif dalam pembangunan pariwisata. Sudah selayaknya kepada masyarakat setempat (lokal) diberikan wewenang atau kekuasaan pada masyarakat sebagai pemeran sosial dan bukan subjek pasif untuk mengelola sumberdaya tetapi juga membuat keputusan dan kontrol pada kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupan sesuai dengan kemampuannya. Perlu interaksi ketiga pihak yang ikut terlibat, yaitu sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat.

Untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan pariwisata ada beberapa indikator dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, diantaranya : (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) Kepuasan masyarakat lokal; (3) Kemudahan akses menuju daya tarik wisata; (4) Terkendalinya dampak negatif; (5) Pelestarian pusaka budaya dan alam; (6) Terdapatnya partisipasi masyarakat; (7) Kepuasan wisatawan; (8) Kesehatan dan keselamatan umum; (9) Memiliki manfaat ekonomi bagi

¹⁴⁶ Tentang kebudayaan baca Koentjaraningrat, (2009), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 144

masyarakat lokal, pengusaha, dan pemerintah; (10) Menciptakan lapangan kerja.

Pedoman dan praktek pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berlaku untuk semua bentuk pariwisata di semua destinasi, termasuk pariwisata massal dan berbagai segmen wisata. Prinsip berkelanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.¹⁴⁷ Pengembangan pariwisata, dan keseimbangan yang sesuai harus ditetapkan antara ketiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya. Dengan demikian pariwisata berkelanjutan harus :

- a. Memanfaatkan sumber daya lingkungan secara optimal yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, memelihara proses ekologis yang penting dan membantu melestarikan alam dan keanekaragaman hayati.
- b. Menghormati keaslian sosio-budaya masyarakat lokal, melestarikan warisan budaya, dan nilai tradisional yang dibangun dan tetap hidup, dan berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya.
- c. Memastikan operasional ekonomi jangka panjang yang layak memberikan manfaat sosio ekonomis kepada semua pemangku kepentingan dan terbagi secara merata, termasuk lapangan kerja dan kesempatan kerja produktif yang stabil dan layanan sosial, agar masyarakat menjadi tuan

¹⁴⁷ Iskandar, Johan (2017), *Ekologi Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran : Bandung. Hlm. 2-3.

rumah, serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan¹⁴⁸.

Pembangunan kawasan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisir untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber-daya secara berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang relevan, serta dukungan politik yang kuat untuk memastikan partisipasi dan pembangunan konsesnsus yang luas. Mencapai pariwisata berkelanjutan adalah proses yang berkesinambungan dan memerlukan pemantauan dampak yang terus menerus, dengan memperkenalkan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan yang diperlukan. Pariwisata berkelanjutan juga harus mempertahankan tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi dan memastikan pengalaman yang berarti bagi wisatawan.

C. Manajemen Kepariwisata

Umumnya dapat diketahui bahwa manajemen itu meliputi unsur-unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Sesuai dengan keperluan dari buku ini maka manajemen lebih banyak penekanannya pada segi perencanaan dan manajemen diberi

¹⁴⁸ Sulistyadi Yohanes dkk., (2017), *Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat*, Penerbit Ara: Bandar Lampung. Hlm. 61-62.

pengertian yang lebih umum sebagai pengelolaan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya khususnya pada pasal 7 disebutkan bahwa mengelola kepariwisataan menyangkut 4 aspek yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Industri pariwisata menyangkut produk dan jasa yang dihasilkan oleh penyedia wisata untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, destinasi wisata menunjuk pada obyek dan daya tarik wisata yang menjadi tujuan dari wisatawan, pemasaran menyangkut bagaimana menawarkan obyek dan daya tarik wisata kepada calon wisatawan, dan kelembagaan pariwisata berhubungan dengan organisasi pendukung kepariwisataan yang meliputi pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* lainnya¹⁴⁹.

1. Landasan Pembangunan Pariwisata

Landasan utama dalam penyelenggaraan pariwisata di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia mutlak sebagai pedoman dalam pembangunan sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata harus berpedoman dan tidak bertentangan dengan butir-butir yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mutlak menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata nasional serta dijadikan alat penyaring atau filter terhadap masuknya budaya asing yang dibawa oleh para wisatawan mancanegara yang tidak sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, dan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan dari Minangas sampai pulau Rote. Pembangunan sektor

¹⁴⁹ Zainuri, Muchamad, (2012), *Perencanaan Strategis Kepariwisataannya daerah Konsep dan Aplikasi*, Penerbit e-Gov Publishing: Yogyakarta, hlm. 62

pariwisata merupakan bagian yang tidak terlepas dari pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan¹⁵⁰.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokrasi, kesetiaan, dan kesatuan. Berdasarkan pasal tersebut penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Melalui azas manfaat, maka pariwisata dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara. Usaha bersama dan kekeluargaan yang berarti bahwa kepariwisataan merupakan usaha bersama dan gotong royong dan bukan untuk kepentingan seseorang atau suatu golongan dan apabila terdapat persoalan harus dapat diselesaikan secara musyawarah berdasarkan kekeluargaan. Adil dan merata artinya kepariwisataan dapat menciptakan suasana penuh perikehidupan yang seimbang untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Faktor lain menunjukkan bahwa kepariwisataan dibangun demi kepentingan bersama dan menciptakan kesejahteraan yang merata.¹⁵¹

Penyelenggaraan pariwisata diharapkan mampu mendorong upaya untuk menumbuhkan masyarakat Indonesia untuk semakin mencintai tanah air, mempertebal rasa memiliki terhadap apa yang ada pada negara ini, menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan diantara suku

¹⁵⁰ Muljadi, A.J dan Warman, H.Andri, (2014), *Kepariwisataan dan Perjalanan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 37

¹⁵¹ Muljadi, A.J dan Warman, H.Andri, *ibid*.

bangsa yang ada di tanah air dan saling memahami adat istiadat dan budaya daerah masing-masing, dan antar daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pariwisata ditujukan pula untuk meningkatkan persahabatan antar bangsa khususnya antar sesama bangsa Indonesia dengan bangsa luar Indonesia melalui pengembangan kerjasama internasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 (PP 50 Tahun 2011) Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas) Tahun 2010-2025 mendefinisikan destinasi pariwisata atau daerah tujuan pariwisata sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Berangkat dari hakekat (PP 50 Tahun 2011) tersebut, maka sesungguhnya kota Pematangsiantar dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Untuk itu sangat perlu didukung oleh keberadaan komponen-komponen pembentuk destinasi pariwisata, yang unggul dan berdaya saing tinggi, serta memiliki hubungan yang kuat, kompak, bersinergi, dan saling mendukung antar komponen pembentuknya.

Destinasi wisata atau bisa disebut juga objek wisata adalah kawasan geografis yang dapat menimbulkan daya tarik dimana didalamnya terdapat pula fasilitas, aksesibilitas yang membuat wisatawan ingin melihatnya dan berkunjung. Produk pariwisata didefinisikan sebagai "daya tarik" ditambah "industri pariwisata". Daya tarik wisata umumnya terbagi menjadi dua kelompok utama :

- a) Daya Tarik Wisata Alam. Daya tarik wisata alam bisa beragam, seperti:
1. Situs topografi : gunung, pantai, lembah, gua, ngarai, gunung berapi, terumbu karang.;
 2. Situs iklim: tempat panas, tempat dingin, tempat lembab, tempat kering.;
 3. Situs yang didefinisikan menurut lokasi: pusat atau situs yang mudah diakses, situs yang terisolasi atau sulit dijangkau.;
 4. Situs yang menampilkan kehidupan tumbuhan atau hewan tertentu: misalnya, hutan, padang rumput, padang pasir, kebun binatang, kebun raya.;
 5. Situs hidrologi: danau, sungai, air terjun, mata air mineral.;
 6. Kejadian alami: gerhana bulan, perubahan pasang surut, kejadian musiman seperti perkawinan, migrasi hewan dan burung, letusan gunung berapi, musim hujan atau kemarau, dan perubahan kondisi laut yang mungkin menarik peselancar.
- b) Daya Tarik Wisata Budaya. Beberapa contoh daya tarik wisata budaya yang terbagi dalam beberapa situs, :
1. Situs prasejarah: destinasi wisata yang mengandung sejarah dari jaman dahulu yang lokasinya tetap dan dalam bentuk yang sama seperti *Stonehenge*, Candi Borobudur, lukisan gua, dan sebagainya.
 2. Situs bersejarah: destinasi wisata yang berisikan benda-benda bersejarah yang ditempatkan dalam satu tempat atau satu destinasi wisata seperti

museum, monumen kuno, kuburan, bangunan yang terdaftar sebagai warisan budaya, lokasi kejadian penting.

3. Situs religius yang penting: Katedral, Gereja Tua, Masjid, tempat suci, Klenteng tua.
4. Pertunjukan dan acara budaya kontemporer: galeri seni, arsitektur modern, teater, festival, pameran, pameran olahraga internasional.
5. Atraksi pedesaan: peternakan, perkebunan anggur, pertambangan, daerah pertanian, teknologi pertanian atau museum.
6. Atraksi ritel: pusat perbelanjaan besar, toko spesialis kecil, pasar, rumah mode, pameran atau pameran kerajinan.
7. Atraksi rekreasi: resor, taman hiburan, lapangan golf, kasino, acara olahraga.
8. Acara budaya : festival, pesta tahunan, rondang bintang, Pesta danau Toba.

2 Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.¹⁵²

Pengertian daya tarik wisata yaitu segala sesuatu yang dapat menarik kedatangan wisatawan, baik yang berupa kawasan (*site*) atau acara tertentu (*even*) dimana keduanya dapat menghasilkan gaya gravitasi kepada orang di luar kawasan tersebut. Pengertian ini menunjukkan bahwa segala sumberdaya seperti situs, pemandangan, peristiwa, dan

¹⁵² (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025).

budaya tidak bisa menjadi daya tarik dengan sendirinya kecuali sebuah sistem kepariwisataan terbentuk untuk mendesain dan mengangkat statusnya menjadi sebuah daya tarik.

Pemahaman terhadap daya tarik wisata tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap (*resource*) sebagaimana terdapat dalam buku pedoman pembangunan daya tarik wisata nasional (DTWN) yaitu semua sumberdaya, baik alam maupun buatan manusia yang mempunyai potensi untuk dikunjungi oleh wisatawan karena mempunyai nilai-nilai tertentu, seperti kesejarahan, pengetahuan, kerohanian, pengalaman, dan lain-lain.

Sesuai dengan definisinya, sumberdaya disebut memiliki daya tarik apabila menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Sumberdaya yang dapat menjadi daya tarik umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya buatan manusia. Dengan kata lain, istilah yang dikenal dengan sumber daya wisata, yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang potensial dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Secara umum, perbedaan mendasar antara daya tarik wisata dan sumber daya wisata terletak pada kunjungan wisatawan. Suatu lokasi wisata jika sudah dikunjungi wisatawan dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sedangkan lokasi wisata yang belum dikunjungi wisatawan disebut sebagai sumber daya wisata.

Pematangsiantar saat ini memiliki daya tarik wisata yang relatif masih sedikit. Sementara itu sumber daya wisata sudah cukup banyak yang memiliki potensi untuk mendatangkan kunjungan wisatawan. Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 mengelompokkan daya tarik wisata ke dalam tiga kategori, yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia. Lebih lanjut, bagian Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah tersebut menguraikan bahwa daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam; daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk berbudaya; dan daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.¹⁵³

Kota Pematangsiantar memiliki 28 (dua puluh delapan) daya tarik wisata yang terdiri dari 18 (delapan belas) daya tarik wisata budaya dan 10 (sepuluh) unit daya tarik wisata buatan, serta 64 (enam puluh empat) sumber daya wisata¹⁵⁴. Kategorisasi daya tarik dan sumber daya wisata Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

Daya tarik wisata Alam : Untuk ini adalah berupa perairan sungai dan danau, yaitu :

1. Kawasan Sungai Bah Bolon (Kawasan Dewi Kwan Im);
2. Kawasan Sungai Bah Bolon (Kawasan Sudirman Diponegoro – MH. Sitorus);
3. Kawasan Sungai Bah Bolon (Kawasan Rindam);
4. Arung Jeram (Bah Bolon-Rindam);

¹⁵³ Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kota Pematangsiantar Tahun 2018-2025.

¹⁵⁴ Laporan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (Ripparkot) Pematangsiantar 2019-2025.

5. Kawasan Sungai Bah Bolon (*river tubing*);
6. Umbul Tombak Pulo Pulo (Pemandian Alam);
7. Pemandian Pulau Pandan;
8. Pemandian Sibatu batu / Umbul Air Pulau Batu;
9. Pondok Naga Tujuh (Pemandian Alam);
10. Pancuran Air Jl. Damar;
11. Mata Air Besar;
12. Mata Air Peninggalan Belanda;
13. Mata Air Bah Si Tangan (Tempat Basuh Tangan Raja Sang Nawaluh Damanik).

Kota Pematangsiantar juga memiliki daya tarik perkebunan dimana kota ini dahulunya adalah bekas wilayah Perkebunan; Kawasan itu adalah :

1. Perkebunan Sawit (PTPN IV);
2. Perkebunan Sawit (Kebun Marihat).

Sementara itu kota Pematangsiantar juga memiliki daya Tarik Pertanian, hal ini dapat kita lihat pada:

1. Kawasan Pertanian (Marihat);
2. Pertanian (Marimbun);
3. Pembibitan Ikan;
4. Petani Lebah Madu.

Berikutnya di kota Pematangsiantar juga memiliki Daya Tarik bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya; hal itu dapat dilihat pada :

1. Gua Kampret / Gua Kelelawar (PTPN IV).

Daya Tarik Wisata Budaya bersifat berwujud (*tangible*). Hal ini merupakan cagar budaya, meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs

cagar budaya, kawasan cagar budaya yang terdapat di kota Pematangsiantar yaitu ;

- 1) Kantor Pusat Gereja HKI
- 2) Kantor Pusat Gereja HKIP
- 3) Gereja Bolon HKBP Pematangsiantar
- 4) Cagar Budaya Gereja Katolik St. Laurentius Brindici
- 5) Vihara Avalokitesvara
- 6) Shri Mariamman Kuil
- 7) Pusat Kremasi Umat Hindu (Jl. Pane)
- 8) Vihara Maha Vihara Vidya Maitreya
- 9) Gereja Katolik Santo Yoseph
- 10) Patung Dewi Kwan Im Vihara Avalokitesvara
- 11) Mesjid Raya Pematangsiantar
- 12) Seminari Menengah Christus Sacerdos Pematangsiantar (Sekolah)
- 13) Rumah Sakit Harapan
- 14) Bangunan Rumah Sakit Tentara
- 15) Kawasan Cagar Budaya RSUD Dr.Djasamen Saragih
- 16) Bangunan Gedung Kantor Walikota
- 17) Rumah Tinggal Mantan Wakil Presiden H. Adam Malik
- 18) Bangunan Heritage Pasar Horas Dwikora
- 19) Bangunan Heritage Kantor Pos
- 20) Bangunan Bank BRI
- 21) Gedung Juang 45.
- 22) Bangunan Gedung UPT Tataruang dan Perumahan
- 23) Gedung DPRD Kota
- 24) Bangunan Statsiun Kereta Api
- 25) Bangunan Siantar Hotel
- 26) Bangunan GPIB Jemaat Maranatha
- 27) Kompleks STT HKBP Nommensen dan Universitas Nommensen

- 28) Bangunan SMAN 4 Pematangsiantar
- 29) Bangunan Tua (bekas kantor lurah pertama)
- 30) PT. STTC (Sumatera Tobacco Trading Company)
- 31) PT.Pabrik Es Siantar (Pabrik tertua)
- 32) Bioskop Ria
- 33) Perumahan Perkebunan Lama.
- 34) Pesantren Darrussalam
- 35) Jabu Sihol (rumah)
- 36) Kawasan Militer Rindam I Bukit Barisan
- 37) Makam Raja Tong Marimbun.
- 38) Makam Keturunan Raja Siantar.
- 39) Makam Damanik.
- 40) Jerat Partongah Kerajaan Siantar (Tugu Raja Sang Nauluh Damanik)
- 41) perkampungan tradisional
- 42) dengan adat dan tradisi
- 43) Budaya masyarakat yang khas ;
- 44) Museum Simalungun
- 45) Museum Zoologi¹⁵⁵

Daya tarik wisata budaya bersifat tidak berwujud (*intangible*) di kota Pematangsiantar adalah kehidupan adat dan tradisi masyarakat serta aktivitas budaya masyarakat yang khas. Dalam hal yang berwujud ini untuk kota Pematangsiantar adalah :

1. Pabrik Roti Ganda;
2. Pabrik Roti Kacang;
3. Industri Pabrik Tepung Tapioka

¹⁵⁵Laporan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (Ripparkot) Pematangsiantar 2019-2025.

4. Industri Kecil Makanan Ringan (Kerupuk, roti ketawa)
5. Industri kecil Ulos dan Bordir (Siantar Selatan)
6. Industri Kecil Roti Ganda
7. Industri Kecil Keripik Jamur Tiram
8. Home Industri Pembuatan Roti Ketawa
9. Kerajinan Tenun Ulos (Melanton)
10. Produksi Kain Ulos Mesin
11. Sentra Kerajinan Ulos (Siantar Timur)
12. Kampung Ulos (Siantar Martoba)
13. Kuliner Pembuatan Lumpia (mekarnauli)
14. Toko Kacang Asli
15. Kampung Mural (kuliner mie)
16. Kelompok es krim
17. Produksi Opak
18. Pengrajin Tape Ubi
19. Rumah Makan Khas Batak (RM.Silindung)
20. Pembuatan Keripik (Siantar Martoba)
21. Kerajinan Minyak Karo
22. Pengrajin cinderamata dari sampah
23. Kerajinan Kayu dan Mebel (Miniatur Becak Siantar)¹⁵⁶

Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan, maupun penyaluran hobi. Keadaan demikian di kota Pematangsiantar adalah :

1. Taman Hewan Pematangsiantar
2. Taman Bunga Kota Pematangsiantar/ Taman Kehati/
Lapangan Merdeka

¹⁵⁶ Laporan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (Ripparkot) Pematangsiantar 2019-2025.

3. Tugu Becak
4. Taman Makam Pahlawan dan Tugu Wahana Tata Nugraha (*Landmark* Kota)
5. Pusat Jajanan Siantar Square
6. Pusat Jajanan Vihara Square
7. Café Massa Kok Tong
8. Kawasan Kuliner Sumber Jaya
9. Kuliner Khas Ayam dan Bebek Oblo-Oblo
10. Rencana Taman (Panti Jompo)
11. Taman Kampus Universitas Simalungun.

Fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*) kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu, Hal ini adalah Rencana Rest Area – Persinggahan City Hotel.

Fasilitas rekreasi dan olah raga, kawasan rekreasi dan olah raga, kawasan padang golf, area sirkuit olah raga. Hal ini terdapat di kota Pematangsiantar yaitu :

1. Kolam Renang Detis Sari Indah
2. Martoba Water Park
3. Siantar Water Park
4. Water Song
5. Kolam Renang Tirta Wira Yudha
6. Kolam Renang Air Pancur Nauli (Jl.Sipahutar)
7. Lapangan Farel Pasaribu

D. Cagar Budaya sebagai Daya Tarik Wisata

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat

dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh tahun);
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Sebuah lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Berdasarkan sejarah bahwa Kota Pematangsiantar saat ini, awalnya adalah ibu kota (Pamatang) dari kerajaan Siantar. Perkembangan waktu telah dicatat sejarah bahwa pada awal abad ke 20 (tahun 1917) dimulai perbaikan restrukturisasi pemerintahan dengan membuat status kota-kota, menjadi kota administratif (*geemente*) dan kabupaten (*afdeeling*). Penataan wilayah kecamatan (*onderafdeeling*) juga dilakukan sehingga sebuah kota berubah menjadi sebuah kota yang memiliki peradaban modern. Pamatang Siantar ibukota kerajaan Siantar, telah dipersiapkan pemerintah kolonial Belanda menjadi ibukota *afdeeling Simeloengoen en Karolanden*.

Sebagai ibu-kota, tentu fasilitas kota terutama bangunan-bangunan, menjadi hal yang penting bagi

keberlangsungan kehidupan di ibukota. Bangunan - bangunan tersebut kini menjadi sebuah peninggalan yang difungsikan sebagai museum, tempat aktivitas para pejuang veteran, hotel, dan lain-lain.

Untuk menjaga kelestarian dan nilai sejarah dan budaya dari bangunan tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah juga mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya;
- b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya;
- d. Menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat;
- e. Menyelenggarakan promosi cagar budaya;
- f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya;
- g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur,

- situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. Mengalokasikan dana.

Pemerintah Kota Pematangsiantar juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 – 2032, yang menyebutkan bahwa kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung meliputi (a) situs budaya; dan (b) bangunan bersejarah (*heritage*) dan bangunan keagamaan. Adapun situs budaya disebutkan pada pasal 45 meliputi: a. Kawasan makam keluarga Raja Siantar di Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan; dan; b. Kawasan museum Simalungun di Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Selatan.

Selanjutnya, bangunan bersejarah (*heritage*) dan bangunan keagamaan yang disebutkan pada Pasal 46 meliputi:

- a. Balai Kota di Kelurahan Proklamasi;
- b. Gedung DPRD Kota di Kelurahan Proklamasi;
- c. Gedung BRI cabang Pematangsiantar di Kelurahan Proklamasi;
- d. Gedung Kantor Pos di Kelurahan Proklamasi;
- e. Gedung Juang di Kelurahan Proklamasi;
- f. Monumen Taman Merdeka di Kelurahan Proklamasi;
- g. Kawasan hotel bersejarah di Kelurahan Proklamasi;
- h. Kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Proklamasi;
- i. Kawasan rumah sakit umum di Kelurahan Simalungun;

- j. Bangunan gereja GPIB di Kelurahan Teladan;
- k. Bangunan gereja Katholik St. Laurentius di Kelurahan Karo;
- l. Kawasan gereja HKBP di Kelurahan Kristen;
- m. Kantor pusat GKPS di Kelurahan Bane;
- n. Kantor pusat Gereja Pentakosta di Kelurahan Siopat Suhu;
- o. Kantor pusat Gereja HKI di Kelurahan Pardamean;
- p. Kantor pusat Gereja GKPI di Kelurahan Teladan;
- q. Kawasan Masjid Raya di Kelurahan Timbanggalun;
- r. Patung Dewi Kwan Im di Kelurahan Tomuan;
- s. Vihara Maha Vihara Vidya Maitreya di Kelurahan Melayu;
- t. Gereja GKPS Jalan Sudirman Kelurahan Teladan; dan
- u. Bangunan Masjid Kampung Keling jalan Cipto di Kelurahan Simalungun¹⁵⁷.

Selain itu, secara khusus disebutkan bahwa kawasan peruntukan pariwisata di Kota Pematangsiantar seluas 5,9 ha meliputi pengembangan pariwisata budaya, pariwisata buatan dan pariwisata alam. Pariwisata budaya tersebut diarahkan di Kelurahan Simalungun yang meliputi:

- i. Kawasan sekitar situs budaya makam Raja Siantar;
- ii. Museum Simalungun; dan
- iii. Kawasan bersejarah pusat pemerintahan di Kelurahan Proklamasi.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

¹⁵⁷ Laporan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (Ripparkot) Pematangsiantar 2019-2025.

Pematangsiantar Tahun 2012-2032, direncanakan akan direvisi untuk mencapai keserasian, keharmonisan, penataan ruangan dengan perkembangan zaman. Kemudian pada tahun 2016, melalui forum rapat konsultasi Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Kota Siantar dengan Tim Perancang Perda dari Kemenkumham dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Siantar, Kadis Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Porabudpar), Fatima Siregar, secara tak resmi mengusulkan sejumlah benda maupun kawasan untuk dijadikan cagar budaya di Kota Siantar untuk di PERDA-kan. Sejumlah benda yang diusulkan dianggap memenuhi kriteria layak cagar budaya, yang diantaranya benda bernilai sejarah, budaya, telah berusia diatas 50 tahun, dan kriteria lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Adapun benda dan kawasan yang diusulkan adalah sebagai berikut¹⁵⁸:

1. Kantor Walikota Siantar yang berdiri sejak tahun 1920;
2. Gedung lama (Eks) DPRD Siantar beridiri tahun 1920 (saat ini kantor BKPP dan Bappeda Kota Siantar);
3. Stasiun Kereta Api yang berdiri sejak tahun 1915;
4. Taman Hewan yang berdiri sejak tahun 1920;
5. Kampung Kerajaan Pulo Holang Pematang yang diperkirakan berdiri tahun 1450;
6. Gedung dan Kompleks Siantar Hotel yang berdiri sejak tahun 1920;
7. Museum Simalungun yang berdiri sejak tahun 1940;
8. Becak BSA yang telah ada sejak tahun 1940;
9. Gereja HKBP yang berdiri sejak tahun 1908;
10. Masjid Raya Siantar;
11. SMA Negeri 4 yang berdiri sejak tahun 1917;

¹⁵⁸ Laporan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (Ripparkot) Pematangsiantar 2019-2025.

12. SMP Negeri 4 yang berdiri sejak tahun 1917;
13. Gereja GKPS;
14. Gereja Kalam Kudus yang berdiri sejak tahun 1920;
15. STT HKBP Nommensen;
16. Gedung BRI Cabang Siantar;
17. RSUD Djasemen Saragih;
18. Rumah Sakit Tentara;
19. SD Negeri Simarito;
20. Sekolah Taman Asuhan;

Selanjutnya, dengan penetapan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah (Perda) akan mendorong percepatan perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Pemerintah daerah maupun masyarakat Kota Pematangsiantar dapat memanfaatkan Cagar Budaya tersebut untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemanfaatan Cagar Budaya untuk pariwisata harus dapat memberikan manfaat positif, mendorong kemajuan pengetahuan, sekaligus melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya dari Cagar Budaya tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Perhatian utama dalam penulisan buku ini adalah menyangkut pembangunan pariwisata, melalui manajemen situs sejarah dan kearifan lokal di kota Pematangsiantar. Titik fokus perhatian mencakup beberapa masalah yang menjadi perhatian yaitu : Bagaimana potret kerajaan Siantar dari sebuah kerajaan lokal tradisional berubah menjadi kota modern; Bagaimana Fenomena Situs Sejarah, Warisan Tempoe Doeloe, Potensi Destinasi Dan Edukasi Historis Di Kota Pematangsiantar; Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam situs sejarah, dan cagar budaya dalam pewarisan budaya lokal di kota Pematangsiantar yang prularis; Bagaimana Pembangunan Pariwisata, Dan Manajemen Kepariwisata.

Potret kerajaan Siantar dari sebuah kerajaan lokal tradisional berubah menjadi kota modern, tampak pada saat ini di kota Pematangsiantar. Bentuk kerajaan Siantar, masih tampak di berbagai wilayah kota ini, seperti ibukota kerajaan Siantar pada saat ini ada di kelurahan Pamatang. Di kawasan Pamatang terdapat sungai yang mengalir yaitu Bah Bolon dan dapat dijadikan sebagai destinasi wisata kota. Selain itu di Pamatang juga masih tersisa kuburan dari dinasti Damanik dinasti yang memerintah di kerajaan Siantar. Kompleks *rumah bolon* (Istana) kerajaan Siantar juga masih tampak di kawasan ini. Selain itu juga kelihatan pengaturan arus sungai bah Bolon, dekan pabrik es, kesemuanya itu berada di kawasan Pamatang. Bangunan perkantoran yang digunakan oleh pemerintah kota Pematangsiantar sampai saat ini (2020) seperti gedung BRI di jalan Merdeka, Gedung Kanor

Walikota Pematangsiantar di Jalan Merdeka, Gedung Nasional, Gedung Juang 45 di Jalan Merdeka semuanya masih bangunan awal kolonial. Hal ini menggambarkan betapa indahnya kota ini pada masa lampau masa tradisional dan berubah menjadi modern. Hal ini telah diuraikan dalam bab 2 dan 3 buku ini.

Fenomena Situs Sejarah, warisan tempoe doeloe, potensi destinasi dan edukasi historis di kota Pematangsiantar, sungguh menjanjikan bahwa kota ini dapat diangkat menjadi sebuah wilayah pariwisata sebelum dan sesudah menuju danau Toba. Situs sejarah sungguh sangat banyak dan beraneka ragam jenisnya di kota ini. Walaupun belum tersentuh pada saat ini oleh pihak pemerintah, maka yang jelas kota ini berpotensi membangun pariwisata melalui pengembangan situs sejarah. Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan manajemen situs sejarah, sehingga pariwisata sejarah dapat meningkat di kota ini. Warisan situs sejarah di kota ini berupa benda-benda bersejarah, seperti gudung bersejarah, museum bersejarah, kawasan bersejarah, tata-ruang alam yang bersejarah seperti sungai yang membelah kota ini, yaitu sungai bah Bolon.

Pematangsiantar adalah kota yang pluralis pada saat ini yang dibuktikan juga dengan tinggalan situs sejarah yang beraneka ragam. Nilai-nilai yang terkandung dalam situs sejarah, dan cagar budaya dalam pewarisan budaya lokal di kota Pematangsiantar yang prularis. Kota ini terkenal dengan keberagaman etnis, budaya dan agama. Hal itu membuatnya memiliki banyak destinasi wisata religi. Diantaranya yang terkenal dikalangan wisatawan adalah patung Dewi Kwan Im. Patung ini menjadi salah satu ikon wisata religi yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan di kota Pematangsiantar. Demikian juga di kota ini ditemukan pohon

terang tertinggi di Asia tenggara yaitu terdapat di Jalan Gereja Pematangsiantar. Di kota ini juga merupakan pusat perkantoran beberapa Sinode Kristen protestan, seperti Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang terdapat di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih. Ada juga kantor Sinode Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), ada juga kantor Sinode Huria Kristen Indonesia (HKI), ada juga Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), ada juga Gereja Kalam Kudus, ada juga Gereja Methodis, ada juga Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB).

Kemudian di kota ini juga dikenal adanya Mesjid Raya, mesjid yang tertua di kota Pematangsiantar. Pematangsiantar yang berudara sejuk, dekat dengan Danau Toba. Di kota ini terdapat 73 masjid, di antaranya adalah Masjid Raya yang terletak di Jalan Masjid No.6, Pematangsiantar. Masjid Raya didirikan pada tahun 1911. Pada awalnya, dindingnya terbuat dari papan dan atap terbuat dari rumbia, pendiri awal oleh tiga orang tokoh Tuan Syah H. Abdul Jabbar Nasution, dr. M. Hfcnnzah Harahap, dan Penghulu Hamzah Dauly. Masih banyak lagi kesemuanya menggambarkan kota ini adalah majemuk dari segi agama, suku, bahasa, dan budaya.

Pembangunan pariwisata, dan manajemen kepariwisataan adalah mutlak dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di kota Pematangsiantar. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya khususnya pada pasal 7 disebutkan bahwa mengelola kepariwisataan menyangkut 4 aspek yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Industri pariwisata menyangkut produk dan jasa yang dihasilkan oleh penyedia wisata untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, destinasi wisata menunjuk pada obyek dan daya tarik wisata yang menjadi

tujuan dari wisatawan, pemasaran menyangkut bagaimana menawarkan obyek dan daya tarik wisata kepada calon wisatawan, dan kelembagaan pariwisata berhubungan dengan organisasi pendukung kepariwisataan yang meliputi pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Penyelenggaraan pariwisata diharapkan mampu mendorong upaya untuk menumbuhkan masyarakat Indonesia untuk semakin mencintai tanah air, mempertebal rasa memiliki terhadap apa yang ada pada negara ini, menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan diantara suku bangsa yang ada di tanah air dan saling memahami adat istiadat dan budaya daerah masing-masing, dan antar daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pariwisata ditujukan pula untuk meningkatkan persahabatan antar bangsa khususnya antar sesama bangsa Indonesia dengan bangsa luar Indonesia melalui pengembangan kerjasama internasional.

Berangkat dari hakekat PP 50 Tahun 2011, maka sesungguhnya kota Pematangsiantar dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Untuk itu sangat perlu didukung oleh keberadaan komponen-komponen pembentuk destinasi pariwisata, yang unggul dan berdaya saing tinggi, serta memiliki hubungan yang kuat, kompak, bersinergi, dan saling mendukung antar komponen pembentuknya.

Destinasi wisata atau bisa disebut juga objek wisata adalah kawasan geografis yang dapat menimbulkan daya tarik dimana didalamnya terdapat pula fasilitas, aksesibilitas yang membuat wisatawan ingin melihatnya dan berkunjung.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032, direncanakan akan direvisi untuk mencapai keserasian, keharmonisan, penataan

ruangan dengan perkembangan zaman. Kemudian pada tahun 2016, melalui forum rapat konsultasi Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Kota Siantar dengan Tim Perancang Perda dari Kemenkumham dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Siantar, Kadis Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Porabudpar), Fatima Siregar, secara tak resmi mengusulkan sejumlah benda maupun kawasan untuk dijadikan cagar budaya di Kota Siantar untuk di PERDA-kan. Sejumlah benda yang diusulkan dianggap memenuhi kriteria layak cagar budaya, yang diantaranya benda bernilai sejarah, budaya, telah berusia diatas 50 tahun, dan kriteria lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman. 2015. *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945–1998*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Agustono, Budi., dkk. 2012. *Sejarah Etnik Simalungun*. Medan: USU Press.
- Anonim. 1984. *Sejarah Perang Kemerdekaan di Sumatera 1945-1950*. Medan: Dinas Sejarah Kodam I/BB.
- Aritonang, Jan S. 1988. *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Burhanudin, Jajat (Editor) & Tim Penulis. 2015. *Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli. Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad ke 20*. Jakarta: Grafiti.
- Citra Persada (2018) *Perencanaan Pariwisata Dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Teori dan Praktek*. Penerbit : Bandarlampung.
- Clauss, Wolfgang. 1982. *Economic and Social Change among the Simalungun Batak of North Sumatra*. Verlag Breitenbach Publishers: Saarbrucken. Fort Lauderdale.
- Damanik, Erond L, Juandaha Raya Purba Dasuha. 2016. *Kerajaan Siantar: Dari Pulau Holang Ke Kota Pematangsiantar*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Eron L. dan Dasuha, Juandaha Raya Purba, (2016), *Kerajaan Siantar Dari Puau Holang Ke Kota Pematangsiantar*, Simatri Institute; Medan.

- Damanik, Jahutar. 1981. *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia*. Medan: Bina Budaya Simalungun.
- Damanik, Jan Jahaman. 2012. *Dari Ilah Menuju Allah: Sejarah Kekristenan di Simalungun dalam Aras Perjumpaan Injil dengan Kebudayaan*. Yogyakarta: Andi.
- Dasuha, Juandaha Raya Purba., Martin Lukito Sinaga. 2003. *"Tole! Den Timorlanden das Evangelium!" Sejarah Seratus Tahun Pekabaran Injil di Simalungun 2 September 1903-2003*. Pematangsiantar: Kolportase GKPS.
- Devi, T.Keizerina. 2004. *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Emil Salim, 2010, *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Azis, Iwan J, dkk. (2010), *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Penerbit KPG : Jakarta. hlm.21-30.
- Frances Wood, 2009, *Jalur Sutra-Dua Ribu Tahun di Jantung Asia,(terjemahan)*, Penerbit: PT Elex Media Komputindo : Jakarta. .
- Fusayama, Takao, dkk. 1994. *Runtuhnya Imperium Barat di Asia Tenggara: Fajar Asia*. Medan: Prima dan Lina Computer Press.
- Ginting, Kusuma Erizal, dkk. 1992. *Sejarah Pengibaran Bendera Merah Putih Yang Pertama Di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dan Peristiwa Berdarah Siantar Hotel*. Pematangsiantar: Perc. UD. Keluarga.
- Harahap, Hanif., Dini Ramadhani. 2019. *Laskar Revolusioner Sumatera Timur: Dari Revolusi Sosial di Simalungun Sampai Kudeta Gubernur Sumatera*. Yogyakarta: Deepublish.

- Harahap, Maskut .1994. *Sejarah Singkat Mesjid Raya Pematangsiantar*. Tidak diterbitkan.
- Harahap, Mohd. Yusuf (tim). 1993. *Sumatera Utara dalam Lintasan Sejarah*. Medan: Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- Hasugian, Jalatua. 2020. *Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Pematangsiantar 1917-1942*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- I Gade Pitana, 2005, *Ilmu Pariwisata*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita.
- I Gusti Bagus Rai Utama 2014, *Pengantar Industri Pariwisata*, Yogyakarta : Penerbit Deeppublish.
- Irawan, Ardia Gemala. 2015. *Kota Pematangsiantar Pada Masa Awal Kemerdekaan 1945-1947*. Skripsi pada Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Isdarmanto, (2017), *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Wisata*, Penerbit Gerbang Media Aksara dan STiPrAm : Yogyakarta.
- Kartodirdjo, Sartono (2020), *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Penerbit Ombak : Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, (2009), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Lan, Nio Joe, (1962), *Jepang Sepanjang Masa*, Penrbit PT Kinta: Jakarta
- Liddle, R. William. 1970. *Ethnicity, Party and National Integratin: An Indonesian Case Study* Yale University Press: New Haven and London.
- Liddle, R. William. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia Pada Awal Orde Baru* Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.
- Mahadi. 1976. *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur (1800-1975)*, Jakarta:. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

- Mariohandoko, Djoko., Harto Juwono. 2009. *Sejarah Perlawanan Masyarakat Simalungun Terhadap Kolonialisme: Perlawanan Sang Nahualu*, Bogor: Akademia.
- Muljadi, A.J dan Warman, H.Andri, (2014), *Kepariwisata dan Perjalanan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Naniek Harkantiningih, dkk, 1999. *Metode Penelitian Arkeologi*, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta.
- Pelzer, Karl. J. 1985. *Toeang Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Pujaastawa, I.B.G., (2004), *Tri Hitakarana: Kearifan Lokal Dengan nilai-Nilai Universal*, dalam Wawasan Budaya Untuk Pembangunan; Menoleh Kearifan Lokal , Penyunting Tim Pugar, Penerbit Pilar Politika Yogyakarta. Hlm.403-421
- Purba, D.Kenan., JD.Poerba. 1995. *Sejarah Simalungun*. Jakarta: Bina Budaya Simalungun.
- Purba, O.H.S. 1997. *Migran Batak Toba di Luar Tapanuli Utara: Suatu Deskripsi*. Monora, Medan.
- Reid, Anthony. 1987. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Reischauer, Edwin O, 1982, *Manusia Jepang*, : Penerbit Sinar Harapan : Jakarta.
- Ricklefs, M.C, (2005), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Penerbit Serambi: Jakarta.
- Rohmad, Zaini, (2016). *Sosiologi Pembangunan*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Saifuk Bahri dkk, (2019), *Upaya Pelestarian Cagar Budaya Hollandsch Inlandsche School (HIS) Pertama Di Pontianak*, Dalam GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3, No. 1, Juni 2019.

- Saputra, Edi. 1977. *Simalungun Jogja-nya Sumatera Dalam Perang Kemerdekaan*, Medan: U.P. Bina Satria 45.
- Saputra, Edi. 1987. *Sumatera Dalam Perang Kemerdekaan: Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris dan Belanda*. Jakarta: Bina Satria 45.
- Saragih, Hisarma, 2019. *Zending di Tanah Batak : Studi Tentang Konversi di kalangan Masyarakat Simalungun 1903-1942*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Saragih, Hisarma, 2021. *Situs sejarah, Cagar Budaya Dan Pembangunan Pariwisata di Simalungun, Cirebon :* Penerbit Insania.
- Saragih, J.M. 1985. *Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatra Utara: Simalungun*. Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1984/1985.
- Setiawati, Ika., Nasikun. 1991. *Teh: Kajian Sosial - Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Simarmata, Marulam MT, dkk. 2021. *Quo Vadis Sapangambe Manoktok Hitei? Patunggunng Motto Pematangsiantar*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Simbolon, Jefri. 2016. *Lapangan Merdeka Pematangsiantar Tahun 1957-2004 (Sebuah Tinjauan Historis)*. Skripsi S-1 pada Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sinaga, Maknur (tim). 1999. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Daerah Tk II Simalungun*. Pematangsiantar: Pemda Simalungun.
- Sinaga, T.Moesa (Tim).1983. *Sejarah Museum Simalungun Simalungun*, Pematangsiantar: Yayasan Museum Simalungun.

- Sinaga, K.E. (kolektor naskah ketikan). *Turi-turian Parpandangan Na Bolag*. Pematangsiantar.
- Sipayung, Kasim. 1978. "Simalungun: Sebelum dan Sekitar Permulaan Injil", *Ambilan Pakon Barita* GKPS Edisi September 1978.
- Siregar, Fitria Anggina. 2016. *Wisata Vihara Avalokitesvara (Studi Etnografi Mengenai Wisata Religi Di Kota Pematangsiantar)*. Skripsi S-1 pada Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sitorus, L (Tim Sejarah). 2007. *Sejarah Jubileum 100 Tahun HKBP Pematangsiantar Ressor Pematangsiantar Distrik V Sumatera Timur*. Pematangsiantar.
- Suarsono dan Alvin Y.So, 2013, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Sulasman (2014), *Metodologi Penelitian Sejarah, Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
- Sudjatmoko, (1987) *Nilai-Nilai tradisional Dalam Proses Pembangunan*, dalam Colletta, Nat J, & Kayam Umar, (1987), *Kebudayaan dan Pembangunan, Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, hlm.35-48.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukamdi, 2013, *Pemasaran Pariwisata; Edisi Disertasi*, Penerbit Ar Raafi : Bandung.
- Sulistiyadi Yohanes dkk., (2017), *Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat*, Penerbit Ara: Bandar Lampung.

- Sunjayadi, Ahmad (2019) *Pariwisata di Hindia-Belanda (1891-1942)*. Penerbit KPG Gramedia : Jakarta.
- Susanto, Djulianto (2010), *Berbagai Kejahatan Terhadap Peninggalan Arkeologi*, Dalam Majalah Arkeologi Indonesia.
- Tambak, TBA Purba. 1982. *Sejarah Simalungun*. Pematangsiantar: Percetakan HKBP.
- Tanjung, Febhy Rizky. 2016. *Ritual Piodalan Etnik Bali Di Pura Jagadhita Toba Di Kelurahan Bahkapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar*. Skripsi S-1 Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri: Medan.
- Tideman, J, 1922, *Simeloengoen: Het Land der Timoer Bataks in Jizn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling tot Een Deel van het Cuulturgebed van de Oostkust van Sumatra*. Stamdruckerij Louis H. Becherer, Leiden.
- Tideman, Jan. 1922. *Simalungun: Tanah Batak Timur dalam Keterasingan dan Perkembangannya Menjadi Bagian dari Daerah Perkebunan Pantai Timur Sumatera* (Terjemahan, Djoko Marihandoko dan Harto Juwono). 2009. Jakarta: Frans Purba.
- TWH, Muhammad. 1997. *Belanda Gagal Merebut Pangkalan Berandan*. Medan: Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RI.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Vlekke, Bernard, HM, 2016, *Nusantara : Sejarah Indonesia*, PT Gramedia : Jakarta.
- Yoeti, Oka. 1996. *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Bandung : Penerbit Angkasa.

- Yohanes Sulistyadi dkk, 2013. Indikator perencanaan Pengembangan pariwisata berkelanjutan, Bandung : Penerbit Aura.
- Yogi Indra Pratama, 2016. *Konsep pengembangan kawasan Pariwisata terpadu di Kecamatan Batu Kota Batu* (Tesis) Program Magister Bidang Keahlian Manajemen Pembangunan Kota Fakultas Teknik ITS Surabaya.
- Zaenuri, Muchamad, *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah Konsep Dan Aplikasi*, Yogyakarta : Penerbit e-Gov Public.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, (2002), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka : Jakarta.

Arsip Kolonial:

- Besluit van Gouvernuer Generaal* Nomor 1 tanggal 24 April 1906, bundel *Algemeen Secretarie*.
- Besluit van Gouvernuer Generaal* Nomor 14, tanggal 9 September 1906 bundel *Algemeen Secretarie*.
- Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsche Indie*, *Staatsblad* Nomor 285 tanggal 27 Juni 1917.
- H.E.C.Quast. *Memorie van Overgave van de Afdeeling Simaloengoen en de Karolanden, Sumatra's Ooskust*, December 1913.
- H. Beeuwkes. *Memorie van Overgave Betreffende de Afdeeling Simeloengoen en Karolanden, Residentie Sumatra's Ooskust*, 14 September 1929.
- Meindersma, G.W. *Memorie van Overgave van den Simaloengoen en de Karolanden*. 7 October 1938.
- Surat Residen Pantai Timur Sumatera Nomor 1953/2 kepada Gubernur Jenderal Idenburg, tanggal 1 Maret 1913. bundel *Algemeen Secretarie*.

Zainuri, Muchamad, (2012), *Perencanaan Strategis Kepariwisata daerah Konsep dan Aplikasi*, Penerbit e-Gov Publishing: Yogyakarta

Arsip/Dokumen Lembaga

- , 1980. *Arsip Dinas Pasar Kota Pematangsiantar*.
- , 1996. *Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kodya Dati II Pematangsiantar*.
- , 2005. *Dokumen dan Arsip SMA Negeri 4 Jalan Pattimura Pematangsiantar (1950 – 2005)*.
- , 2005. *Dokumen SD Negeri 122350 Jalan Sutomo Pematangsiantar*.
- , 2022. *Pematangsiantar Dalam Angka tahun 2021*. Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar.

Sumber Internet:

- <https://www.lapasematangsiantar.com/profile/sejarah-lapas>, diakses 15 Maret 2022.
- <https://archdioceseofmedan.or.id/sejarah-kam>, diakses, Jumat, 25 Maret 2022
- https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Kristen_Protestan_Simalungun, diakses , Minggu 27 Maret 2022.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Protestan_di_Indonesia_bagian_Barat, diakses Minggu, 27 Maret 2022.
- <https://plantersclub.blogspot.com/2012/12/handels-vereeniging-amsterdam.html>, diakses Rabu 23 Maret 2022.
- <https://mahaviharamaitreya.org/sejarah-pendirian>, diakses Jumat, 25 Maret 2022
- <http://petulanganrahman.blogspot.com/2019/01/lxviii-buddha-maitreya-di-pematang.html>, diakses Jumat, 25 Maret 2022

PROFIL PENULIS



Dr. Hisarma Saragih, M. Hum., dosen Prodi Pendidikan Sejarah, dan Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun Pematangsiantar. Lahir di Merek Situnggaling 9 Januari 1964. Tamat dari SD Negeri 2 Pamatang Raya (1975), ; SMP Negeri 1 Pamatang Raya (1979); SMA Negeri Seribudolok (1982). Sarjana (Drs) Jurusan Sejarah FS USU Medan (1988). Magister Humaniora (M.Hum) dari

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2000). Doktor Studi Pembangunan dari FISIPOL USU Medan dengan predikat *Cumlaude* thn 2018. Jabatan yang pernah dipangkunya: Pembantu Dekan III FKIP USI (1996-1998) ; Sekretaris LPPM USI 2001-2002; Dekan FKIP USI 2002-2005; Pembantu Rektor II USI 2005-2009; Pembantu Rektor I USI 2009-2012; Rektor Universitas Simalungun 2012-2014 Direktur Badan Penjaminan Mutu Univ. Simalungun 2015-2019.

Dalam bidang profesi, menjabat sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Siantar Simalungun Periode 2021-2026. Beberapa Karya yang terbit : Buku *Zending di Tanah Batak, Studi tentang Konversi dikalangan Masyarakat Simalungun 1903-1942* Ombak: Yogyakarta, 2019.; Buku: *Patunggunng Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun*,(Ed.) ISBN: 978-623-6761-75-5. Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan 2020.; *Filsafat Pendidikan* ISBN: 978-623-342-011-2 Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan 2021. Jurnal: *Aktualisasi Kearifan Lokal Raja Sang Naualuh Damanik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah*

Kebudayaan dan Kesenjaraan Vol. VI, No. 1, Tahun 2019. ;
Dinamika Identitas Etnis Simalungun Dan Pembangunan di Kota Pematangsiantar, dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan Vol. V, No. 2, Tahun 2018. ;
Sejarah Simalungun (buku..ditulis dkk, terbit 2012 USU Press.)
; *Habonaron do Bona* : Filosofi kehidupan Orang Simalungun Abad 21, Chapter. terbit 2017 Simetri Institute Medan.
Actualization of Local Wisdom in Simalungun Ethnic Daily Life : Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 136, Copyright © 2018, the Authors. Published by Atlantis Press.
(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>). *The struggle of Batak Simalungun for their identity in Church organization in Simalungun*, Medan, Indonesia, Journal of Human Behavior in the Social Environment, <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1590888>.; *Socio-cultural change influences the changes of Simalungun religion*, (2020) Asian Ethnicity, DOI:10.1080/14631369.2020.1792269. <https://doi.org/10.1080/14631369.2020.1792269>).

PROFIL PENULIS



Jalatua Habungaran Hasugian, S.Pd., M.H., M.A merupakan Dosen (DPk) Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Simalungun Pematangsiantar. Lahir di Hutagalung - Parlilitan, 29 Juli 1974. Saat ini tinggal di Kota Pematangsiantar. Menyelesaikan Sarjana Pendidikan dari FKIP Universitas Simalungun Pematangsiantar (2003);

Magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan (2009) dan Magister Ilmu Sejarah dari FIB Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (2015). Sejak mahasiswa telah aktif sebagai Jurnalis di Jawa Pos Group (Harian Radar Nauli, Sumut Pos dan Posmetro Siantar); Tahun 2006 - 2014 sebagai Guru Sejarah di SMA Negeri 3 Kota Pematangsiantar; 2015 - 2017 beralih sebagai Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar; 2017 - 2022 menjadi Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. Selain itu, sejak 2006 - 2020 sebagai Dosen *part time* pada Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Simalungun; 2009-2014 sebagai Tutor pada Universitas Terbuka UPPJJ-Medan; 2020 - 2022 sebagai Dosen Tetap Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Simalungun dengan Perjanjian (NIDK) dan sejak 1 April 2022 menjadi Dosen Tetap Diperbantukan (DPk) pada Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Simalungun. Hingga sekarang, masih aktif menulis di sejumlah media, khususnya terbitan Sumatera Utara. Beberapa karya tulis yang telah diterbitkan dalam

bentuk buku: Sejarah berdirinya Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun berjudul dengan judul: *Tanggap dan Sigap Dalam Tugas Kemanusiaan: 55 Tahun PMI Pematangsiantar-Simalungun 1957-2012*, terbitan PMI Pematangsiantar Tahun 2012; *Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Pematangsiantar 1917-1942*, diterbitkan KBM Indonesia, Yogyakarta Tahun 2020; *Menggagas Inovasi di Tengah Pandemi: Memotret Program Kampus Mengajar dari Kota Pematangsiantar* diterbitkan KBM Indonesia, Yogyakarta Tahun 2021

